

**Kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dalam Kerjasama  
Penanganan Deforestasi Hutan di Indonesia melalui Program  
TFCA tahun 2011**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya



Disusun Oleh:

Laita Frionamta

12512040711040

**Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya  
Malang  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Laita Frionamta

NIM : 125120407111040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi Hutan Di Indonesia melalui Program TFCA tahun 2011”** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 12 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Laita Frionamta  
125120407111040

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEPENTINGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM**  
**KERJASAMA PENANGANAN DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA**  
**MELALUI PROGRAM TFCA TAHUN 2011**

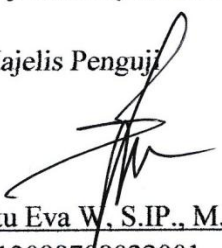
**SKRIPSI**

Disusun oleh :

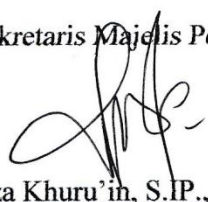
Laita Frionamta  
125120407111040

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian sarjana pada tanggal 22 Januari 2018

Ketua Majelis Penguji

  
D.A. Putu Eva W., S.IP., M.Si.  
NIK. 2013098708022001

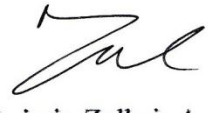
Sekretaris Majelis Penguji

  
Irza Khuru'ih., S.IP., MA.  
NIK. 2017109105132001

Anggota Majelis Penguji I

  
Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001

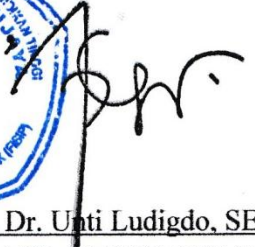
Anggota Majelis Penguji II

  
Muhaimin Zulhair A., S.IP., MA  
NIK. 2016078509081001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak  
NIP. 196908141994021001

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEPENTINGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM KERJASAMA PENANGANAN DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA MELALUI PROGRAM TFCA TAHUN 2011

#### SKRIPSI

Disusun oleh:

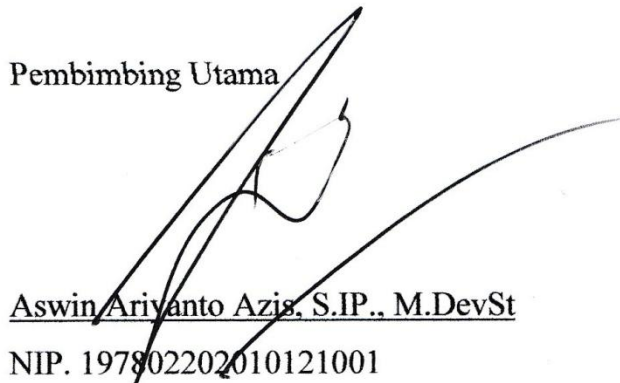
Laita Frionamta

125120407111040


Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

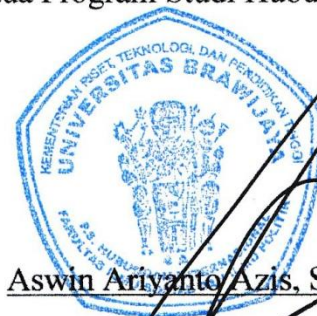
NIP. 197802202010121001

  
Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA

NIK. 2016078509081001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001

## ABSTRAK

**Laita Frionamta, Program Sarjana, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018. Analisa Kepentingan Amerika Serikat dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi Hutan Tropis di Indonesia melalui TFCA tahun 2011. Tim Pembimbing: Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt dan Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA.**

**Abstrak:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan-kepentingan yang menjadi dasar Amerika Serikat memberikan bantuan penanganan deforestasi hutan tropis di Indonesia melalui skema *debt-for-nature swap* dalam program *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) tahun 2011. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Amerika Serikat sebagai negara penghasil emisi karbon melalui kebijakan luar negerinya berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan menangani perubahan iklim. Selanjutnya laju deforestasi hutan tropis di Indonesia yang semakin besar berdampak luas menjadi perhatian dunia dan Amerika Serikat untuk menguranginya. Penelitian ini menggunakan konsep *national interest* yang diajukan oleh Donald E. Nuechterlein yang memiliki empat indikator dasar kepentingan nasional suatu negara. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat empat kepentingan nasional yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam program TFCA di Indonesia.

**Kata kunci:** *national interest*, Amerika Serikat, TFCA, *debt-for-nature swap*, deforestasi.

## ABSTRACT

**Laita Frionamta, Bachelor Degree, Department of Internasional Relations, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University Malang, 2018, *Analysis of United States of America's Interest in the Cooperation of Handling Forest Deforestation on Indonesia Program through TFCA in 2011.* Supervisor: Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt and Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA.**

**Abstract:** this research aims to analyse the interests of the United States to provide assistance in dealing with tropical deforestation in Indonesia through debt-for-nature swap scheme in TFCA program in 2011. This research study is important because the United States as a country who producing carbon emissions through its foreign policy committed to reducing that and handling climate change. Furthermore, the rate of tropical forest deforestation in Indonesia is increasingly widespread to be attention of the world, one of which is United States to reduce it. This research uses national interest concept initiated by Donald E. Nuechterlein, which has four basic indicators of national interest. The result of this research proved that there are four basic national interest held by the United States in the TFCA program in Indonesia.

**Key words:** national interest, United States, TFCA, debt-for-nature swaps, deforestation.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini merupakan wujud rasa syukur penulis kepada Allah SWT atas anugerah dan rahmatNya, serta seluruh pihak yang memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini sebagai hasil pelaksanaan kuliah di program studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya.

Terima kasih yang tak pernah habis-habisnya kepada kedua orangtua penulis dan adik penulis serta *sahabat jarak jauh* penulis yang tiada hentinya mendoakan dan secara sabar mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Ibu Karina Putri Indrasari dan Bapak Aswin Ariyanto Azis yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberi nasihat, masukan dan dukungan untuk penulis, juga Bapak Muhaimin Zulhair yang telah membimbing hingga penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih kepada Ibu Dewa Ayu Putu Eva dan Ibu Irza Khuru'in yang telah memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Juga penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh dosen yang selama penulis menempuh pendidikan sarjana yang turut andil dalam meningkatkan dan mengembangkan perilaku dan ilmu penulis.

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis selama perkuliahan, Kirana, Tyas, Sekar, Asti, Anggri dan Rurum yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi masing-masing, saling memberikan semangat, dorongan dan juga kritik-kritik yang memang dibutuhkan.

Terakhir, terima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selama ini memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung untuk meraih kesuksesan dan cita-cita dengan jalan dan cara masing-masing.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **Kepentingan Amerika Serikat dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi Hutan Tropis di Indonesia melalui TFCA tahun 2011** dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang utama kepada:

1. Bapak Prof. Unti Ludigdo, Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
2. Ibu Karina Putri Indrasari dan Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt sebagai dosen pembimbing utama dan Bapak Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si dan Ibu Irza Khuru'in, S.IP., MA selaku dosen penguji yang memberikan saran-saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan skripsi ini untuk menjadi lebih baik.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis membuka lebar saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca dan memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu Hubungan Internasional. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada para pembaca dan segala pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Malang, 22 Januari 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2    Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3    Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4    Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II    KERANGKA PEMIKIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1    Studi Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2    Kajian Konseptual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 <i>National Interest</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3    Definisi Operasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1    Operasionalisasi Konsep <i>National Interest</i> ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4    Alur Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5    Argumen Utama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III    METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1    Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2    Ruang Lingkup Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3    Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4    Jenis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5    Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6    Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB IV	GAMBARAN UMUM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1	<i>Debt for Nature Swap</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	Program <i>Tropical Forest Conservation Act</i> (TFCA) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3	Kerjasama Bilateral Lingkungan Amerika Serikat – Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4	Kerjasama AS – Indonesia dalam TFCA ( <i>Tropical Forest Conservation Act</i> ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.1	TFCA Sumatera .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.2	TFCA Kalimantan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.3	Profil Utang Luar Negeri Indonesia dalam TFCA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V	Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi Hutan di Indonesia melalui Program TFCA tahun 2011 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1	<i>Defence Interest</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2	<i>Economic Interest</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.3	<i>World Order Interest</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.4	<i>Ideological Interest</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI	PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.1	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.2	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Presentase *Forest Loss* Negara

Diagram 2 US *Foreign Assistance* to Indonesia

Diagram 3 Skema Bilateral *Public Debt Swap*

Diagram 4 Skema *Three Party Public Swap*

Diagram 5 Presentase Bantuan AS di Indonesia tahun 2011 – 2016

Diagram 6 Skema *Debt for Nature Swap* TFCA Sumatera

Diagram 7 Skema *Debt for Nature Swap* TFCA Kalimantan

Diagram 8 Pengaruh Opini Kelompok Kepentingan terhadap Penilaian Masyarakat pada isu Perubahan Iklim

Diagram 9 Opini tentang peran media dalam isu Perubahan Iklim

Diagram 10 Opini Partai Politik tentang Perubahan Iklim

Diagram 11 Volume Ekspor Kayu Lapis Indonesia ke Amerika Serikat

Diagram 12 Investasi Luar Negeri AS di Indonesia

Diagram 13 Perbandingan GDP dan FDI di Indonesia

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar 10 besar Negara dengan Jumlah Hilang Hutan Terbanyak

Tabel 2 Negara Penerima Program TFCA

Tabel 3 Program Bantuan Lingkungan AS melalui USAID di Indonesia 2009 – 2013

Tabel 4 Profil Utang Indonesia dalam TFCA

Tabel 5 Kewajiban Pembayaran Utang Pemerintah Indonesia pasca perjanjian TFCA

Tabel 6 Opini warga AS terhadap Perubahan Iklim tahun 2006 – 2011

Tabel 7 Opini warga AS terhadap Ancaman Perubahan Iklim secara Pribadi

Tabel 8 Dampak Perubahan Iklim di Wilayah Amerika Serikat

Tabel 9 Data Perdagangan AS – Indonesia

Tabel 10 Impor Kayu Lapis AS

Tabel 11 Ancaman Utama bagi Regional Wilayah di Dunia

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Kabupaten Target TFCA Kalimantan

Gambar 2 Efek Deforestasi Hutan terhadap Curah Hujan Bumi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Deforestasi mengacu pada hilangnya tutupan hutan, lahan yang dikonversi secara permanen dari hutan ke lahan pertanian.<sup>1</sup> FAO mendefinisikan deforestasi hutan tropis sebagai perubahan hutan dengan penipisan tutupan pohon sampai kurang dari 10%.<sup>2</sup> Deforestasi membersihkan hutan di bumi dalam skala besar dan seringkali mengakibatkan kerusakan pada kualitas tanah. Dunia kehilangan 30 juta ha hutan setiap tahun dan ini berkembang menjadi permasalahan deforestasi tingkat tinggi dan menarik perhatian masyarakat internasional.<sup>3</sup> Selama tahun 1980-1990, dari seluruh kawasan hutan di Asia 8,2%-nya mengalami deforestasi, 6,1% di Amerika Latin dan 4,8% di kawasan Afrika.<sup>4</sup> Kebanyakan deforestasi terjadi di negara berkembang, khususnya di wilayah tropis. Proses ini menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar setara dengan 20% emisi global dari bahan bakar fosil, membuat deforestasi menjadi penyumbang kedua terbesar untuk pemanasan global.<sup>5</sup> Deforestasi hutan secara langsung mengancam sebanyak 400 juta orang - termasuk 50 juta penduduk asli hutan- yang bergantung pada hutan untuk

---

<sup>1</sup> National Geography. 2017. *Deforestation*. Artikel online <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/> diakses 25 Mei 2017

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Contreras, Arnoldo, Hermosilla. 2007. *The Underlying Causes of Forest Decline*. Bogor: CIFOR. Hlm 1. tersedia online [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-030.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-030.pdf) diakses 25 Mei 2017

<sup>4</sup> *Ibid*.hlm, 1

<sup>5</sup> *Ibid*.hlm, 3

kebutuhan subsistem dan berbagai aktifitas manusia yang bergantung kepada hasil hutan menyebabkan perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon dunia.<sup>6</sup>

Perubahan iklim global merupakan isu dunia yang kini menjadi perhatian banyak kalangan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selaras dengan isu tersebut, perhatian masyarakat terhadap perkembangan deforestasi hutan semakin menguat. Perhatian masyarakat internasional ini terlihat dari berkembangnya forum internasional dan bantuan dari negara lain dengan beragam kebijakan dan program yang pada intinya bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki kerusakan hutan dan lingkungan sebagai upaya mengurangi, memperlambat dan bahkan menstabilkan laju perubahan iklim global pada *threshold* yang aman bagi umat manusia sedunia. Menghindari deforestasi hutan merupakan salah satu bagian untuk mengurangi emisi karbon dioksida karena hutan memiliki pengaruh penting pada iklim.<sup>7</sup>

Beban utang yang berat di banyak negara merupakan faktor penyebab hutan tropis cepat menghilang, karena mereka harus memanfaatkan eksploitasi sumber daya alam (terutama ekstrak kayu, minyak dan logam mulia) dialihkan ke pembangkit tenaga listrik untuk membayar utang luar negeri mereka.<sup>8</sup> Pada saat yang sama, pemerintah negara berkembang cenderung memiliki sedikit sumber

---

<sup>6</sup> Achard Federic, Hugh D. Eva, dll.2002.*Determination of Deforestation rates of the World's Humid Tropical Forest*. Science mag: Vol. 297. Hlm.999. Tersedia online [https://www.researchgate.net/profile/Achard\\_Frederic/publication/236237182\\_Determination\\_of\\_deforestation\\_rates\\_of\\_the\\_world's\\_humid\\_tropical\\_forests/links/54aa91770cf2bce6aa1d4c01.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Achard_Frederic/publication/236237182_Determination_of_deforestation_rates_of_the_world's_humid_tropical_forests/links/54aa91770cf2bce6aa1d4c01.pdf) diakses 25 Mei 2017

<sup>7</sup> Contreras, Arnoldo, Hermosilla.*Op.cit.*, hlm 2

<sup>8</sup> Cuthbertson, Bruce.2001.*The Tropical Forest Conservation Act Accomplishes Many Things*. Washington:Pattriberi House. Artikel online <https://tiberi.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=32376> diakses pada 3 Juni 2017

daya yang tersedia untuk disisihkan dan melindungi hutan tropisnya. Salah satu tantangan besar dalam memerangi deforestasi dan perubahan iklim adalah bagaimana mendukung secara efektif kemajuan ekonomi negara-negara berkembang tanpa mengurangi konservasi sumber daya alam mereka. Bahkan saat AS dan negara-negara kaya lainnya mengambil tindakan untuk mengurangi polusi di domestik, usaha mereka untuk menjaga agar suhu bumi tidak naik 2° C akan terbebani jika negara-negara berkembang tidak dapat segera beralih ke ekonomi rendah karbon.<sup>9</sup>

Bagian terpenting dari tantangan memerangi deforestasi adalah memperlambat dan mengembalikan hilangnya hutan. Salah satu alat yang digunakan AS dalam beberapa tahun terakhir untuk secara efektif mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan hutan adalah “*debt-for-nature swap*” yang mengurangi kewajiban utang negara-negara berkembang sekaligus memberikan dana untuk program konservasi. Berdasarkan undang-undang konservasi hutan tropis/*Tropical Forest Conservation Act* (TFCA),<sup>10</sup> sebuah undang-undang tahun 1998 yang disahkan dengan dukungan bipartisan, sekitar US\$ 223 juta telah digunakan pada 18 perjanjian TFCA di 14 negara, sehingga menghasilkan US\$ 326 juta dalam mata uang lokal untuk proyek-proyek konservasi

---

<sup>9</sup> Climate Advisers.2015.*Understanding the Climate Impacts of Tropical Forest Conservation Act*.Forest & Lands, Transformative Analysis. Tersedia online <http://www.climateadvisers.com/tfca-climate-impact/> diakses 25 Mei 2017

<sup>10</sup> TFCA digunakan untuk menangani tekanan ekonomi dengan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengizinkan negara-negara yang berhak terlibat dalam pertukaran utang, membeli kembali atau mengurangi/merestrukturisasi utang dengan imbalan melindungi hutan tropis yang terancam deforestasi secara berkelanjutan. Selain konservasi dan penghapusan utang, TFCA dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat sipil setempat dengan menciptakan yayasan lokal untuk mendukung hibah kecil kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dan masyarakat lokal. (USAID,2014)



hutan tropis.<sup>11</sup> Secara total, sejak awal, TFCA telah terlibat dalam perlindungan sekitar 69 juta ha hutan di seluruh dunia.<sup>12</sup>

TFCA sendiri merupakan perluasan dari *Enterprise for the Americas Initiative* (EAI) yang disahkan kongres pada tahun 1991 yang pada saat itu hanya diperuntukkan bagi negara-negara Amerika Latin dan Karibia hingga kemudian meluas ke negara berkembang diluar wilayah tersebut yang memiliki hutan tropis dikarenakan permasalahan hutan tropis juga terjadi di benua lain.<sup>13</sup> Salah satunya adalah di Indonesia yang mempunyai luasan hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo serta menjadi hutan tropis terluas di seluruh Asia.<sup>14</sup> Dengan luasnya hutan tersebut juga diikuti oleh permasalahan hilangnya tutupan hutan yang terjadi. Di bawah ini adalah data negara dengan jumlah kehilangan hutan dan persentase hilangnya tutupan hutan yang salah satunya adalah Indonesia dan menjadi obyek penelitian penulis.

**Tabel 1.1**  
**10 besar Negara dengan Jumlah Hilang Hutan terbanyak<sup>15</sup>**

Country	Forest loss	Forest gain	Net change
<b>Russia</b>	365015	162292	202723
<b>Brazil</b>	360277	75866	284411
<b>United States</b>	263944	138082	125862
<b>Canada</b>	263943	91071	172872
<b>Indonesia</b>	157850	69701	88149
<b>China</b>	61130	22387	38743
<b>DR Congo</b>	58963	13926	45037
<b>Australia</b>	58736	14142	44594
<b>Malaysia</b>	47278	25798	21480
<b>Argentina</b>	46958	6430	40528

<sup>11</sup> USAID. 2014. *Countries with TFCA Programs*. Dalam <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country> diakses 23 Maret 2017

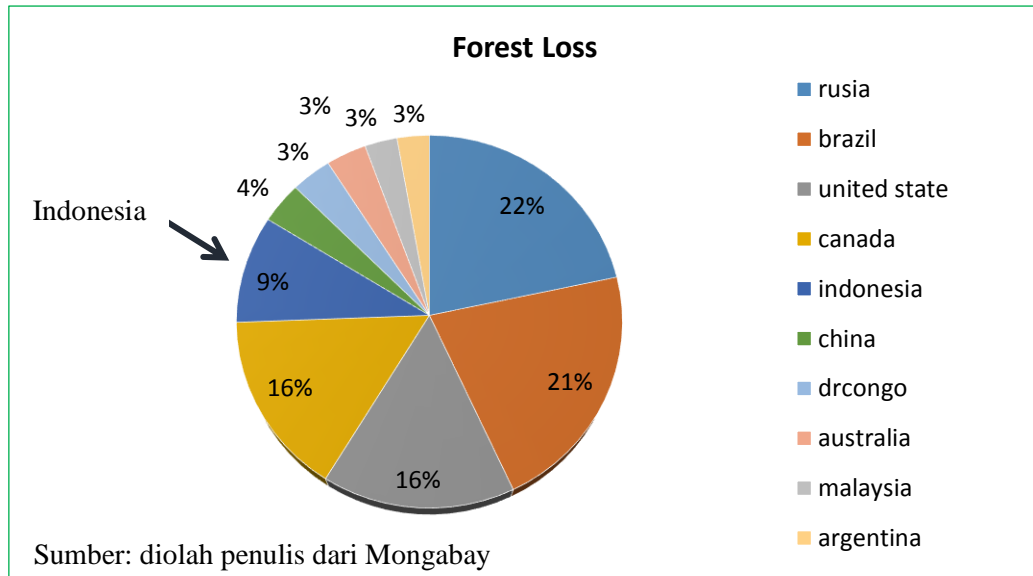
<sup>12</sup> Climate Advisers. *Op.cit.*

<sup>13</sup> Sheikh, P.A. 2008. *Debt-for-nature initiatives and The Tropical Forest Conservation Act: Status and Implementation*. CRS Report for Congress. Tersedia online <https://fas.org/sgp/crs/misc/RL31286.pdf> diakses 28 Februari 2017

<sup>14</sup> FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch . diakses online [https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest\\_full\\_id.pdf](https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_full_id.pdf)

<sup>15</sup> Matt Hansen et al. 2013. *High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change*. SCIENCE VOL 342. Tersedia online <https://news.mongabay.com/2013/11/powered-by-google-high-resolution-forest-map-reveals-massive-deforestation-worldwide/> diakses 30 Mei 2017

**Diagram 1.1**  
**Presentase *Forest Loss* Negara**



Penelitian yang dilakukan Matt Hansen dari *University of Maryland* yang terangkum dalam tabel 1.1 diatas, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta ha antara tahun 2000 hingga 2012, peringkat kelima dibelakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat dan Kanada dalam hal hilangnya hutan.<sup>16</sup> Berdasarkan presentase diagram 1.1, Indonesia memiliki presentase laju deforestasi sebesar 9% dan merupakan negara peringkat kedua terbanyak kehilangan hutan diantara negara berkembang yakni setelah Brazil dengan presentase 21%-nya.<sup>17</sup> Dari 98% kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang marak selama 20 tahun terakhir.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.* Matt Hansel.2013.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Butler, Rhett.2013.*Temuan Pola Hutan Google: Laju Deforestasi Meningkat di Indonesia*. Mongabay Indonesia tersedia online <http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/> diakses 29 Mei 2017

Deforestasi yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan berdampak pada ekonomi serta menarik perhatian kelompok peduli lingkungan nasional dan internasional bahkan hingga menarik perhatian negara penghasil emisi karbon terbesar kedua dunia, Amerika Serikat,<sup>19</sup> untuk membantu Indonesia menangani masalah hutan yang terjadi. Pada tahun 2009, Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani kesepakatan kerjasama TFCA dengan mekanisme pengurangan utang Indonesia yang digunakan untuk pelestarian hutan di wilayah Sumatera dan pada tahun 2011 diadakan kesepakatan kedua untuk pelestarian hutan di wilayah Kalimantan.<sup>20</sup> Masing-masing nilai bantuan tersebut terbilang cukup besar bila dibandingkan AS memberikan bantuan kepada negara lain pada tahun sebelumnya yakni US\$ 30 juta pada 2009 dan US\$ 28,5 juta pada 2011.<sup>21</sup> Namun pada penelitian ini, penulis akan fokus pada tahun perjanjian kedua yakni tahun 2011 yang fokus bantuannya di wilayah hutan Kalimantan, Indonesia.

Urgensi dari hubungan kerjasama TFCA penanganan deforestasi antara AS dan Indonesia di hutan Kalimantan yaitu: pertama, sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar kedua di dunia, AS memiliki prioritas dan komitmen untuk melindungi hutan tropis dengan mengurangi/ menghapus utang negara tersebut melalui TFCA sebagaimana kutipan sambutan Presiden George W. Bush berikut ini:

---

<sup>19</sup> Titiyoga, Gabriel W. 2015. Indonesia Peringkat 6 Penyumbang Karbon Dunia. Jakarta: Tempo.co artikel online <https://tekno.tempo.co/read/news/2015/03/05/061647425/indonesia-peringkat-6-penyumbang-karbon-dunia> diakses 30 Mei 2017

<sup>20</sup> VOA. 2017. *Melestarikan Hutan Tropis di Indonesia*. Artikel online <https://www.voaindonesia.com/a/melestarikan-hutan-tropis-di-indonesia/3668445.html> diakses 29 Mei 2017

<sup>21</sup> USAID. *Op.cit*

*"I am committed to using the TFCA to help countries redirect debt payments toward local projects that will protect biodiversity and tropical forest."* – President George W. Bush. April 21, 2001.<sup>22</sup>

Selain Presiden George W. Bush, Presiden AS Barack Obama juga menyatakan hal serupa untuk mengurangi laju deforestasi hutan dunia sebagai bagian dari komitmen Obama di Kopenhagen:

*"We are working together with our partners to provide "fast-start" climate finance approaching \$30 billion during the period 2010-2012 to help meet the adaptation and mitigation needs of developing countries, including deploying clean energy technologies."* – President Barack Obama, 2010.<sup>23</sup>

Berdasar dari kutipan pernyataan dua presiden AS tersebut, AS memiliki kepentingan nasional yang signifikan dalam melindungi hutan tropis di negara-negara berkembang. Pernyataan dukungan untuk perbaikan iklim tidak semata-mata datang hanya dari presiden AS namun juga mendapat tekanan dari kelompok kepentingan domestik AS yang menyatakan bahwa AS harus ikut serta dalam penanganan iklim dunia. Para politisi, pelaku bisnis, kelompok peduli lingkungan dan juga kelompok ilmuwan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang diambil oleh AS menanggapi perubahan iklim yang diakibatkan deforestasi besar.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> George W. Bush: "Fact Sheet: Tropical Forest Conservation Act," April 21, 2001. Tersedia Online Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=78814>. Diakses pada 2 Juni 2017

<sup>23</sup> Barack Obama: "Fact Sheet: President Obama's Development Policy and The Global Climate Change Initiative." 2010. Tersedia online [https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/Climate\\_Fact\\_Sheet.pdf](https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/Climate_Fact_Sheet.pdf) diakses pada 2 juni 2017

<sup>24</sup> Black, Ben. *United States under Pressure to Protect Tropical Forest*. World Watch Institute. Artikel Online <http://www.worldwatch.org/node/6289> diakses 3 juni 2017

Selain pernyataan dari kedua pemimpin negara AS tersebut, kebijakan tentang lingkungan juga diperkuat dari kebijakan luar negeri tahun 2010 pada masa pemerintahan Barrack Obama yang dikenal sebagai *National Security Strategy* (NSS). Di dalam NSS tersebut dijelaskan mengenai kebijakan AS dalam mendukung kerjasama mengenai tantangan utama global yang salah satunya mengenai perubahan iklim dan lingkungan.<sup>25</sup> Perubahan iklim dan bahayanya itu nyata, mendesak dan parah. Perubahan yang diakibatkan oleh planet yang memanas akan menghasilkan konflik baru mengenai pengungsi dan sumber daya, penderitaan kekeringan dan kelaparan, bencana alam yang dahsyat dan degradasi lahan di seluruh dunia. Oleh karena itulah, AS berusaha menyelesaikan permasalahan iklim dan menghadapinya berdasarkan panduan yang jelas dari sains, dan bekerjasama dengan semua negara. Usaha penyelamatan perubahan iklim dilakukan AS dengan berusaha membangun kemitraan secara global, AS berusaha menerapkan dan membangun kesepakatan global dan memastikan tanggapan dan tindakan negara-negara terhadap perubahan iklim. Termasuk di wilayah Asia, salah satunya di Indonesia yang mana AS dan Indonesia sepakat dalam perjanjian TFCA untuk penanganan perubahan iklim yang disebabkan oleh deforestasi hutan.

Urgensi kedua adalah laju deforestasi yang terjadi di hutan tropis Kalimantan mengkhawatirkan banyak pihak dan juga AS. Hasil dari sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *plos one* menunjukkan lebih dari 30% dari hutan tropis Kalimantan telah hancur selama 40 tahun terakhir akibat kebakaran,

---

<sup>25</sup> Seal of the President of the United States. 2010. *National Security Strategy*. PDF dalam <http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf>

industri penebangan kayu dan industri perkebunan.<sup>26</sup> Secara keseluruhan, kerusakan hutan Kalimantan dua kali lipat tingkat lebih tinggi dari sisa luasan hutan tropis dunia.<sup>27</sup> Akibat hal ini, hutan Kalimantan telah beralih dari penyerap karbon dan gas rumah kaca di atmosfer, menjadi sumber emisi karena deforestasi dan kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Melalui TFCA, AS menyatakan bahwa hutan tropis penting untuk dilindungi karena fungsi hutan yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk farmasi dan revitalisasi tanaman pertanian, hutan juga memainkan peran penting sebagai penyerap karbon dalam mengurangi gas rumah kaca dan mengatur siklus hidrologi.<sup>28</sup>

Hal menarik yang diteliti dalam penelitian penulis ini adalah komitmen AS dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia tidak sesuai dengan besarnya jumlah bantuan bidang lingkungan yang diberikan AS kepada Indonesia. Jumlah bantuan yang diberikan AS dalam bidang lingkungan menempati urutan terendah dibandingkan bidang pendidikan yang menempati urutan tertinggi dalam jumlah bantuannya. Hal ini tercantum dalam data diagram di bawah ini yang penulis peroleh dari data dana bantuan luar negeri AS pada tahun 2009 hingga tahun 2011 yang terbagi dalam beberapa pos bidang.

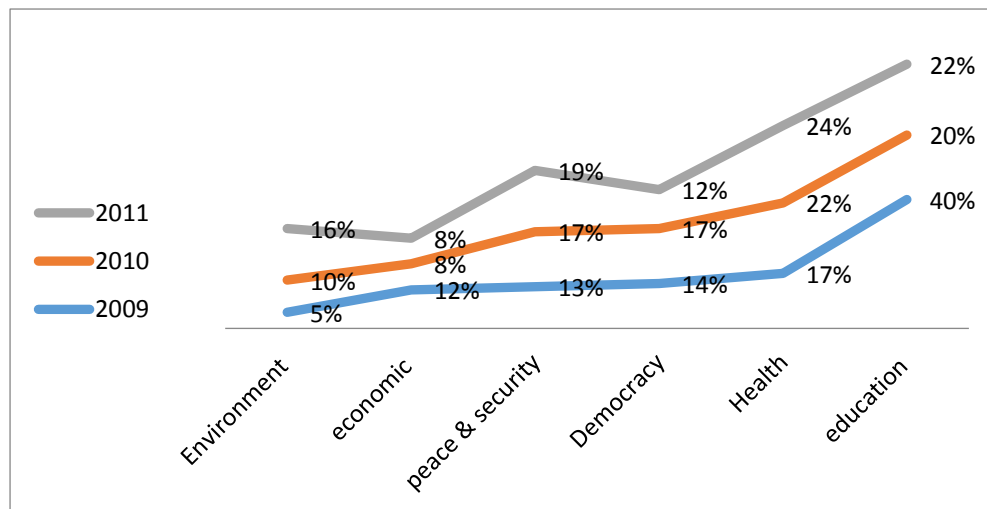
---

<sup>26</sup> Gaveau DLA, Sloan S, Molideña E, Yaen H, Sheil D, Abram NK, et al. (2014) Four Decades of Forest Persistence, Clearance and Logging on Borneo. PLoS ONE 9(7): e101654. Tersedia online <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0101654> diakses 1 Juni 2017

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=78814>. Diakses pada 2 Juni 2017

**Diagram 1.2**  
**US Foreign Assistance to Indonesia<sup>29</sup>**



Sumber: hasil olahan penulis dari *foreignassistance.gov*

Dari diagram 1.2 di atas dapat diketahui berapa besaran bantuan yang diberikan oleh AS kepada Indonesia dalam tiga tahun. Penulis mengambil tahun 2009 hingga 2011 karena pada masa tersebut AS melakukan penandatanganan perjanjian penanganan deforestasi dalam DNS TFCA dengan Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa jumlah bantuan untuk sektor lingkungan hanya memperoleh presentase tidak lebih dari 20%, yakni 5% pada 2009, 10% tahun 2010 dan 16% pada 2011. Hal itu menunjukkan bahwa masalah lingkungan sebenarnya tidak begitu berpengaruh dan tidak mendapat porsi utama dalam bantuan luar negeri AS namun kemudian AS memberikan bantuan penanganan deforestasi ke Indonesia pada tahun 2011 yang fokus di wilayah hutan Kalimantan. Atas sikap AS tersebut

<sup>29</sup> Foreign Assistance.2017. *Foreign Assistance in Indonesia*. Tersedia online <http://beta.foreignassistance.gov/explore/country/Indonesia> diakses pada 27 Mei 2017

perlu dilakukan analisa apa kepentingan AS memberikan bantuan dalam DNS TFCA ke Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apa kepentingan Amerika Serikat dalam kerjasama penanganan deforestasi hutan di Indonesia melalui program TFCA tahun 2011?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui kepentingan Amerika Serikat dalam kerjasama penanganan deforestasi hutan di Indonesia melalui program TFCA tahun 2011.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemberi informasi mengenai studi kasus tentang kepentingan Amerika Serikat memberikan penghapusan utang dalam program TFCA di Indonesia.
2. Sebagai pemberi informasi mengenai konsep yang dipilih penulis yaitu national interest.
3. Sebagai pemberi informasi untuk mengetahui lebih mendalam mengenai proses perumusan kebijakan politik luar negeri suatu negara.
4. Sebagai pemberi informasi untuk pembaca agar dapat berpikir kritis dalam menilai kebijakan luar negeri suatu negara.



## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Studi Terdahulu**

Penulis menggunakan dua studi terdahulu untuk memahami isu dan konsep yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini. Kajian terdahulu yang pertama berjudul “*Joint Theater Missile Defense in Taiwan : Protecting United States Interest and Friends*” sebuah tesis karya Major Joseph Patrick Carrol yang merupakan mahasiswa *Faculty of The US Army Command and General Staff College, Fort Leamwork, Kansas, Amerika Serikat*. Kajian terdahulu yang kedua berjudul “*Leveraging Australia’s Debt Relief to The Philippines Through Debt-for-Investment Projects*”

##### ***2.1.1 Joint Theater Missile Defense in Taiwan : Protecting United States Interest and Friends***

Studi terdahulu ini menceritakan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di wilayah Asia Timur terutama di wilayah Taiwan.<sup>1</sup> Sejarah munculnya kepentingan AS di Taiwan ini sejak terjadinya Perang Korea. Dimana AS dibawah bendera PBB membantu Korea Selatan dan sebaliknya Cina membantu Korea Utara. Akibat dari perang Korea tersebut membawa AS melakukan perjanjian dengan pemerintahan Taiwan yaitu *Mutual Defence Treaty* (1954) untuk membantu Taiwan dalam menanggulangi masalah ancaman dari Cina.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Carrol, Joseph Patrick.2004. Joint Theatre missile defense in Taiwan: protecting Unites States Interest and Friend. Thesis. Fort Leamwork Kansas: Faculty of the US Army Command and General Staff College. Tersedia pdf [www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA428693](http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA428693)

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

Hubungan kedua negara (AS dan Taiwan) berlangsung hingga bertahun-tahun berikutnya. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik, AS tetap melanjutkan penjualan peralatan militer ke Taiwan sesuai dengan aturan TRA yang mengesahkan tindakan ini sekaligus menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan ini merupakan kepentingan AS. Kepentingan AS ini tercantum dalam *National Security Strategy of the USA* (NSS) pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa AS memiliki kepentingan nasional di wilayah Timur Laut Asia dan AS akan menggunakan sistem pertahanan senjata yang disebut *Joint Theater Missile Defense* (JTMD) di wilayah Taiwan khususnya untuk melindungi militer AS, aliansinya dan fasilitas serta lokasi penting dari ancaman senjata.<sup>3</sup>

Masalah menjadi semakin rumit, karena keabsahan Taiwan sebagai negara dipertanyakan, hal ini terkait konfliknya dengan Cina. Taiwan sebenarnya merupakan kawasan dalam negara, yakni salah satu provinsi di Cina. Taiwan secara *de facto* merupakan negara berdaulat tetapi secara *de jure* bukanlah sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, karena senantiasa dihentikan oleh Cina dalam berupaya melakukan reunifikasi.<sup>4</sup> Dari keadaan dan posisi Taiwan yang seperti itu seharusnya AS mempertimbangkan *cost and benefit* dari semua kebijakan yang berhubungan dengan Taiwan. Dan hal tersebutlah yang menjadi fokus utama yang diajukan oleh Major Joseph Patrick Carrol dalam master tesisnya yang penulis gunakan sebagai referensi studi terdahulu.

Major Joseph P. Carrol dalam tesisnya menggunakan paradigma *National Interest*, *Security Dilemma* dan *Missile Proliferation* untuk menganalisa hal apa

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3

yang mempengaruhi penerapan perlindungan senjata oleh AS kepada Taiwan dan juga untuk menganalisa respon aksi balasan dari Cina dan wilayah lain yang terdampak.<sup>5</sup> Untuk konsep utama yang digunakan adalah *National Interest* dari pemikiran Donald E. Nuechterlein.<sup>6</sup>

Carrol menggunakan metode meta-analisis untuk menentukan pola masing-masing kepentingan AS dan kemudian mengestimasi intensitas dari kepentingan Taiwan dan Cina pada isu yang sama. Perbandingan dua hal tersebut digunakan Carrol untuk menentukan apakah rekomendasi spesifik cenderung mengarah pada negosiasi atau kemungkinan terjadi konflik militer.<sup>7</sup> Carrol mengidentifikasi kepentingan AS dalam tesisnya dengan indikator yang digunakan dalam pemikiran Donald E. Nuechterlein. Menghitung intensitas kepentingan yang dimiliki oleh AS menjadi hal utama yang dilakukan oleh Carrol. Dari perspektif AS sendiri, tujuan kebijakan utama adalah resolusi damai konflik di selat Taiwan. Dari indikator yang digunakan untuk menganalisa intensitas kepentingan yang dimiliki oleh AS digunakan pengelompokan indikator dan variabel mana yang termasuk “*vital*” dan “*important*.”<sup>8</sup>

Dari hasil analisisnya, Carrol berhasil menemukan bahwa AS memiliki intensitas kepentingan dari “*important to vital*” di Taiwan.<sup>9</sup> Tingkat ambiguitas dari intensitas ini terletak pada garis teoritis yang menentukan ketika bangsa harus mengambil tindakan militer atau mungkin memutuskan untuk menerapkan cara lain untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kepentingan AS di Taiwan secara

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27

signifikan penting sebagai reevaluasi dukungan program JTMD dan penjualan senjata yang diperlukan. Evaluasi difokuskan pada menanggapi ancaman rudal Cina yang berkembang dengan meningkatkan kemampuan Taiwan untuk merespon dengan cepat dan tepat untuk mencegah agresi di kemudian waktu. Dalam hal inilah intensitas kepentingan AS cenderung bergeser kearah vital.

Studi terdahulu dari tesis milik Carrol ini memberikan kontribusi bagi penelitian penulis dalam hal penggunaan konsep untuk melakukan penelitian. Konsep yang penulis gunakan sama yakni konsep *National Interest* milik Donald E. Nuechterlein. Walaupun sama namun penulis tidak menggunakan cara penelitian yang sama dengan tesis Carrol. Penulis tidak menggunakan semua variabel yang ada. Penulis hanya menggunakan empat variabel dasar kepentingan nasional Nuechterlein dalam penelitian skripsi penulis. Perbedaan kedua adalah berada pada obyek yang diteliti dan fokus penelitiannya. Carrol meneliti tentang kepentingan AS di Taiwan yang berhubungan dengan militer dan keamanan negara. Sedangkan fokus dan tujuan penulis dalam penelitian skripsi nantinya akan melihat apa kepentingan yang dimiliki AS dalam program yang dijalankan di Indonesia mengenai penanganan deforestasi hutan dengan skema pengalihan utang luar negeri.

### ***2.1.2 Leveraging Australia's Debt Relief to The Philippines Through Debt-for-Investment Projects***

Ross Buckley dan Amberlee Small dalam jurnal yang mereka tulis bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa sebuah proyek *debt-for-investment* antara

pemerintah Australia dan Filipina.<sup>10</sup> Penjelasan diawali dengan menganalisa beberapa bentuk *debt relief* (penghapusan utang) dan proyek *debt swap* (pengalihan utang). Diceritakan bagaimana awalnya ide penghapusan utang tersebut diterapkan untuk negara sedang berkembang yang merupakan agenda pemerintah negara-negara barat dan organisasi keuangan IMF dan World Bank. Dengan adanya ide tentang penghapusan utang tersebut maka World Bank mengeluarkan syarat bagi negara yang ingin mendapat penghapusan utang. HIPC (*The Highly Indebted Poor Country*) menjadi syarat utama bagi negara yang ingin mendapatkan penghapusan utang.<sup>11</sup>

Namun menurut Buckley dan Amberlee, kualifikasi HIPC World Bank masih tidak membantu negara-negara yang membutuhkan penghapusan utang. Metode pengklasifikasian sebuah negara dikatakan HIPC masih menjadi persoalan karena standar di masing-masing negara tidak sama.<sup>12</sup> Seperti Filipina yang menjadi obyek penelitian kedua penulis ini dikatakan sebagai negara miskin dengan jumlah belanja pemerintah dengan pendapatannya yang tidak seimbang dan terjerat banyak utang dengan bunga yang tinggi tidak termasuk dalam kategori negara HIPC.<sup>13</sup> Karena tidak termasuk dalam kategori negara HIPC, maka dari itu Filipina mengandalkan inisiasi *debt relief* dari negara maju. Pada umumnya, *debt relief* terdiri dari beberapa jenis mekanisme diantaranya *debt cancellation*, *debt buybacks* dan *debt-swap agreements*.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Buckley, Ross., Amberlee Small. 2007. Leveraging Australia's Debt Relief to The Philippines Through Debt-for-Investment Projects. Macquarie Law Journal vol.7.hal. 107-135.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>13</sup>*ibid*.

<sup>14</sup>*Ibid*

*Debt-swap agreements* telah digunakan di beberapa negara berkembang dalam beberapa dekade kebelakang. Dijelaskan bahwa penamaan *debt-swap* sebenarnya salah karena pada praktiknya tidak ada utang yang ditukar. Yang ada, negara yang berhutang menggunakan uang pembayaran utang untuk proyek pembangunan di negaranya sendiri yang sebelumnya telah disetujui oleh dua negara yang bersepakat dalam perjanjian.<sup>15</sup> *Debt-swaps* menguntungkan bagi kelompok keuangan internasional karena *debt-swap* dapat mengurangi tingkat utang negara dan meningkatkan nilai utang di pasar sekunder.<sup>16</sup> Bagi pemerintah negara pemberi utang, *debt-swap* dapat digunakan untuk mengontrol penyaluran dan penggunaan dana dari utang yang dibatalkannya. Manfaat bagi pemerintah yang memiliki utang yakni untuk mempromosikan pembangunan, menarik investasi ke area kritis dan tentu saja mengurangi utang yang dimiliki. Terakhir manfaat bagi kelompok lokal, *debt-swap* dapat secara substantif mengurangi tingkat kemiskinan dan mendukung kebutuhan proyek lokal, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan berbeda tergantung pada persyaratannya.<sup>17</sup>

Setelah menjelaskan mengenai *debt-swap* dan *debt relief* secara umum, kemudian Buckley dan Amberlee menjelaskan mengenai *debt for investment project* yang menjadi fokus penulisan. Sebelum bekerjasama pengurangan utang dengan Australia, Pemerintah Filipina telah lebih dahulu sepakat dalam *debt-for-development* dengan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2002 mengenai lingkungan. AS setuju untuk membatalkan utang Filipina dan Filipina setuju untuk

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>17</sup>*ibid*

mendanai konservasi hutan melalui NGO lokalnya.<sup>18</sup> Kemudian diceritakan mengenai kondisi ekonomi Filipina yang dikatakan suram dengan total utang luar negeri mencapai US\$ 55,5 juta pada tahun 2005.<sup>19</sup> Kemiskinan meningkat dalam 30 tahun terakhir dengan total 34% populasi berada di bawah garis kemiskinan nasional.<sup>20</sup> Hingga pada tahun 2006, Filipina berutang pada Australia sebesar A\$ 235 miliar, menurun jumlahnya dari tahun 2003 yang berjumlah A\$ 493 miliar.<sup>21</sup>

Buckeley dan Amberlee menganalisa faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pemerintah Australia kemudian memberikan penghapusan utang kepada pemerintah Filipina. Mereka menemukan bahwa beberapa hal menjadi ancaman bagi pembangunan ekonomi Filipina sehingga pemerintah Filipina tidak mampu membayar kembali utangnya.<sup>22</sup> Beberapa hal tersebut yakni 1) tingkat kemiskinan, menjadi ancaman utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Filipina, 2) Stabilitas politik, 3) keamanan, dikarenakan konflik di wilayah Mindanao mengenai konflik agama dan kemiskinan yang tidak kunjung reda dan menjadi semakin luas, 4) bencana alam, bentang alam Filipina yang menjadi faktor utamanya, 5) ancaman flu burung, peternakan unggas menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Filipina menjadi salah satu faktor penyebab flu burung menjadi ancaman yang tidak bisa disepelekan.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup>Factsheet: US-Philippines Debt-Reduction Agreement Under the Tropical Forest Conservation Act (TFCA) dalam Leveraging Australia's Debt Relief to the Philippines through Debt-for-Investment Project, hlm. 7

<sup>19</sup>Doris Chung, Philippines: Bi-Annual Report dalam Leveraging Australia's Debt Relief to the Philippines through Debt-for-Investment Project, hlm. 8

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Federal Reserve Bank of New York dalam Leveraging Australia's Debt Relief to the Philippines through Debt-for-Investment Project, hlm. 8

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Buckley, Ross., Amberlee Small. 2007. Leveraging Australia's Debt Relief to The Philippines Through Debt-for-Investment Projects. Macquarie Law Journal vol.7.hal. 11

Studi terdahulu yang berjudul *Leveraging Australia's Debt Relief to The Philippines Through Debt-for-Investment Projects* ini memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi penulis. Persamaan yang pertama adalah dari tema yang diangkat yakni tentang penghapusan utang yang dialihkan ke sebuah proyek pembangunan. Persamaan yang kedua yakni teknik analisa data kualitatif dengan penjabaran mengenai analisa data. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan penelitian. Studi terdahulu ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penghapusan utang yang dilakukan Australia kepada Filipina dan melihat bagaimana proyek *debt-for-investment* dapat mengakomodasi kepentingan Australia, kepentingan Filipina dan kelompok miskin Filipina. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat memberikan bantuan lingkungan kepada Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, jadi hanya melihat dari satu sisi kepentingan saja yakni negara Amerika Serikat.

**Tabel 2.1**

**Persamaan, Perbedaan dan Kontribusi Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi
1	<i>Joint Theater Missile Defense in Taiwan : Protecting United States Interest and Friends</i>	Konsep <i>National Interest</i> – Donald E. Nuechterlein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus yang diteliti</li> <li>- Metode penelitian</li> <li>- Fokus dan Tujuan Penelitian</li> </ul>	Menjadi rujukan penulis melihat aplikasi konsep <i>national interest</i> – Donald E. Nuechterlein
2	<i>Leveraging Australia's Debt Relief to The Philippines</i>	- Tema penelitian, bantuan untuk pembangunan di negara penerima.	- Tujuan penelitian. Pada studi terdahulu, mengetahui efektivitas	Menjadi referensi penulis melihat bagaimana program bantuan dari negara donor



	<b><i>Through Debt-for-Investment Projects</i></b>	- Teknik analisa data, kualitatif.	bantuan, sedangkan penulis melihat kepentingan negara dalam program bantuan yang diberikan.	digunakan untuk melakukan pembangunan di negara penerima dengan mekanisme pengalihan utang luar negeri.
--	--	------------------------------------	---	---

## 2.2 Kajian Konseptual

Dalam menganalisa kepentingan nasional AS dalam program TFCA yang diberikan di Indonesia tahun 2011, penulis menggunakan konsep utama yakni tentang kepentingan nasional yang ditulis oleh Donald E. Nuechterlein dalam jurnalnya yang berjudul *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, yang mana dijelaskan oleh Nuechterlein ada empat kepentingan dasar suatu negara dalam suatu isu. Empat kepentingan dasar itu adalah *defense interest*, *economic interest*, *world-order interest* dan *ideological interest*.

### 2.2.1 *National Interest*

*National Interest* atau kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘*power*’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian

kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa penstudi yang mengemukakan mengenai definisi dari kepentingan nasional itu sendiri. Bagi Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep kepentingan nasional ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut James N. Rosenau, kepentingan nasional digunakan sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan dan mengevaluasi politik luar negeri dan sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Donald E. Nuechterlein, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konsep kepentingan nasional tersebut.<sup>27</sup> Yang pertama adalah persepsi mengenai kebutuhan dari sebuah negara, dimana kepentingan nasional merupakan sebuah hasil dari proses politik yang panjang.<sup>28</sup> Yang kedua adalah konsep kepentingan nasional ini sangat relevan dengan negara-negara yang independen dan negara-negara yang berdaulat, tidak relevan dengan organisasi internasional.<sup>29</sup> Dan yang ketiga adalah konsep kepentingan nasional ini

---

<sup>24</sup> P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 163

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>26</sup> Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hlm. 34

<sup>27</sup> Nuechterlein, Donald. E. *opcit.* hlm. 247

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 247

<sup>29</sup> *Ibid*.

menggambarkan perbedaan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah negara.<sup>30</sup>

Dalam menentukan kepentingan nasional suatu negara, menurut pemikiran Donald E. Nuechterlein dalam jurnal yang berjudul *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, perlu dilakukan analisa mendalam meliputi faktor-faktor yang menentukan seorang pemimpin negara dalam menentukan kepentingan nasional dalam kebijakan yang dikeluarkannya. Dalam tulisannya tersebut, Nuechterlein membagi kepentingan nasional kedalam empat kategori dasar (*basic national interest*) meliputi *Defence Interest, Economic Interest, World Order Interest* dan *Ideological Interest*.<sup>31</sup> Selain mengidentifikasi keempat *basic* kepentingan tersebut, juga dilakukan analisa untuk menentukan tingkat intensitas perhatian yang dimiliki oleh pemimpin negara dalam isu-isu internasional tertentu. Untuk menentukan tingkat intensitas kepentingan negara terhadap isu internasional, Donald E. Nuechterlein memberikan empat definisi intensitas antara lain *Survival issue, Vital issue, Major issue* dan *Peripheral issue*.<sup>32</sup>

Menentukan tingkat intensitas kepentingan negara akan bergantung pada banyak faktor, diantaranya jarak dari perbatasannya sendiri, komposisi pemerintah yang bersangkutan, jumlah perdagangan yang dilakukan, hubungan historis antar negara, dll. Jadi, sejauh mana pembuat kebijakan menjadi khawatir dengan kejadian di negara lain akibat dari proses berpikir melalui nilai (*value*) dan biaya (*cost*)

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 248

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 249-250

potensi yang terlibat dan akhirnya dapat diputuskan mengenai tingkat intensitas perhatian negara terhadap isu internasional.

Dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi Hutan di Indonesia melalui Program TFCA tahun 2011” penulis menggunakan konsep kepentingan menurut Donald E. Nuechterlein karena keempat kategori kepentingan yang dikemukakan tersebut selaras dengan dimensi politik luar negeri (*grand strategy*) yang dimiliki AS. Keempat dimensi politik luar negeri AS yakni politik atau diplomasi, ekonomi, sosial dan militer.<sup>33</sup> Sehingga dengan konsep Nuechterlein tersebut akan dapat menjawab apa saja kepentingan nasional AS dalam program TFCA di Indonesia.

### **Basic National Interest**

*Basic national interest* akan digunakan oleh penulis untuk memudahkan penulis dalam menentukan bentuk kepentingan nasional. Nuechterlein dalam konsep kepentingan nasionalnya membagi empat jenis kepentingan nasional, yaitu *defence interest*, *economic interest*, *world order interest* dan *ideological interest*, dimana keempatnya tersebut merupakan hal-hal yang mendasari kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>34</sup> Adapun penjelasan mengenai sebagai berikut:

#### *1. Defence interest*

Nuechterlein menjelaskan mengenai salah satu kepentingan dari sebuah negara adalah kepentingan untuk melindungi kedaulatan wilayah negara dan melindungi warga negaranya. Dimana

---

<sup>33</sup> Newsom, D. D., & Gunadi, T. 1998. *Dimensi publik politik luar negeri*. Bandung : Angkasa

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 248

perlindungan dalam hal ini ditujukan untuk menghadapi ancaman/serangan yang dilakukan negara lain atau ancaman yang dapat mengancam sistem pemerintahan negara tersebut.<sup>35</sup>

## 2. *Economic interest*

Pada *economic interest*, dijelaskan mengenai salah satu kepentingan dari sebuah negara adalah tentang menstabilkan dan meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara dengan cara meningkatkan hubungan ekonomi negara tersebut dengan negara lain.<sup>36</sup>

## 3. *World Order interest*

Donald E. Nuechterlein menjelaskan bahwa salah satu kepentingan nasional sebuah negara adalah menjaga stabilitas politik dan sistem ekonomi internasional. Hal tersebut dilakukan agar negara tersebut merasa aman. Selain itu, kepentingan nasional ini juga ditujukan agar masyarakat negara tersebut serta perdagangannya berjalan dengan aman tanpa ada ancaman di luar batas negara tersebut.<sup>37</sup>

## 4. *Ideological interest*

Dalam *ideological interest*, Nuechterlein menjelaskan bahwa salah satu kepentingan nasional dari sebuah negara adalah melindungi nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat disuatu negara dan nilai-nilai tersebut dipercayai baik secara universal.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Ibid, hlm. 248

## Intensities of Interest

Pada *intensities of interest* ini menjelaskan tingkat intensitas isu dalam lingkungan internasional bagi suatu negara.<sup>39</sup> Donald E. Nuechterlein menjelaskan bahwa dalam mengidentifikasi kepentingan nasional suatu negara yang terpenting adalah perbandingan hasil dari *intensities of interest* karena perbandingan hasil kepentingan ini merupakan inti dari analisis yang nantinya akan dilakukan. Proses untuk mengidentifikasi jenis dari kepentingan nasional suatu negara akan benar-benar bekerja dari hasil perbandingan *intensities of interest*.<sup>40</sup> Pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat intensitas isu bagi kepentingan nasional negara karena mereka yang memproses dan kemudian menghasilkan suatu keputusan.<sup>41</sup>

Nuechterlein membagi *intensities of interest* menjadi empat tahapan, yaitu *survival issues*, *vital issues*, *major issues* dan *peripheral issues*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1. *Survival issue*

Tingkat intensitas dari kepentingan nasional pada *survival issue* merupakan tahapan yang paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada tahap ini kepentingan nasional sebuah negara terbentuk ketika kehidupan sebuah negara dikatakan dalam keadaan bahaya dan eksistensi dari sebuah negara dipertaruhkan. Sehingga diperlukannya tindakan secara cepat untuk menangani isu tersebut. Seperti ketika

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 249

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

adanya serangan militer kedalam wilayah teritorial negara tersebut atau juga karena adanya ancaman dari pihak eksternal ketika tuntutananya tidak dipenuhi oleh negara tersebut.<sup>42</sup> Menurut Nuechterlein, hanya *defense interest* yang memenuhi kualifikasi dan mencapai level intensitas dalam kategori ini.<sup>43</sup>

## 2. *Vital Issue*

Kepentingan nasional terbentuk ketika adanya ancaman serius kepada sebuah negara yang mempengaruhi politik dan ekonomi dari negara tersebut. Ancaman tersebut mempunyai dampak jangka panjang dan bisa diatasi dengan adanya tindakan tertentu yang ditujukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Dalam *vital issue*, waktu merupakan perbedaan yang penting karena dalam *vital issue* suatu negara masih mempunyai waktu yang cukup untuk mencari solusi menyelesaikan ancaman tersebut, baik itu untuk mencari pertolongan ke negara aliansi, untuk melakukan tawar-menawar dengan negara musuh, atau untuk mengancam balik negara lawan jika tekanan militer, ekonomi dan politiknya tidak dicabut. Kepentingan yang masuk dalam kategori *vital issue* tidak hanya *survival*, namun juga ekonomi, *world order* dan dalam kasus tertentu *ideological*.<sup>44</sup>

## 3. *Major issue*

Pada tahap ini keberlangsungan kehidupan politik, ekonomi dan ideologi suatu negara terpengaruh oleh tren atau peristiwa-peristiwa

---

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 249

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid

yang terjadi di lingkungan internasional. Sehingga dengan adanya pengaruh dari tren atau peristiwa-peristiwa internasional tersebut diperlukannya tindakan agar pengaruh tersebut tidak menjadi ancaman yang serius. Dalam *major issue* sebuah negara masih membuka kesempatan untuk melakukan kompromi dengan negara lain untuk menyelesaikan suatu isu. Maka dari itu, sebagian besar isu yang muncul pada tahapan ini diselesaikan dengan cara perundingan diplomatik. Tetapi ketika perundingan diplomatik tidak bisa menyelesaikan ancaman tersebut, maka ancaman tersebut bisa bahaya.<sup>45</sup> Kepentingan yang masuk dalam kategori ini menurut Nuechterlein sebagian besar adalah kepentingan ekonomi dan ideologi.<sup>46</sup>

#### 4. *Peripheral issue*

Pada tahap *peripheral issue*, kehidupan politik, ekonomi dan ideologi suatu negara tidak terpengaruh oleh tren atau peristiwa-peristiwa internasional. Tetapi mungkin kepentingan dari warga negara atau perusahaan-perusahaan swasta dari suatu negara yang beroperasi diluar batas negara tersebut terancam dalam tahapan ini.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan variabel *basic national interest* karena penelitian yang penulis lakukan lebih fokus dalam melihat kepentingan nasional Amerika Serikat. Penjelasan mengenai level intensitas isu hanya untuk memaparkan bahwa kemudian kebijakan luar negeri yang dikeluarkan juga dapat dilihat dari seberapa penting tingkat intensitas isu tersebut bagi negara.

---

<sup>45</sup>Ibid, hlm. 250

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup>Ibid, hlm. 250



**Tabel 2.2**

**Kepentingan Nasional - *Donald E. Nuechterlein***

<i>Basic National Interest</i>	<b>Definisi Konseptual</b>
<i>Defence Interest</i>	Kepentingan untuk melindungi kedaulatan wilayah negara dan melindungi warga negaranya dari ancaman/serangan yang dilakukan negara lain atau ancaman yang dapat mengancam sistem pemerintahan negara tersebut
<i>Economic Interest</i>	Kepentingan untuk menstabilkan dan meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara dengan cara meningkatkan hubungan ekonomi negara tersebut dengan negara lain
<i>World Order Interest</i>	Kepentingan menjaga stabilitas politik dan sistem ekonomi internasional. Hal tersebut dilakukan agar negara tersebut merasa aman. Ditujukan agar masyarakat negara tersebut serta perdagangannya berjalan dengan aman tanpa ada ancaman di luar batas negara tersebut.
<i>Ideological Interest</i>	Kepentingan melindungi nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat di suatu negara dan nilai-nilai tersebut dipercayai baik secara universal

Sumber: hasil olahan penulis dari penjelasan definisi konseptual.

## 2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional membantu proses dalam melakukan penulisan. Operasionalisasi ini dapat memberikan sebuah gambaran terkait pembahasan yang akan dilakukan saat proses penulisan. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan operasionalisasi dari variabel dan sub-variabel kepentingan nasional negara dalam program bantuan yang diberikan di negara lain. Pemaparan sub-variabel kepentingan nasional ini didukung oleh penjelasan variabel dari konsep bantuan luar negeri. Sehingga pada pembahasan nantinya penulis akan terbantu untuk menganalisa secara mendalam kepentingan nasional negara dalam isu lingkungan.

### 2.3.1 Operasionalisasi Konsep *National Interest*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein adalah konsep yang menerangkan mengenai keinginan yang ingin dicapai oleh sebuah negara dalam melakukan hubungannya dengan entitas lain, seperti dengan negara lain atau organisasi internasional.

Amerika Serikat dalam hal ini juga memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai dalam hubungannya dengan Indonesia melalui pemberian bantuan untuk isu lingkungan terutama masalah deforestasi hutan tropis. Namun dalam melihat kepentingan yang ingin dicapai juga perlu untuk mengetahui tujuan dari pemberian bantuan yang dilakukan oleh AS. Sehingga dalam operasionalisasi konsep kepentingan nasional ini akan ditemukan penjelasan pendukung dari konsep bantuan luar negeri milik Carol Lancaster yang menyebutkan tujuan-tujuan dari bantuan luar negeri itu sendiri (*aid's purposes*).

### ***Basic National Interest***

Variabel ini akan mengidentifikasi kepentingan nasional AS dalam keputusannya membantu Indonesia menangani masalah deforestasi hutan dengan mekanisme mengalihkan utang luar negeri Indonesia melalui program kebijakan TFCA. Identifikasi kepentingan nasional tersebut berdasarkan pembagian kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein, yaitu *defense interest*, *economic interest*, *world order interest* dan *ideological interest*.

#### ***1. Defence interest***

Pada definisi konseptual dikemukakan bahwa negara menunjukkan kepentingannya untuk melindungi kedaulatan wilayah negara dan melindungi warga negaranya dari ancaman/serangan yang dilakukan negara lain. Isu lingkungan yang terjadi di dunia menjadi sorotan bagi negara, pemerintah dan warga negaranya.

Dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan deforestasi hutan tidak hanya terjadi di negara yang mengalami deforestasi tapi juga menyebar dan mempengaruhi iklim di bagian negara lainnya dan bias menjadi ancaman. Untuk menentukan suatu isu lingkungan merupakan ancaman bagi sebuah negara perlu ditampilkan data-data mengenai respon dari kelompok-kelompok kepentingan yang membentuk opini publik seperti partai politik, organisasi lingkungan, dan media massa. Melalui respon-respon yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana hal itu mempengaruhi opini publik dan juga kemungkinan pemerintah dalam melihat ancaman yang datang dari isu lingkungan akibat deforestasi hutan tropis hingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait hal itu.

Berdasarkan temuan penulis, kelompok-kelompok kepentingan di AS mempunyai andil besar dalam membentuk opini publik mengenai dampak perubahan iklim yang mengancam mereka dan hal itu mempengaruhi bagaimana pemerintah AS bertindak untuk penanganan dampak perubahan iklim untuk perlindungan wilayah dan warga negaranya. Tindakan pemerintah tersebut berupa kebijakan bagi dalam negeri AS sendiri dan/atau kebijakan yang dilakukan di luar negara yang dapat berupa bantuan luar negeri untuk mengatasi deforestasi di Indonesia.

## 2. *Economic interest*

Definisi konseptual menjelaskan mengenai salah satu kepentingan dari sebuah negara adalah tentang menstabilkan dan meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara dengan cara meningkatkan hubungan ekonomi negara tersebut dengan negara lain. Pada definisi operasional kepentingan ekonomi ini diartikan dalam bentuk usaha penyelamatan hutan tropis sekaligus menyelamatkan ekonomi. Hal tersebut berlaku juga bagi AS, walaupun tidak secara langsung terkena dampak hutan tropis namun AS merasa perlu ikut andil dalam penyelamatan hutan tropis dari deforestasi di Indonesia dengan memberikan bantuan dan melakukan kerjasama. Hal ini karena kepentingan ekonomi AS terhadap hutan tropis terdapat pada kegiatan perdagangan ekspor – impor dengan Indonesia yang fokus pada pengolahan hasil hutan yakni kayu lapis yang diekspor oleh Indonesia untuk pasar AS. Dengan tujuan perdagangan tersebut, secara tidak langsung dengan memberikan bantuan dalam program TFCA Kalimantan, AS menciptakan hubungan erat dengan Indonesia yang

dimaksudkan untuk memastikan akses berkelanjutan terhadap sumber daya bahan baku kayu lapis tersebut.

### 3. *World order interest*

Donald E. Nuechterlein menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara adalah juga tentang menjaga stabilitas politik dan sistem ekonomi internasional. Hal tersebut dilakukan agar negara tersebut merasa aman. Definisi operasional penulis melihat tindakan AS yang turut andil dalam sistem internasional yang membahas mengenai isu global yakni tentang perubahan iklim. Diplomasi pemerintahan Obama menjadikan AS ikut serta dalam upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Termasuk dengan Indonesia dalam bantuan program TFCA Kalimantan tahun 2011. Upaya AS tersebut termasuk dalam upaya AS memperbaiki citra di mata dunia internasional tentang negara yang peduli terhadap lingkungan global.

### 4. *Ideological interest*

Nuechterlein menjelaskan bahwa salah satu kepentingan nasional dari sebuah negara adalah melindungi nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat disuatu negara dan nilai-nilai tersebut dipercayai baik secara universal. Pada definisi operasional, mengeluarkan kebijakan dan membantu penanganan deforestasi hutan di Indonesia digunakan AS untuk menyebarkan nilai-nilai dan melindungi eksistensi ideologi AS di negara lain. Karena dalam memberikan bantuan tersebut, AS menerapkan persyaratan yang mencerminkan nilai dan ideologi AS yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah negara yang menerima dana TFCA harus negara demokrasi yang tidak mendukung jaringan terorisme internasional

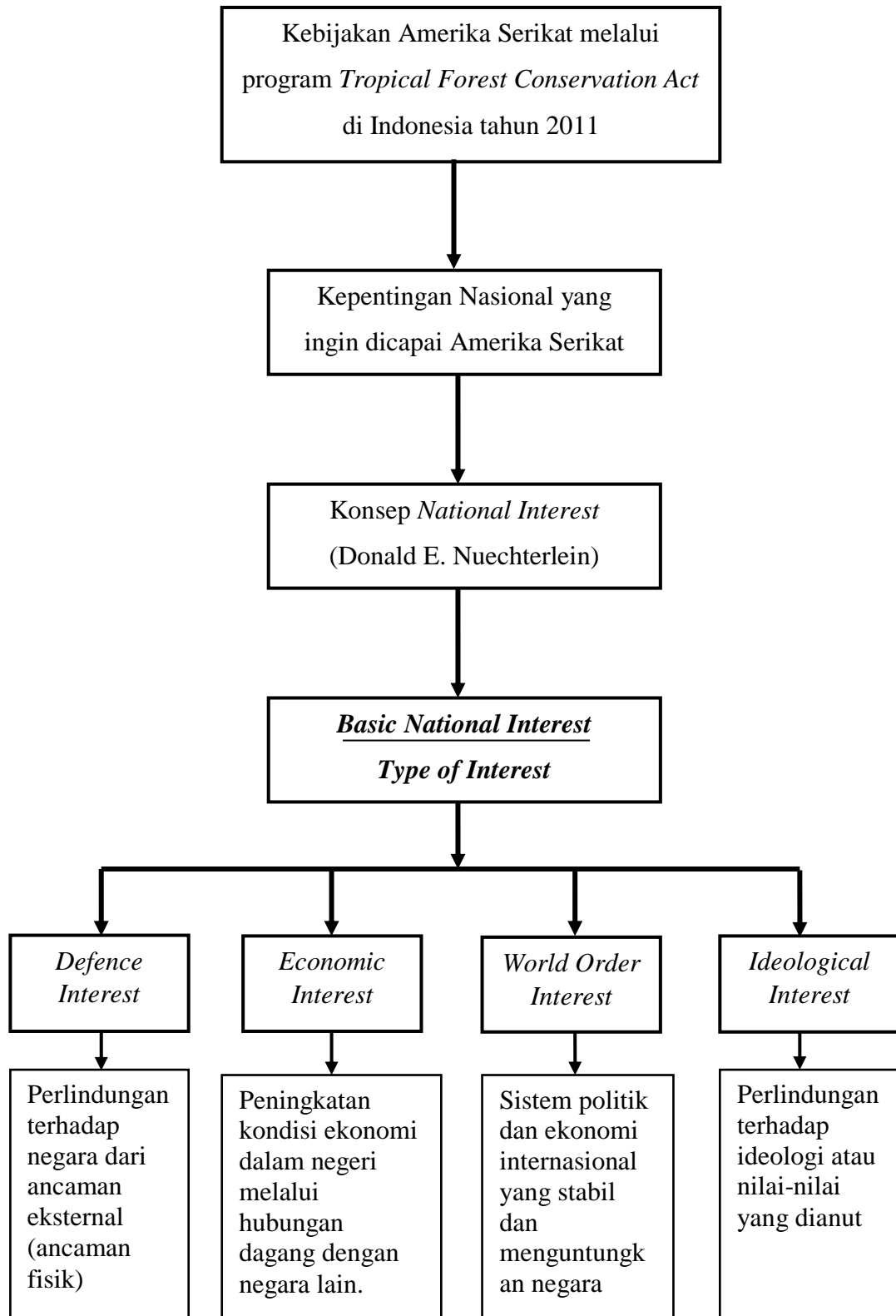
dan tidak terlibat dalam perdagangan narkoba serta tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak mendukung pelanggaran HAM di dalam dan luar negeri. Selain itu negara tersebut harusnya memiliki perjanjian *structural/sectoral adjustment programme loan* dari bank dunia.

**Tabel 2.2**

**Operasionalisasi Konsep *National Interest***

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Basic National Interest</i>	<i>Defense Interest</i>	Perlindungan terhadap negara dari ancaman eksternal (ancaman fisik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok kepentingan dalam negeri AS membentuk opini publik tentang isu perubahan iklim akibat deforestasi yang mengancam mereka.</li> <li>- Opini publik mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan melindungi negara dari ancaman deforestasi yang terjadi di negara tropis.</li> </ul>
	<i>Economic Interest</i>	Peningkatan kondisi ekonomi dalam negeri melalui hubungan dagang dengan negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neraca perdagangan dengan Indonesia</li> <li>- Hasil ekspor – impor hasil hutan berupa kayu lapis menjadi komoditas utama AS dengan Indonesia</li> <li>- Investasi langsung AS di Indonesia</li> </ul>
	<i>World order interest</i>	Sistem politik dan ekonomi internasional yang stabil dan menguntungkan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya mitigasi perubahan iklim AS di dunia Internasional termasuk Indonesia</li> <li>- Perbaikan citra dan penguasaan tatanan dunia</li> </ul>
	<i>Ideological interest</i>	Perlindungan terhadap ideologi atau nilai-nilai yang dianut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesamaan identitas</li> <li>- Sistem politik untuk mempengaruhi negara penerima bantuan</li> <li>- penyebaran nilai</li> </ul>

## 2.4 Alur Pemikiran



## 2.5 Argumen Utama

Terdapat dasar kepentingan nasional dibalik usaha yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengurangi tingkat emisi karbon dengan mengurangi laju deforestasi hutan tropis di Indonesia dengan memberikan bantuan dana melalui mekanisme pengalihan utang luar negeri Indonesia. Dasar kepentingan nasional tersebut terbagi dalam empat kategori yakni *defence interest* yang berarti AS mempunyai kepentingan pertahanan wilayah dari ancaman deforestasi, kepentingan yang kedua adalah *economic interest* yakni kepentingan melindungi perekonomian dan sumber daya ekspor-impor AS dari ancaman bencana lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain yaitu Indonesia, ketiga *world order interest* adalah AS berkepentingan menyeimbangkan tatanan dunia dengan mempertahankan kestabilan politik dan sistem ekonomi melalui kebijakan TFCA yang dikeluarkan oleh pemerintah AS dan kepentingan yang keempat *ideological interest* adalah kepentingan yang berkaitan dengan mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai ideologi negara melalui program kebijakan TFCA yang memberikan persyaratan sesuai nilai-nilai ideologi AS.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penulis akan menggunakan metode deskriptif – kualitatif yang akan menjelaskan kepentingan-kepentingan apa saja yang mendasari Amerika Serikat melakukan *Debt Swap* dengan Indonesia melalui program *Tropical Forest Conservation Act* tahun 2011.

#### **3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisa kepentingan Amerika Serikat. Data-data yang akan penulis jelaskan adalah mengenai kepentingan mendasar yang mempengaruhi Amerika Serikat menerapkan program *debt swap* di Indonesia sesuai dengan konsep yang digunakan. Data yang tidak termasuk dalam faktor, studi literatur, variabel, serta operasionalisasi konsep maka tidak digunakan sehingga menjadi batasan penelitian yang kemudian dapat dikerucutkan dan dipertajam. Kemudian untuk waktu penelitian penulis fokus pada tahun 2011 dimana perjanjian TFCA yang kedua disetujui kedua negara dan implementasinya di wilayah hutan Kalimantan.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan isu yang penulis bahas melalui sumber buku, dokumen, jurnal, artikel berita maupun surat kabar online untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan penulis.

### **3.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa data sekunder, dimana penulis memperoleh data tersebut melalui studi pustaka dengan cara pengkajian serta penelusuran studi literatur atau data kepustakaan melalui buku, dokumen, jurnal, serta berita dan surat kabar online.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu penulis akan memaparkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dielaborasi dengan konsep yang digunakan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis.

### **3.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I**

Bab ini berisikan bagian pendahuluan dimana didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **Bab II**

Bab ini merupakan bagian dimana terdapat penjelasan penggambaran fenomena yang diteliti sebagai fenomena penting. Pada bab ini, penulis menyampaikan konsep yang dipakai dalam penelitian dan terdapat sub bab studi terdahulu, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, dan argumen utama.

### Bab III

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan sistematika penulisan dalam menjelaskan serta menggambarkan sebuah fenomena. Dalam bab ini terdapat sub bab diantaranya yaitu: metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

### Bab IV

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum mengenai *debt for nature swap*, program *Tropical Forest Conservation Act* dan hubungan Amerika Serikat – Indonesia.

### Bab V

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang pembahasan serta analisa mengenai faktor-faktor yang mendasari kepentingan Amerika Serikat dalam program TFCA di Indonesia pada tahun 2011.

### Bab VI

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi mengenai ringkasan penulisan, kesimpulan penelitian, serta pengujian mengenai tepat atau tidaknya hipotesis yang dikeluarkan oleh penulis.

Selanjutnya bab ini juga memuat saran bagi para peneliti Hubungan Internasional pada bidang yang sama yang kemudian dapat mengembangkan atau meneruskan apa yang telah diteliti penulis. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ditemui penulis selama penelitian.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Pada bab gambaran umum ini penulis akan menjelaskan mengenai program TFCA, penulis akan menjelaskan mengenai sedikit sejarah tentang TFCA dengan mekanisme *Debt for Nature Swap* (DNS) hingga program TFCA yang dilakukan di Kalimantan, Indonesia pada tahun 2011. Setelah itu penjelasan akan masuk pada hubungan kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang menjadi cikal bakal kerjasama pada bidang lingkungan yang kemudian merujuk pada kerjasama dalam program *Tropical Forest Conservation Act*.

#### ***4.1 Debt for Nature Swap***

*Debt for nature swap* adalah sumber utama pendanaan konservasi alam internasional.<sup>1</sup> DNS telah disebut sebagai *win-win solution* untuk masalah bagaimana membiayai konservasi di negara berkembang. Mekanisme ini muncul pada tahun 1980-an sebagai gagasan dari Thomas Lovejoy (1984) dan dianggap sebagai alat inovatif untuk secara bersamaan mengatasi masalah utang dan deforestasi hutan di negara-negara yang dibebani utang.<sup>2</sup> DNS telah menyediakan mekanisme untuk konservasi alam dengan memanfaatkan atau membatalkan sebagian dari utang negara berkembang untuk negara kreditur. Dalam pertukaran untuk penghapusan utang, pemerintah negara berkembang menyediakan dana perwalian dalam mata uang lokal untuk kegiatan konservasi di negara tersebut.

---

<sup>1</sup> Kilbani, Gockel C., & L.C. Gray.2011. Debt-for-nature swaps in action: two action studies in Peru. *Ecology and Society* 16(3): 13. Tersedia online <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04063-160313>

<sup>2</sup> Ibid

Amerika Serikat merupakan negara kreditor yang paling banyak memberikan pengurangan utang dengan menggunakan skema *debt-for-nature swap* (DNS). Melalui mekanisme *debt-for-nature swap* ini, AS telah dua kali menggunakan skema penghapusan utang bagi negara-negara berkembang. Pertama melalui *Enterprise for the Americas Initiative* (EAI) pada tahun 1991 yang khusus ditujukan untuk negara-negara Amerika Latin dan yang kedua melalui *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) / Undang-undang Konservasi Hutan Tropis pada tahun 1998 yang diberlakukan lebih luas.<sup>3</sup> Hal tersebut karena diakui bahwa hutan tropis sangat berharga untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi karbon dioksida di atmosfer, dan mengatur siklus hidrologi, maka Kongres AS berusaha untuk memperluas otoritasi EAI ke negara-negara di seluruh dunia dengan hutan tropis. Hasilnya adalah Undang-undang Konservasi Hutan Tropis tahun 1998 yang dibentuk untuk menghasilkan dana guna melestarikan hutan tropis dengan mengurangi utang luar negeri di negara-negara dengan hutan tersebut dengan menggunakan mata uang lokal.<sup>4</sup>

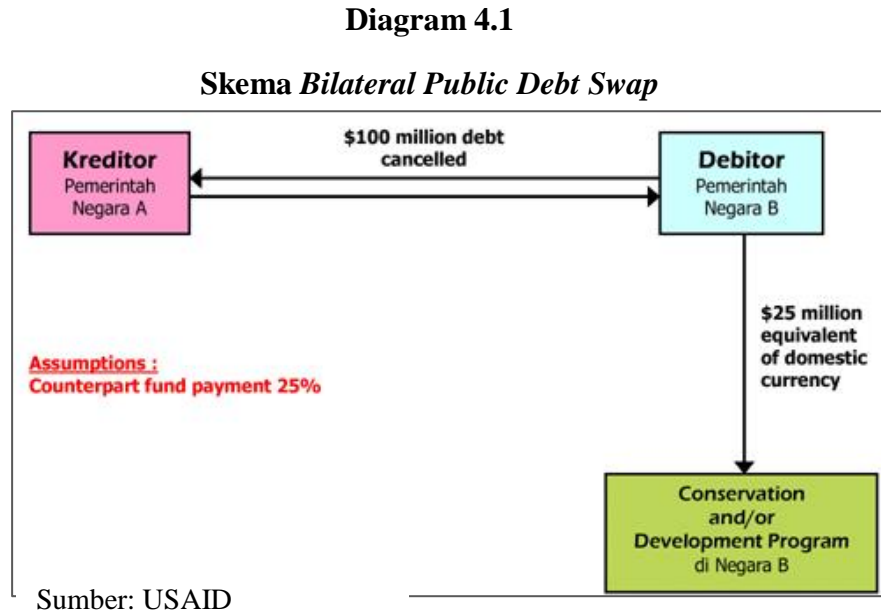
Secara sederhana DNS memiliki dua skema yaitu *bilateral public debt swap* dan *three party public debt swap*. Dalam skema *bilateral public debt swap* dijelaskan, negara kreditor akan membatalkan utang negara debitor jika negara debitor menyisihkan dana untuk tujuan yang telah disepakati bersama. Penyisihan tersebut dianggap sebagai pembayaran atau pelunasan utang. Jumlah dana yang disisihkan itu dinyatakan dalam kurs mata uang lokal dan mempresentasikan nilai potongan/diskon utang yang besarannya dinegosiasikan antar negara. Dalam kasus

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

tertentu, bisa saja skema ini tidak memberikan potongan/diskon utang sama sekali. Berikut ini adalah gambar skema *bilateral public debt swap*:



Dalam skema *bilateral public debt swap* ini beberapa negara kreditor melakukan *swap* dengan melakukan konversi atas utang bantuan luar negerinya (*Official Development Assistance*) atau kadang dengan membeli kembali (*buy back option*) kredit jaminan ekspor atau utang komersial lainnya. Negosiasi antara kedua negara membutuhkan keterlibatan lembaga-lembaga pemerintah dua negara dan tak jarang juga membutuhkan partisipasi dari lembaga konservasi, baik sebagai donor maupun implementor.<sup>5</sup>

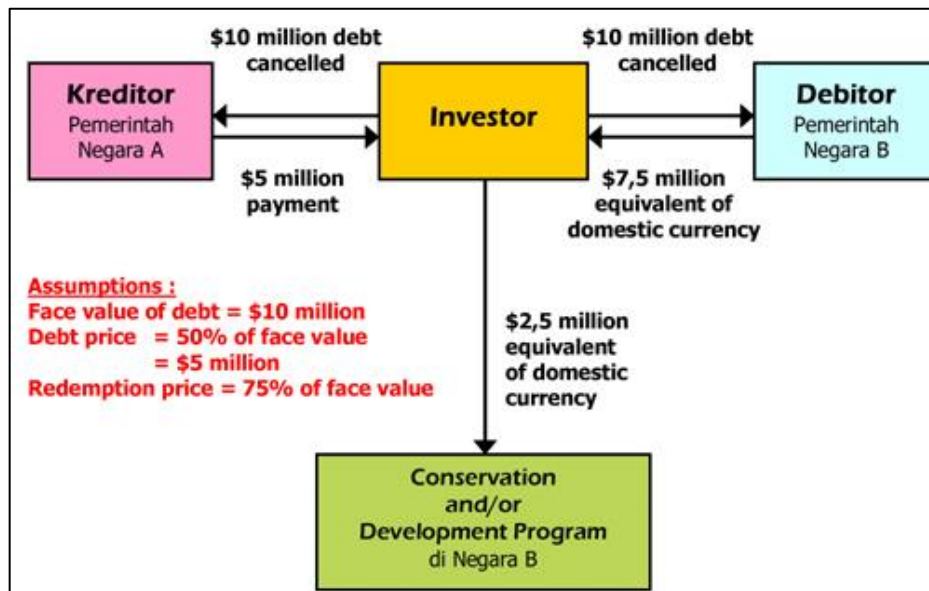
Sedangkan untuk skema *three party public debt swap* sesuai dengan namanya melibatkan pihak ketiga dalam pembelian *non-concessional bilateral debt* dari lembaga penjamin kredit di negara kreditor. Pihak ketiga ini disebut sebagai

<sup>5</sup> USAID.1998. *Assessment of The Feasibility of Debt-for-Nature Swaps in Indonesia*. Indonesian Natural Resources Management/EPIQ Program.

investor.<sup>6</sup> Di bawah ini adalah gambar yang menggambarkan tentang skema penghapusan utang yang digunakan untuk kegiatan konservasi lingkungan.

**Diagram 4.2**

**Skema Three Party Public Debt Swap**



Sumber: USAID

Gambar 4.2 di atas menjelaskan mengenai mekanisme pemberian penghapusan utang bagi negara yang membutuhkan bantuan dana untuk program konservasi hutan. Diilustrasikan dengan negara A sebagai negara kreditor (yang memberi utang), negara B adalah debitur (yang mempunyai utang terhadap negara A) dan terhadap investo diantara keduanya. Langkah pertama skema dalam gambar 4.2 tersebut adalah pihak ketiga atau investor bernegosiasi untuk pembelian utang dengan potongan/diskon jumlah tertentu atau bahkan mengusulkan donasi atas utang tersebut ke negara A. Pada saat yang sama, investor juga melakukan negosiasi kepada negara B untuk melakukan konversi atas utangnya menjadi komitmen

<sup>6</sup> Ibid



dukungan pendanaan bagi program pelestarian lingkungan. Pelaksanaan program akan dilakukan dalam kurs mata uang lokal dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal penerima manfaat langsung dari program tersebut.

#### **4.2 Program *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA)**

*Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) merupakan program yang diciptakan oleh AS untuk menangani tekanan ekonomi dengan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengizinkan negara-negara yang berhak terlibat dalam pertukaran utang, membeli kembali atau mengurangi/merestrukturisasi dengan imbalan melindungi hutan tropis yang terancam deforestasi secara berkelanjutan.<sup>7</sup> Selain konservasi dan penghapusan utang, TFCA dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat sipil setempat dengan menciptakan yayasan lokal untuk mendukung hibah kecil kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dan masyarakat lokal.<sup>8</sup>

TFCA dilaksanakan melalui kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang memenuhi syarat.<sup>9</sup> Negara berkembang harus mengandung setidaknya satu hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang unik, atau saluran hutan tropis yang mewakili hutan tropis yang lebih besar pada skala global, benua atau regional. Kriteria politik yang harus dipenuhi yakni memiliki pemerintahan yang demokratis, telah bekerjasama dengan AS tentang pengendalian obat terlarang, tidak mendukung terorisme dan tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional. Sedangkan untuk kriteria persyaratan ekonomi yakni harus memiliki program dana

---

<sup>7</sup> USAID.2014. Financing Forest Conservation: An Overview of The Tropical Forest Conservation Act. Dalam <http://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA> pada 23 Desember 2017

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> USAID.2017. *TFCA Eligibility Requirements*. Tersedia online <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/eligibility-requirements> diakses pada 25 Mei 2017

IMF, memiliki pinjaman struktural dari Bank Dunia atau IDA (*International Bank for Reconstruction Development*), dan atau telah melakukan reformasi investasi.<sup>10</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam TFCA menggunakan mekanisme *debt for nature swap* yang ditujukan untuk negara-negara berkembang pemilik hutan tropis sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hingga Juli 2013, pemerintah AS telah mengeluarkan dana sebesar US\$ 223 juta pada 18 perjanjian TFCA di 14 negara, sehingga menghasilkan US\$ 326 juta dalam mata uang lokal untuk proyek-proyek konservasi hutan tropis.<sup>11</sup> Dalam tabel 4.1 dibawah ini tercantum daftar negara-negara yang menerima bantuan penghapusan utang dibawah program TFCA AS.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Negara Penerima Program TFCA**

No	Negara dengan Program TFCA	Tahun perjanjian	Jumlah Penghapusan Utang
1	Bangladesh	Juli 2003	US\$ 8.5 juta
2	Belize	Agustus 2001	US\$ 5.5 juta
3	Botswana	Oktober 2006	US\$ 7 juta
4	Brazil	Agustus 2010	US\$ 21 juta
5	Colombia	April 2004	US\$ 10 juta
6	Costa Rica	September 2007	US\$ 26 juta
		Oktober 2010	US\$ 27 juta
7	El Savador	Juli 2001	US\$ 14 juta
8	Guatemala	September 2006	US\$ 24 juta
9	Indonesia	Juni 2009	US\$ 30 juta
		September 2011	US\$ 28.5 juta
10	Jamaica	September 2004	US\$ 16 juta
11	Panama	Juli 2003	US\$ 10 juta
		Agustus 2004	US\$ 11 juta

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> USAID. 2014. *Countries with TFCA Programs*. Dalam <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country>. Diakses pada 23 Maret 2017

12	Paraguay	Juni 2006	US\$ 7.4 juta
13	Peru	Juni 2002	US\$ 5.5 juta
		September 2008	US\$ 25 juta
14	Filipina	September 2002	US\$ 8 juta

Sumber: hasil olahan penulis dari

<https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country>

#### 4.3 Kerjasama Bilateral Lingkungan Amerika Serikat – Indonesia

Fokus kebijakan dan bantuan luar negeri AS di Indonesia mulai berubah dan berkembang semenjak Presiden Barrack Obama menjabat. Selain itu juga karena isu global yang mulai bertambah, tidak hanya pada isu keamanan tradisional tapi juga pada isu keamanan modern yang mencakup keamanan pangan, lingkungan dan sosial. Hal ini mengingat negara AS adalah negara industri sehingga dengan jelas dapat dikatakan sebagai salah satu negara dengan produksi emisi gas karbon tertinggi di dunia sehingga AS memiliki tanggung jawab dalam isu pemanasan global. Dalam permasalahan ini menjaga kelestarian hutan menjadi hal penting dalam penyerapan emisi karbon dunia.

Kerangka kerjasama lingkungan AS dengan Indonesia telah tercantum dalam *Comprehensive Partnership* yang telah disepakati dua negara yang menjadi alat peningkatan hubungan bilateral. Kerjasama lingkungan ini mencakup empat area fokus yakni perubahan iklim; hutan, lahan gambut, dan habitat terrestrial lainnya; sumber daya pesisir dan laut dan keanekaragaman hayati; dan pengelolaan lingkungan.<sup>12</sup> Kerjasama iklim dan lingkungan tersebut termasuk juga pada

---

<sup>12</sup> Ibid

pembentukan Pusat Perubahan Iklim, Perjanjian “*Green Prosperity*” MCC dan juga kesepakatan *Tropical Forest Conservation Act*.

Indonesia dianggap penting oleh AS dalam bidang lingkungan karena Indonesia dianggap sebagai “*environmental superpower*” disebabkan lokasinya yang terletak di pusat segitiga terumbu karang, memiliki hamparan hutan tropis dan lahan gambut terbesar di Asia, dan dengan keanakeragaman hayati dan spesies endemik yang tinggi.<sup>13</sup> Terlepas dari bahaya lingkungan yang terus berlanjut akibat deforestasi dan kepunahan spesies ikan dan hewan yang dihadapi Indonesia, negara ini mengambil langkah kuat dalam kepemimpinan lingkungan dengan memberantas pembalakan liar, memulai inisiatif terumbu karang, berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengubah kepemilikan lahan untuk masyarakat adat dan lokal.<sup>14</sup>

Langkah Indonesia untuk penyelamatan lingkungan dan iklim mendapatkan dukungan dari AS yang diwakili oleh USAID sebagai lembaga pengelola bantuan luar negeri milik pemerintah AS sendiri. Program Lingkungan dan Perubahan Iklim USAID dimulai pada tahun 2009 dan berlanjut hingga tahun 2014 yang disebut “*strategic plan*” dengan tujuan untuk menangani prioritas global melalui cara lokal. Program lingkungan dan perubahan iklim yang dikelola USAID di Indonesia tersebut berfokus pada hutan, kelautan, air/sanitasi, energi bersih dan adaptasi bencana.<sup>15</sup> Baik pemerintah AS dan Indonesia, menargetkan kerjasama bilateral untuk pengurangan deforestasi dan degradasi ekosistem sebesar 26%, pengurangan

---

<sup>13</sup> USINDO. 2012. *Meeting Environment and Climate Change Challenges in Indonesia: U.S. – Indonesia Cooperation under the Comprehensive Partnership*. Tersedia online pdf [http://www.usindo.org/wp-content/uploads/2013/04/Open\\_Forum\\_Brief\\_Environment\\_Climate-Change\\_7.27.12.pdf](http://www.usindo.org/wp-content/uploads/2013/04/Open_Forum_Brief_Environment_Climate-Change_7.27.12.pdf)

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> USAID. 2010. *A Partnership for Prosperity USAID Strategy Indonesia 2009-2014*. Online <https://www.ircwash.org/sites/default/files/USAID-2010-Partnership.pdf>

emisi dari penggunaan lahan yang telah berubah sebesar 50% dan pengelolaan hutan tropis bernilai tinggi secara lebih baik.<sup>16</sup> Perlu diketahui bahwa program tersebut tidak hanya untuk melindungi lingkungan namun juga melayani masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berikut ini adalah data beberapa program bantuan lingkungan yang diberikan AS melalui USAID di Indonesia:

**Tabel 4.2**  
**Program Bantuan Lingkungan AS melalui USAID di Indonesia**  
**2009 - 2013**

No	Tahun	Program Bantuan	Keterangan
1	2009	<b>TFCA – Sumatera</b> <i>Tropical Forest Conservation Act Agreement</i>	Kesepakatan kerjasama pemerintah AS dan pemerintah Indonesia untuk penanganan deforestasi hutan tropis Sumatera dengan mekanisme <i>debt-for-nature swap</i>
2	2009	<b>NOAA</b> <i>The National Oceanic and Atmospheric Administration</i>	Bantuan penanganan dan perlindungan ekosistem laut
3	2010	<b>IMACS</b> <i>Indonesia Marine and Climate Support</i>	Proyek kerjasama USAID dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kegiatan promosi pemanfaatan ikan dan sumber daya laut lainnya
4	2011	<b>TFCA – Kalimantan</b> <i>Tropical Forest Conservation Act – Kalimantan</i>	Kesepakatan kerjasama pemerintah AS dan pemerintah Indonesia untuk penanganan deforestasi hutan tropis Kalimantan dengan mekanisme <i>debt-for-nature swap</i>

<sup>16</sup> Ibid

5	2011	<b>IFACS</b> <i>Indonesia Forest and Climate Support</i>	Program pembangunan yang fokus upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui manajemen hutan yang berkelanjutan dan pembangunan rendah emisi.
6	2013	<b>MCC - Green Prosperity</b> <i>(Millenium Challenge Corporation)</i>	Program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan, lahan gambut dan sumber daya alam lainnya serta penyebaran energi yang dapat diperbaharui.

Sumber: hasil olahan penulis dari USAID

Tabel 4.2 di atas menunjukkan program bantuan AS di Indonesia. AS melalui USAID, membantu proyek-proyek di atas agar Indonesia dapat menghadapi isu perubahan iklim. Bantuan luar negeri USAID di bidang mitigasi lingkungan hidup mencakup sektor darat dan laut. Dengan proyek-proyek mitigasi perubahan iklim yang dilakukan kedua negara menunjukkan bahwa AS mempunyai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia setidaknya sejak tahun 2009.

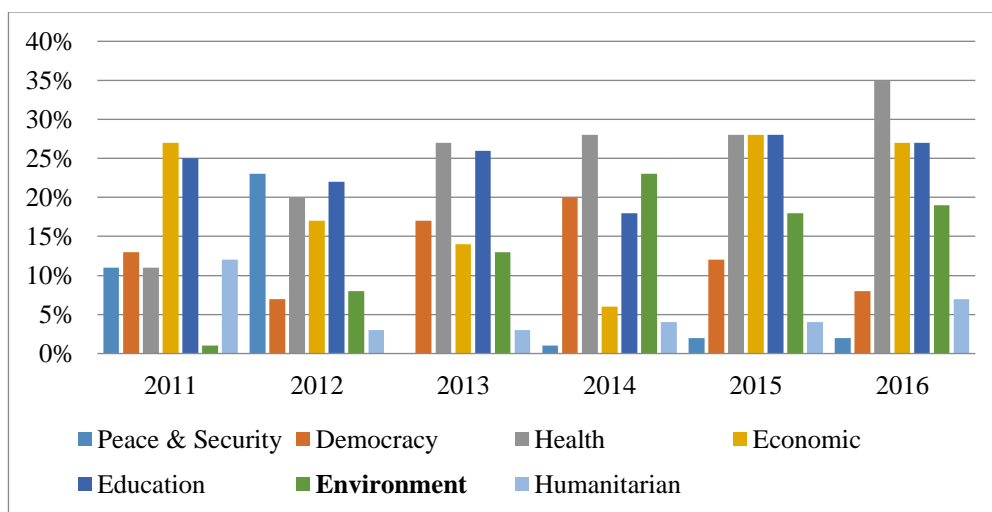
Melalui dukungan program lingkungan dan perubahan iklim, AS memberikan bantuan dana sebesar US\$ 450 juta yang dibagi kedalam beberapa pos kerjasama setiap aspek lingkungan.<sup>17</sup> TFCA sendiri mendapatkan dana sebesar US\$ 28.5 juta untuk pengelolaan di TFCA Kalimantan yang dilakukan dalam rentang

<sup>17</sup> Eco-Business.2011. *US to Provide US\$450 million for environmental cooperation*. Tersedia online <http://www.eco-business.com/news/us-to-provide-us450-million-for-environmental-cooperation-with-indonesia/> diakses pada 28 Desember 2017

waktu 2011 – 2019.<sup>18</sup> Dibawah ini adalah diagram yang menunjukkan presentase bantuan AS di Indonesia yang penulis ambil datanya pada tahun 2011 hingga tahun 2016 karena pada periode ini, sektor lingkungan mendapat porsi bantuan dan pada periode tahun tersebut juga bantuan dana TFCA disalurkan.

**Diagram 4.3**

**Persentase Bantuan AS di Indonesia tahun 2011 – 2016**



Sumber: *Foreign Assistance*

Diagram 4.1 diatas menunjukkan persentase bantuan yang dikeluarkan oleh AS terhadap Indonesia dalam beberapa sektor dan masing-masing sektor memiliki persentase dari tahun ke tahun yang beragam. Namun pada penelitian ini penulis fokus pada sektor *environment*/lingkungan (diagram batang urutan ke-6 dari kiri) karena TFCA termasuk dalam program bantuan sektor lingkungan. Pada tahun 2011 persentase sektor lingkungan masih berada pada angka kurang dari 2%. Sementara itu ditahun berikutnya persentase bantuan lingkungan AS meningkat

<sup>18</sup> Penabullu Alliance.2014. *Panduan Pengelolaan Program Konservasi berbasis Pendekatan Ekosistem*. Online pdf <http://penabullualliance.org/wp-content/uploads/Panduan-Pengelolaan-Program-Konservasi-Berbasis-Pendekatan-Ekosistem.pdf>

jauh dari tahun 2011. Hal tersebut dikarenakan penyaluran hibah TFCA Kalimantan siklus 1 baru dilaksanakan pada tahun 2012 senilai 28.5 juta AS atau setara dengan Rp. 40 miliar.<sup>19</sup>

#### **4.4 Kerjasama AS – Indonesia dalam TFCA (*Tropical Forest Conservation Act*)**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia dengan potensi dari kekayaan alamnya serta keanekaragaman hayati menjadi hal penting yang mendorong negara AS untuk menetapkan keputusan untuk memberikan bantuan luar negerinya di Indonesia dalam rangka kegiatan konservasi alam. Bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme “*debt swap*” dimana dalam hal ini AS mengalihkan utang luar negeri Indonesia untuk kegiatan konservasi alam, dan nama program ini adalah *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) dan berada di bawah pengawasan USAID.<sup>20</sup>

Di Indonesia, TFCA terjadi sebanyak dua kali. Pertama kali di tandatangani pada tahun 2009 yang fokus implementasinya berada di wilayah Sumatera. Dimana pada TFCA yang pertama tersebut akan mengurangi pembayaran utang pemerintah Indonesia ke Pemerintah AS senilai hampir US\$ 30 juta selama delapan tahun kedepan.<sup>21</sup> Sebagai gantinya Pemerintah Indonesia berkomitmen mengalihkan angsuran pembayaran sisa utangnya ke rekening sebuah “*Trust Fund*” (Dana

---

<sup>19</sup> Heart of Borneo Initiative. 2013. *Penyaluran Hibah TFCA untuk Konservasi Hutan di Kalimantan*. Artikel online tersedia <http://heartofborneo.or.id/id/news/detail/128/penyaluran-hibah-tfca-untuk-konservasi-hutan-di-kalimantan>

<sup>20</sup> USAID. 2014. Countries with TFCA Programs. Dalam <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country>. Diakses 23 Desember 2017

<sup>21</sup> Ibid



Perwalian) yang bernilai sama yang kemudian menjadi dana hibah (*grants*) untuk digunakan sebagai dana konservasi hutan Sumatera.

TFCA di Indonesia yang kedua adalah kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia (GOI) yang bermitra dengan *The Nature Conservancy* (TNC) dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) yang fokus pada konservasi hutan di wilayah Kalimantan. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi lingkungan non pemerintah tersebut digunakan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang penting secara global, menjaga karbon hutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat dengan cara yang konsisten dengan upaya konservasi hutan itu sendiri di Kalimantan, sehingga selanjutnya program kerjasama ini disebut TFCA Kalimantan.<sup>22</sup>

Sebagai proyek yang memiliki tujuan dalam penanganan masalah lingkungan, program TFCA yang ada di Indonesia memiliki tiga jenis pemanfaatan fasilitas debt swap yang dapat dilakukan dengan tiga opsi yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Debt reduction/loan restructuring*. Dengan opsi ini, pembayaran bunga dan/ pokok utang yang dilakukan dalam mata uang lokal dialihkan pada dana hutan tropis lokal yang baru (*new local tropical forest fund*). Pembayaran utang ini tetap dilakukan di dalam negara yang berutang. Pembentukan dewan lokal diperlukan untuk mengelola pembayaran dana utang tersebut dan akan memberikan hibah kepada penerima yang

---

<sup>22</sup> TFCA Kalimantan.2012. Rencana Implementasi 2013 – 2017. Tersedia online <http://www.tfcakalimantan.org/>

<sup>23</sup> USAID.2017. *Debt Treatment Options under TFCA*. Tersedia online <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/debt-treatment-options> diakses pada 15 Desember 2017

berhak untuk mengelola, terutama NGO lokal seperti kelompok lingkungan, kehutanan dan kelompok masyarakat adat. Dalam keadaan yang luar biasa kemungkinan pemerintah daerah juga menerima hibah tersebut. Dewan lokal yang dimaksud terdiri dari perwakilan pemerintah AS dan negara tuan rumah, serta perwakilan dari LSM yang disetujui oleh pemerintah. Opsi penataan pengurangan pinjaman dilaksanakan melalui dua perjanjian hukum yang dinegosiasikan antara Pemerintah AS dengan negara tujuan yakni (1) perjanjian pengurangan utang (*debt reduction agreement*) dan (2) Persetujuan Hutan tropis (*tropical forest agreement*) untuk menetapkan dana dan dewan hutan tropis. Pada Juli 2013, delapan kesepakatan pengurangan utang TFCA diakhiri dengan melibatkan tujuh negara, diantaranya Bangladesh pada tahun 2000, Botswana tahun 2006, Brazil tahun 2010, El Salvador tahun 2001, Paraguay tahun 2006, Peru di 2008 dan Filipina di tahun 2002 dan 2003.

- b. *Debt-for-Nature Swap*. Pada opsi ini, pemerintah AS maupun NGO menyumbangkan sejumlah uang untuk mengurangi atau membatalkan sebagian utang negara yang memenuhi syarat. Biasanya, dana yang disumbangkan oleh NGO sama dengan sekitar 20% dari jumlah yang disumbangkan oleh pemerintah AS. Pembayaran utang dilakukan dalam mata uang lokal untuk kegiatan konservasi yang disetujui oleh negara tujuan, pemerintah AS dan NGO yang bersangkutan. Kegiatan semacam ini bisa termasuk dalam program hibah. Mereka juga dapat mencakup kegiatan konservasi tertentu, seperti menciptakan atau

mengelola kawasan lindung tertentu, mengembangkan program pelatihan dan menciptakan dana abadi untuk pengelolaan taman nasional dari waktu ke waktu. Dibentuk komite pengawasan lokal yang digunakan untuk mengelola kegiatan tersebut. Pemerintah, NGO, LSM lokal yang disetujui pemerintah dan negara donor berperan sebagai komite. Dan LSM merupakan mayoritas komite pengawasan di semua perjanjian debt-swap yang ada. Opsi *debt-for-nature swap* ini dilakukan melalui tiga kesepakatan hukum yakni

- (1) Kesepakatan pengurangan utang (*debt reduction agreement*) antara pemerintah AS dan negara penerima,
- (2) Perjanjian swap (*swap fee agreement*) antara pemerintah AS dengan NGO yang mentransfer dana secara pribadi ke pemerintah AS,
- (3) Kesepakatan konservasi hutan (*forest conservation agreement*) antara negara penerima dan NGO donor yang menguraikan bagaimana dana tersebut akan digunakan dengan membentuk komite pengawasan dan modalitas operasinya.

Hingga Juli 2013, telah ada 11 (sebelas) perjanjian debt-swap TFCA di delapan negara diantaranya, tahun 2001 di Belize, Colombia di tahun 2004, Costa Rica di tahun 2007 dan 2010, Guatemala tahun 2006, Indonesia di tahun 2009 dan 2011, Jamaica tahun 2004, Panama tahun 2003 dan 2004, serta Peru di tahun 2002.

- c. *Debt Buyback*. opsi ini memperbolehkan sebuah negara membeli utang dalam dolar AS dan mendapatkan diskon untuk satu atau lebih pinjaman yang layak sebagai imbalan atas komitmen TFCA dengan

mata uang lokal. Mekanisme dibuat serupa dengan mekanisme restrukturisasi utang. Namun hingga saat ini, pilihan mekanisme debt buyback belum digunakan dalam TFCA karena pembelian kembali utang setelah diskon tidak menarik dan jumlahnya dianggap terlalu besar bagi negara-negara yang memenuhi syarat.

#### **4.4.1 TFCA Sumatera**

Kesepakatan program TFCA Sumatera atau disebut dengan TFCA tahap 1 di Indonesia, Pemerintah AS dan Indonesia untuk pertamakalinya menandatangani sebuah kesepakatan pengalihan utang untuk konservasi alam (*debt-for-nature*) dibawah undang-undang Konservasi Hutan Tropis yang akan mengurangi utang Indonesia pada AS sebesar hampir US\$ 30 juta untuk jangka waktu delapan tahun pada 30 Juni 2009.<sup>24</sup> Selanjutnya pemerintah Indonesia akan mengalokasikan dana ini untuk mendukung hibah dalam rangka melindungi dan mengembalikan hutan tropis di Indonesia. Kesepakatan ini, yang dilakukan atas kerjasama dengan Conservation Internasional dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), menjadi yang pertama di Indonesia. Alasan AS memilih Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi mitra penerima *debt-for-nature swap* (DNS) ini karena kekayaan hutan alam serta potensinya sebagai penyerap emisi karbon dunia sehingga hutan Indonesia menjadi bagian dari paru-paru dunia.

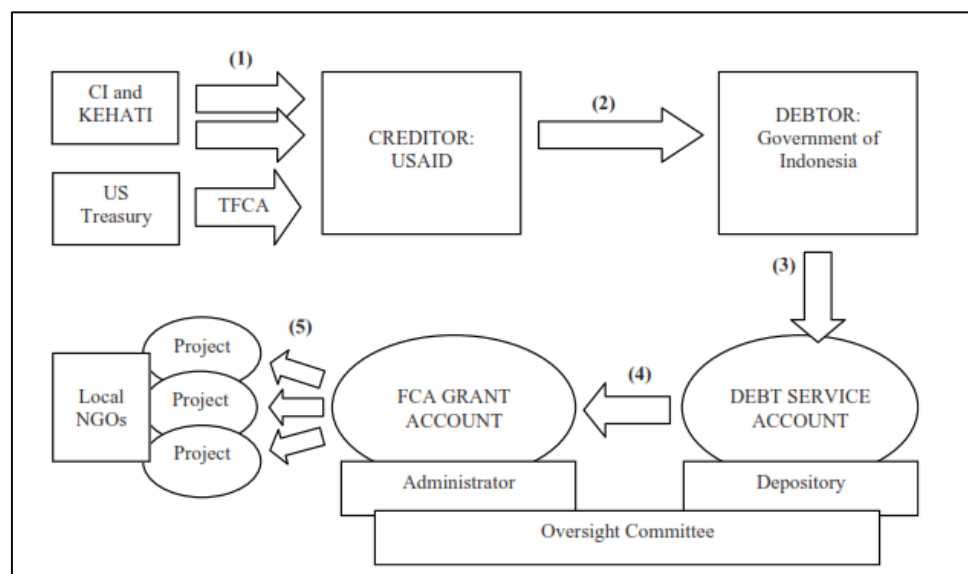
Di dalam kesepakatan TFCA Sumatera, pemerintah AS setuju untuk membatalkan enam klaim utang (semua pinjaman bantuan luar negeri dari tahun

---

<sup>24</sup> USAID. 2014. *Countries with TFCA Programs*. Dalam <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country> Diakses pada 23 Maret 2017

1974 sampai dengan tahun 1976) yang dimiliki oleh Indonesia terhadap USAID.<sup>25</sup> Pembayaran utang pokok dan bunga sebesar US\$ 29.921.500,22 telah dialihkan atas komitmen untuk mencairkan angsuran dengan jumlah yang sama ke dalam rekening utang dengan bank HSBC di Singapura. Melalui TFCA, USAID menerima US\$ 20 juta dari Departemen Keuangan AS, dan masing-masing US\$ 1 juta dari *Conservation International* dan KEHATI atas biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan pemerintah Indonesia dari kewajiban membayar utangnya. Total US\$ 22 juta mencerminkan resiko default yang disesuaikan dengan nilai sekarang dari pembayaran pinjaman sebelum operasi swap dilakukan. Di bawah ini adalah diagram yang menggambarkan skema penyaluran dana TFCA Sumatera :

**Diagram 4.4**  
**Skema Debt for Nature Swap TFCA Sumatera**



Sumber: Danny Cassimon – *The Pitfall and potential of debt-for-nature swaps*

<sup>25</sup> Cassimon, Danny, Martin Prowse, Dennis Essers.2010.*The Pitfall and Potential of Debt-for-Nature Swaps: A US – Indonesia Case Study*. Belgia: University of Antwerp, Institute of Development Policy and Management. Global Environment Change 21 hlm. 93 – 102.

Sesuai dengan intruksi dari komite pengawas, penyimpanan Rekening Utang (*Debt Service Account*), bank HSBC yang berada di Singapura akan melakukan pembayaran transfer berkala (dalam mata uang \$) ke Rekening Hibah Konservasi Hutan (*Forest Conservation Agreement/FCA*). Sebagai tanggapan atas seruan untuk mengajukan proposal, administrator, KEHATI, kemudian mengucurkan hibah kepada LSM lingkungan yang memenuhi syarat yang beroperasi di kawasan hutan tropis Sumatera setelah proposal disetujui oleh komite pengawas yakni pemerintah AS dan pemerintah Indonesia.

#### **4.4.2 TFCA Kalimantan**

TFCA Kalimantan (TFCA tahap II) resmi disahkan pada 29 September 2011 oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia.<sup>26</sup> Dalam kesepakatan perjanjian, tujuan TFCA Kalimantan diarahkan pada upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan yang memiliki nilai penting, spesies, dan ekosistem yang langka dan terancam penuh, jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim pada tingkatan global, nasional dan lokal.

TFCA Kalimantan dilakukan dalam rentang waktu 2011-2019 dengan jumlah pendanaan sebesar USD 28,5 juta.<sup>27</sup> Dilakukan dengan skema hibah kepada lembaga yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Berikut ini

---

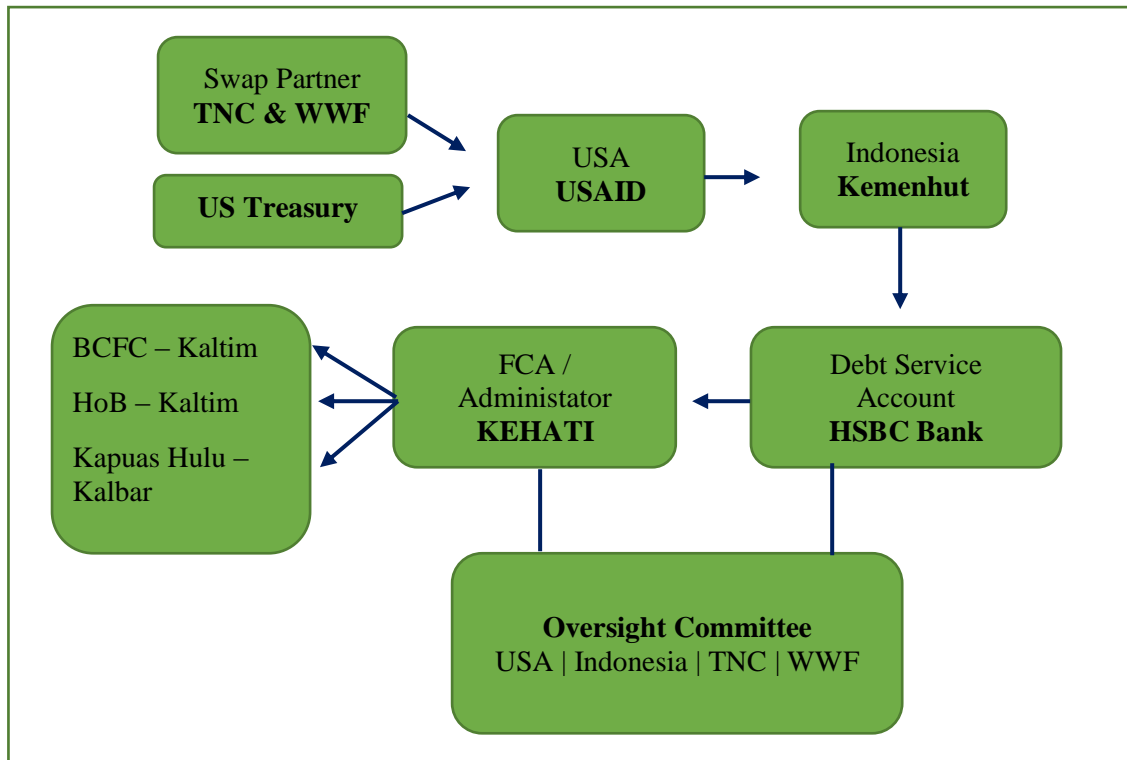
<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Shiddieqy, M. Ikhsan. 2011. Utang RI ke AS 28,5 juta Dolar dialihkan ke Hutan. Jakarta: Republika.co.id tersedia online <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/11/09/29/ls9vik-utang-ri-k>

adalah gambaran skema penyaluran dana hibah di bawah program TFCA Kalimantan.

**Diagram 4.5**

**Skema Debt for Nature Swap TFCA Kalimantan**



Sumber: Hasil Olahan Penulis dari berbagai sumber

Di bawah TFCA, *US Treasury* (Departemen Keuangan) menyumbang sebesar US\$ 19,8 juta kepada USAID, selain itu terdapat dana dari *swap partner* yakni TNC dan WWF yang masing-masing membayar biaya *swap* sebesar US\$ 1,98 juta ke USAID.<sup>28</sup> Setelah dana diterima oleh USAID, pemerintah AS membatalkan sisa utang luar negeri Indonesia kepada AS dengan nilai nominal US\$ 28,5 juta yang dibayarkan pemerintah Indonesia ke USAID melalui *Debt Service*

<sup>28</sup> Department of State United States of America. 2014. *Agreement between the United State of America and Indonesia*. Treaties and other International Acts Series 14-929, Finance Debt-for-Nature Swap.

*Account* yang diwakilkan kepada Bank HSBC di Singapura.<sup>29</sup> Selanjutnya penyaluran dana tersebut digunakan untuk konservasi dan upaya penyelamatan lingkungan yang difasilitasi oleh KEHATI sebagai administrator dalam TFCA yang ada di Indonesia termasuk TFCA Kalimantan ini. KEHATI melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi program untuk implementasi yang di fokuskan pada tiga kabupaten sasaran.<sup>30</sup> Seluruh kegiatan terkait pelaksanaan program dan penyaluran dana serta penggunaan dana yang ada diawasi oleh *Oversight Committee* (OC) yang terdiri dari empat lembaga yakni pemerintah AS, pemerintah Indonesia, TNC dan juga WWF Indonesia.<sup>31</sup>

TFCA tahap II di Kalimantan ini menjadi gambaran bahwa adanya kemajuan dalam kerjasama AS dan Indonesia pada sektor kehutanan dan lingkungan. Program bantuan ini diarahkan untuk fokus pada implementasi program pada tingkat kabupaten. Investasi pada tingkat kabupaten diharapkan untuk menciptakan fondasi yang kuat untuk reformasi skala besar dalam pengelolaan hutan dan memberi peran bagi kabupaten untuk berpartisipasi dalam inisiatif dan dialog kebijakan pada tingkat nasional. Berikut ini adalah 4 kabupaten target yang menjadi fokus penanganan dalam program TFCA Kalimantan: Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat (lihat pada peta nomor 1), Kabupaten Kutai Barat (nomor 2), Kabupaten Berau (nomor 3), dan Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur (nomor 4).<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> KEHATI.2012. *TFCA Kalimantan – Rencana Implementasi 2013 – 2017*. Tersedia online <http://www.tfcakalimantan.org>

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Samantha, Gloria.2014. Rp.40 Miliar Hibah untuk Hutan. National Geographic Indonesia. Artikel online <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/05/rp40-miliar-hibah-untuk-hutan> diakses pada 1 November 2017



**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Target TFCA Kalimantan**



Pemerintah kabupaten yang menjadi sasaran program memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah kabupaten tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung (khususnya pembentukan *Forest Management Units*/Kesatuan Pengelolaan Hutan – KPH yang akan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten) dan daerah-daerah di luar kawasan hutan.<sup>33</sup> Oleh karena itu diyakini bahwa fokus bantuan yang dipusatkan pada daerah kabupaten dan melakukan perbaikan kinerja pemerintahannya dapat memiliki dampak langsung dan signifikan pada upaya perlindungan hutan tropis. Implementasi program pada empat kabupaten sasar tersebut di atas memungkinkan pendanaan program secara lebih efektif dan juga untuk memastikan skala kegiatan yang dilakukan dapat

---

<sup>33</sup> KEHATI.2012. *TFCA Kalimantan – Rencana Implementasi 2013 – 2017*. Tersedia online <http://www.tfcakalimantan.org>

memadai dan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan lingkungan.

Alasan pulau dan hutan Kalimantan menjadi bagian dari wilayah pengelolaan dari program TFCA ini karena Kalimantan juga merupakan harta karun dunia dari segi keragaman spesies yang sangat beragam dan sangat sedikit tempat di dunia yang dapat menandingi keanekaragamannya. Hutan Kalimantan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan habitat bagi mamalia besar dan memiliki hingga 15.000 tanaman bunga yang berbeda.<sup>34</sup> Keragaman ini juga terdapat pada budaya, tradisi dan bahasa. Hutan Kalimantan juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi jutaan orang. Hutan menyediakan kayu dan produk non-kayu seperti obat-obatan, makanan dan bahan-bahan yang bermanfaat lainnya. Hutan menyediakan jasa lingkungan yang penting, termasuk membantu melindungi daerah aliran sungai di Kalimantan dan menstabilkan iklim. Potensi ini menjadi sangat berperan dalam memerangi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas-gas rumah kaca Indonesia yang sejalan dengan komitmen pemerintah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada pertengahan tahun 1980-an tutupan hutan Kalimantan masih di tingkat 75% dari total wilayah namun saat ini hanya lebih dari setengah daratan Kalimantan yang masih berhutan.<sup>35</sup> Wilayah Kalimantan menyumbangkan angka terbesar dari deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia yaitu sekitar 41% dari total deforestasi dan kerusakan hutan yang terjadi.<sup>36</sup> Menurut data yang dikeluarkan Departemen

---

<sup>34</sup> Ardhan, David; Paul Mario Ginting; Arief Tajalli.2014. *Panduan Pendekatan Progam Konservasi berbasis Pendekatan Ekosistem*. Penabulu Alliance.

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada tahun 2000 sampai tahun 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektar.<sup>37</sup> Sementara itu menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010.<sup>38</sup> Gambar 4.2 di bawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 1950 hingga 2010, tidak lebih dari 60% hutan Kalimantan yang tersisa.<sup>39</sup>

Penyebab utama dari cepatnya deforestasi hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh pengalihan fungsi (konversi) skala besar kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan, pembalakan liar dan pembakaran hutan. Hilangnya hutan di Kalimantan memiliki konsekuensi drastis bagi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan masyarakat setempat. Sumber terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah hilangnya hutan dan perubahan tata guna lahan. Antara tahun 2000 dan 2005, degradasi hutan dan lahan gambut menyumbang lebih dari 60% emisi gas rumah kaca Indonesia. Pada tahun 2009, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen mengurangi efek gas rumah kaca di Indonesia sebesar 26% dari skema '*business as usual*' pada tahun 2020 dan hingga 41% dengan dukungan bantuan internasional yang 88% pengurangan emisi berasal dari sektor kehutanan.<sup>40</sup>

Indonesia adalah salah satu negara terdepan di dunia dalam pengembangan program *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+). REDD+ sangat sesuai dengan tujuan *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA).

---

<sup>37</sup> Profauna.2017. *Tentang Hutan Kalimantan*. Protecting of Forest and Fauna. Tersedia online <https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/hutan-kalimantan/tentang-hutan-kalimantan#.WYkxERWGNH0> diakses 20 Juli 2017

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Grid Arendal.2007. *Extent of deforestation in Borneo 1950-2005, and projection towards 2020*. Tersedia online <http://www.grida.no/resources/8324> diakses 20 Juli 2017

<sup>40</sup> TFCA Kalimantan. *Rencana Implementasi 2013 – 2017*. Online <http://www.tfcakalimantan.org/>

Mengembangkan kondisi yang memungkinkan untuk REDD+ akan memerlukan peningkatan tata kelola sumber daya multi pihak, meningkatkan proses perencanaan penggunaan lahan, memperluas penerapan praktik terbaik untuk berbagai jenis tata kelola lahan, meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan peran masyarakat. Dengan mengeksplorasi segala kemungkinan keterkaitan antara keanekaragaman hayati dan agenda perubahan iklim prioritas, TFCA Kalimantan menunjukkan cara yang paling efektif menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati dan agenda perubahan iklim nasional.

TFCA Kalimantan mendukung perkembangan REDD+ di Indonesia. Hal ini juga mendukung pelaksanaan komitmen nasional dan internasional lainnya yang ada, termasuk penerapan target keanekaragaman hayati. Program TFCA Kalimantan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dan tujuan lingkungan dari US – Indonesia *Comprehensive Partnership*.<sup>41</sup>

#### **4.4.3 Profil Utang Luar Negeri Indonesia dalam TFCA**

TFCA Sumatera dan TFCA Kalimantan melibatkan enam utang Pemerintah Indonesia ke Pemerintah AS yang ditandatangani pada tahun 1974 – 1976. Rentang waktu pembayaran utang tersebut adalah selama 40-41 tahun yang pembayaran angsurannya dijadwalkan berakhir pada tahun 2016/2017.

---

<sup>41</sup> Ibid.

**Tabel 4.3****Profil Utang TFCA (ribu dolar AS)**

Nama Utang (penggunaan)	Referensi Utang	Tanggal Penandatanganan Utang (Date Signed)	Jumlah Utang	Sisa Utang (Pokok dan Bunga)
Untuk Transmisi dan Distribusi Fase II di Jawa Barat	497-W-032	29 Maret 1974	19.645,99	6.419,69
Untuk Daerah Pedalaman	497-T-035	10 Mei 1975	6.738,84	2.371,43
Untuk Perbaikan Jalan di Aceh	497-T-036	10 Mei 1975	9.657,97	3.641,45
Untuk Irigasi Sederhana dan Pengembangan Lahan	497-T-037	30 Juni 1975	22.520,26	8.491,05
Untuk Daerah Luwu dan Pengembangan Transmigrasi	497-T-038	23 Oktober 1975	14.776,25	5.571,25
Untuk Pembangunan Waduk Citanduy	497-T-039	28 Oktober 1976	10.791,39	4.611,30
<b>Total</b>			<b>84.130,70</b>	<b>31.106,16</b>

Sumber: Greenomics Indonesia (Mei 2010), diolah dari berbagai sumber

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sisa utang Pemerintah Indonesia dari enam utang tersebut per Juni 2009 adalah sebesar US\$ 31,11 juta, yang masing-masing utang pokok sebesar US\$ 27,71 juta dan utang bunga sebesar US\$ 3,40 juta.<sup>42</sup> Data pada tabel 4.3 di atas adalah data sebelum ditandatanganinya perjanjian TFCA antara AS dengan Indonesia. Dan pemerintah Indonesia terus melakukan pembayaran utang tersebut secara angsuran selama 32 – 33 tahun yang dijadwalkan lunas pada tahun 2016/2017.

<sup>42</sup> Greenomics Indonesia. 2010. *Kesepakatan "Debt-for-Nature Swap" AS – RI*.

**Tabel 4.4**  
**Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemerintah Indonesia pasca perjanjian TFCA**

Nama Utang	Referensi Utang	Kewajiban Pembayaran "Tanpa" Perjanjian DNS TFCA (Outstanding obligations)	Kewajiban Pembayaran "Dengan" Perjanjian DNS TFCA (Outstanding obligations)	Pembayaran ke "Trust Fund" DNS TFCA	Pembayaran ke USAID
Untuk Transmisi dan Distribusi Fase II di Jawa Barat	497-W-032	6.419,69	6.419,69	6.419,69	-
Untuk Daerah Pedalaman	497-T-035	2.371,43	2.371,43	1.186,77	1.184,66
Untuk Perbaikan Jalan di Aceh	497-T-036	3.641,45	3.641,45	3.641,45	-
Untuk Irigasi Sederhana dan Pengembangan Lahan	497-T-037	8.491,05	8.491,05	8.491,05	-
Untuk Daerah Luwu dan Pengembangan Transmigrasi	497-T-038	5.571,25	5.571,25	5.571,25	-
Untuk Pembangunan Waduk Citanduy	497-T-039	4.611,30	4.611,30	4.611,30	-
<b>Total</b>		<b>31.106,16</b>	<b>31.106,16</b>	<b>29.921,50</b>	<b>1.184,66</b>

Sumber: Greenomics Indonesia (Mei 2010), diolah dari berbagai sumber

Tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa secara riil, total pembayaran utang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemerintah AS, baik itu kewajiban pembayaran utang tanpa perjanjian TFCA (*outstanding obligations*) maupun kewajiban baru pembayaran utang dengan perjanjian TFCA (*new obligations*) adalah tetap, tak berubah satu dolar pun, yakni tetap sebesar US\$ 31,11 juta, dimana sejumlah US\$ 29,92 juta ditransfer ke rekening “*Trust Fund*” TFCA dan sisanya ke rekening USAID.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Ibid

Pembelian enam jenis utang Pemerintah Indonesia ke USAID oleh Departemen Keuangan AS dan CI/KEHATI sebesar US\$ 22 juta (*outstanding obligations*) dianggap (lebih kurang) mewakili nilai sekarang dari kewajiban pembayaran utang pemerintah Indonesia yang baru sebesar US\$ 29,92 juta (*new obligations*) jika dibayarkan tunai sekarang. Artinya adalah nilai pembelian utang pemerintah Indonesia sebesar US\$ 22 juta tersebut juga dinilai sebagai bentuk investasi sekarang, yang jika dihitung nilai masa depannya dapat melebihi nilai US\$ 29,92 juta.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid

## **BAB V**

### **Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi Hutan di Indonesia melalui Program TFCA tahun 2011**

Setelah mengetahui bagaimana gambaran umum tentang program kerjasama penanganan deforestasi hutan melalui program TFCA tahun 2011, pada bab ini, penulis akan menganalisis lebih mendalam tujuan AS melakukan kerjasama tersebut dan kepentingan yang mendasarinya. Analisis lebih mendalam ini didasari atas indikator yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis di bab dua pada operasionalisasi konsep.

#### ***5.1 Defence Interest***

Sebuah isu yang termasuk dalam *defence interest* merupakan isu yang termasuk kategori ancaman yang bersifat langsung dengan sasaran teritori, warga negara, maupun sistem pemerintahan. Sebelum menentukan apakah deforestasi hutan tropis di Kalimantan, Indonesia merupakan ancaman langsung yang “menyerang” teritori, warga negara dan sistem pemerintahan Amerika Serikat, terlebih dahulu harus melihat apakah deforestasi hutan tropis yang menyebabkan perubahan iklim secara keseluruhan merupakan sebuah ancaman bagi AS.

#### **Deforestasi ancaman bagi warga negara**

Warga AS percaya bahwa perubahan iklim adalah nyata dan mereka melihat bukti kuat dari perubahan iklim, sebagian besar mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti membakar bahan bakar fosil. Survei nasional yang dilakukan *Pew Research Center* di wilayah AS pada tahun 2011



mengatakan bahwa ada bukti kuat pemanasan global telah meningkat secara sederhana selama dua tahun terakhir dari tahun 2011. Pada 2011, 63% responden warga AS mengatakan ada bukti kuat bahwa suhu rata-rata bumi telah semakin hangat selama beberapa dekade terakhir akibat aktivitas manusia. Pada tahun 2009, hanya 57% yang mengatakan mengenai perubahan suhu bumi tersebut.<sup>1</sup> Dibawah ini adalah data opini warga AS terhadap isu perubahan iklim:

**Tabel 5.1**  
**Opini Warga AS terhadap Perubahan Iklim tahun 2006 – 2011**

<b>Is there solid evidence the earth is warming?</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	%	%	%	%	%	%
Yes	77	77	71	57	59	63
Because of human activity	47	47	47	36	34	38
Because of natural patterns	20	20	18	16	18	18
Don't know	10	10	6	6	6	6
No	17	16	21	33	32	28
Mixed evidence/Don't know	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	100	100	100	100	100	100
<b>How serious a problem is global warming?</b>						
Very serious	43	45	44	35	32	38
Somewhat serious	36	32	29	30	31	27
Not too serious	11	12	13	15	16	16
Not a problem	9	8	11	17	18	17
Don't know	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
	100	100	100	100	100	100

Sumber: *Pew Research Center*, 2011

Mayoritas masyarakat AS mengatakan bahwa pemanasan global adalah masalah yang sangat serius sebanyak 38% dan agak serius sebanyak 27%. Sisanya memandang pemanasan global sebagai masalah yang tidak terlalu serius sebanyak 16% dan tidak menjadi masalah sebanyak 17%.<sup>2</sup> Walaupun warga AS memandang

---

<sup>1</sup> Pew Research Center.2011. *Modest Rise in Number Saying There Is 'Solid Evidence' of Global Warming*. *Pew Researcrh Center U.S. Politics & Policy*. Tersedia online <http://www.people-press.org/2011/12/01/modest-rise-in-number-saying-there-is-solid-evidence-of-global-warming/> diakses 30 Desember 2017

<sup>2</sup> *Ibid*.

isu perubahan iklim adalah masalah yang sangat serius dan akan merugikan namun sedikit yang yakin bahwa perubahan itu akan merugikan mereka secara pribadi. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh *Yale Program on Climate Change Communication* pada tahun 2011 yang menyatakan hanya 11% responden yang menyatakan bahwa perubahan iklim mengancam mereka secara pribadi. Persentase terbesar ada pada anggapan hanya sedikit mengancam secara pribadi yakni sebesar 25%.<sup>3</sup> Berikut adalah tabel datanya:

**Tabel 5.2**  
**Opini Masyarakat AS terhadap Ancaman Perubahan Iklim secara Pribadi (%)**

	May 2011	June 2010	Jan 2010	Nov 2008
A great deal	11	10	14	10
A moderate amount	18	21	23	22
Only a little	28	27	22	24
Not at all	25	24	31	22
Don't know	18	18	11	23

Sumber: *Yale Project on Climate Change Communication*, 2011

Berdasarkan tabel 5.2 di atas dapat kita lihat bahwa 53% warga AS menganggap perubahan iklim tidak mengancam diri mereka secara pribadi. Warga AS sebagian besar beranggapan dampak perubahan iklim adalah ancaman yang jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan karena deforestasi hutan tidak terjadi di sekitar mereka tinggal. Hanya sebagian kecil, 11%, warga AS yang menganggap dampak perubahan iklim adalah masalah besar bagi diri mereka. Melalui hal ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa deforestasi hutan tropis yang

---

<sup>3</sup> Leiserowitz, A., Maibach, E., Roser-Renouf, C., & Smith, N. 2011. *Climate Change in the American Mind: American's Global Warming Beliefs and Attitudes in May 2011*. Yale University and George Mason University. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication. <http://environment.yale.edu/climate/files/ClimateBeliefsMay2011.pdf>

menyebabkan perubahan iklim tidak menjadi ancaman secara langsung warga negara AS meskipun ada hampir dua pertiga (63%) warga AS yang percaya bahwa perubahan iklim akibat deforestasi telah terjadi.

### **Deforestasi ancaman bagi wilayah negara**

Sebuah studi terbaru menawarkan wawasan mengenai dampak jangka panjang dari perubahan iklim, terutama dampak dari penggundulan hutan berskala besar yang terjadi di wilayah tropis yang menyangkut iklim global. Seorang periset dari Universitas Duke, Durham, N.C., menganalisis data beberapa tahun menggunakan Model Teknologi Sirkulasi Komputer Goddard untuk Proyek Ilmu Komputer Circulation Umum (GCM) dan Proyek Klimatologi Pengendapan Global (GPC) untuk menghasilkan beberapa simulasi iklim.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan menemukan fakta bahwa penggundulan hutan di berbagai wilayah di dunia mempengaruhi pola curah hujan di wilayah yang cukup luas. Perubahan curah hujan tersebut terutama terjadi pada musim-musim tertentu dan bahwa kombinasi deforestasi di daerah-daerah tersebut meningkatkan hujan di satu wilayah sekaligus mengurangi curah hujan di wilayah yang lain.<sup>5</sup>

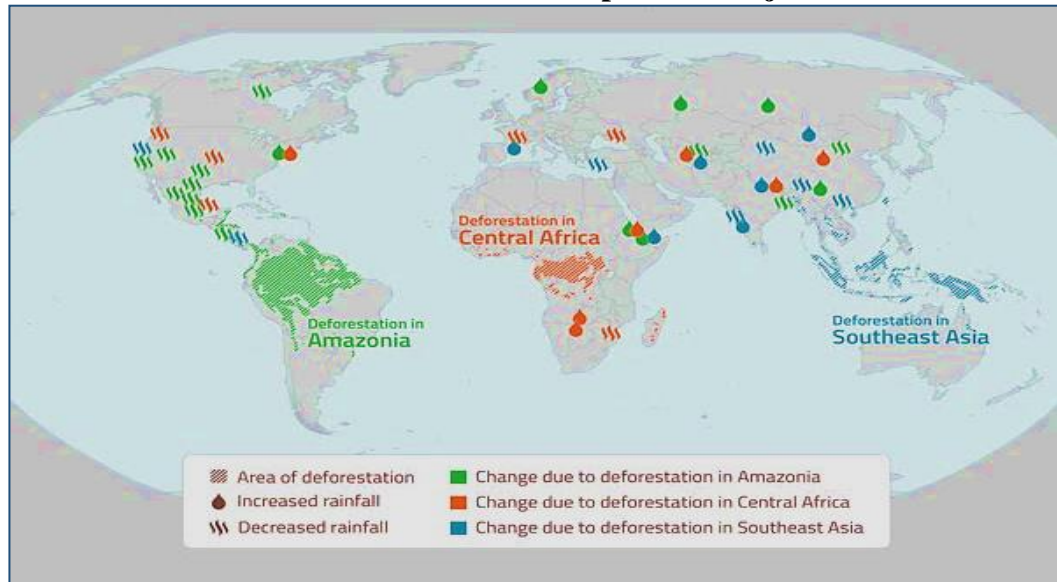
---

<sup>4</sup> Bettwy, Mike. 2005. *Tropical Deforestation Affects Rainfall in the U.S. and Around the Globe*. NASA.gov: Goddard Space Flight Center. Tersedia online [https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/deforest\\_rainfall.html](https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/deforest_rainfall.html) diakses 23 Desember 2017

<sup>5</sup> Ibid

**Gambar 5.1**

**Efek Deforestasi Hutan terhadap Curah Hujan Bumi<sup>6</sup>**



Sumber: *Nature Climate Change*

Berdasarkan data dalam gambar 5.1 di atas, deforestasi di wilayah hutan Amazon Amerika Selatan, sangat mempengaruhi curah hujan di Teluk Meksiko, Texas dan utara wilayah Meksiko selama musim semi dan musim panas ketika air sangat penting untuk produktivitas pertanian. Sementara itu, penggundulan hutan di Afrika Tengah menyebabkan penurunan curah hujan yang signifikan di wilayah bawah Midwest Amerika selama musim semi dan musim panas dan di wilayah atas Midwest Amerika pada musim dingin dan musim semi. Demikian juga deforestasi hutan di Asia Tenggara ditemukan mengubah curah hujan di Cina dan Semenanjung Balkan secara signifikan.<sup>7</sup> Penghapusan salah satu wilayah dari hutan tropis

<sup>6</sup> Nature Climate Change. 2017. *The World without Rainforest*. Online <https://www.nature.com/nclimate/> diakses 18 November 2017

<sup>7</sup> Bettwy, Mike. 2005. *Tropical Deforestation Affects Rainfall in the U.S. and Around the Globe*. NASA.gov: Goddard Space Flight Center. Tersedia online [https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/deforest\\_rainfall.html](https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/deforest_rainfall.html) diakses 23 Desember 2017

terbesar yang ada di Amazon, Afrika Tengah dan Asia Tenggara, meningkatkan curah hujan di ujung selatan wilayah Arab. Namun, efek dari penggundulan hutan gabungan di ketiga wilayah tersebut menurunkan secara drastis curah hujan di wilayah AS hingga wilayah California selama musim dingin.<sup>8</sup>

Perubahan curah hujan di berbagai wilayah tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap sumber daya air, frekuensi kebakaran, pertanian dan aktifitas terkait di berbagai lokasi. Untuk di wilayah AS sendiri terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat perubahan iklim ini, diantaranya:

**Tabel 5.3**

**Dampak Perubahan Iklim di Wilayah Amerika Serikat<sup>9</sup>**

No	Dampak Perubahan Iklim	Keterangan
1	<i>Recent U.S. Temperature Trends</i>	Suhu rata-rata AS telah meningkat sebesar 1,3° F sampai 1,9° F dan diperkirakan akan terus meningkat karena aktifitas yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.
2	<i>Extreme Weather</i>	Gelombang panas semakin sering terjadi dan intens terutama di wilayah barat AS. Gelombang dingin menjadi semakin jarang di seluruh wilayah negara. Terdapat kecenderungan regional dalam banjir dan kekeringan.
3	<i>Changes in Hurricanes</i>	Intensitas, frekuensi dan durasi badai Atlantik Utara serta frekuensi topan terkuat semuanya meningkat seiring iklim yang terus menghangat.
4	<i>Heavy Downpours Increasing</i>	Hujan deras meningkat secara nasional. Kenaikan terbesar terjadi di Midwest dan Northeast sedangkan peningkatan frekuensi

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> National Climate Assessment. 2014. *Climate Trends Highlight*. U.S. Global Change Research Program. Tersedia online <https://nca2014.globalchange.gov/highlights/overview/climate-trends> diakses 30 Desember 2017

		dan intensitas kejadian ekstrim diproyeksikan untuk semua wilayah di AS.
5	<i>Changes in Storms</i>	Badai musim dingin telah meningkat dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi dan jejaknya telah bergeser ke utara di atas wilayah AS.
6	<i>Sea Level Rise</i>	Permukaan laut global telah meningkat sekitar 8 inci sejak pencatatan yang dapat diandalkan pada tahun 1880. Hal ini diperkirakan akan terus meningkat satu sampai empat kaki pada tahun 2100.
7	<i>Melting Ice</i>	Meningkatnya suhu bumi mengurangi volume es dan memperluas permukaan di darat, danau dan laut. Hilangnya es ini diperkirakan akan terus berlanjut.
8	<i>Ocean Acidification</i>	Lautan saat ini menyerap sekitar seperempat karbon dioksida yang dipancarkan atmosfer setiap tahunnya dan kandungannya menjadi lebih asam, yang menyebabkan kekhawatiran akan dampak pada ekosistem laut.

Sumber: *U.S. Global Change*

Delapan dampak dari perubahan iklim yang telah disebutkan dalam tabel 5.3 di atas menggambarkan secara keseluruhan bagaimana efek perubahan iklim yang terjadi akibat deforestasi dari tiga wilayah hutan tropis terbesar di dunia – Amazon, Afrika Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika melihat hal tersebut maka dapat dikatakan deforestasi hutan tropis merupakan ancaman bagi wilayah/territorial negara Amerika Serikat.

### **Deforestasi ancaman bagi sistem pemerintahan**

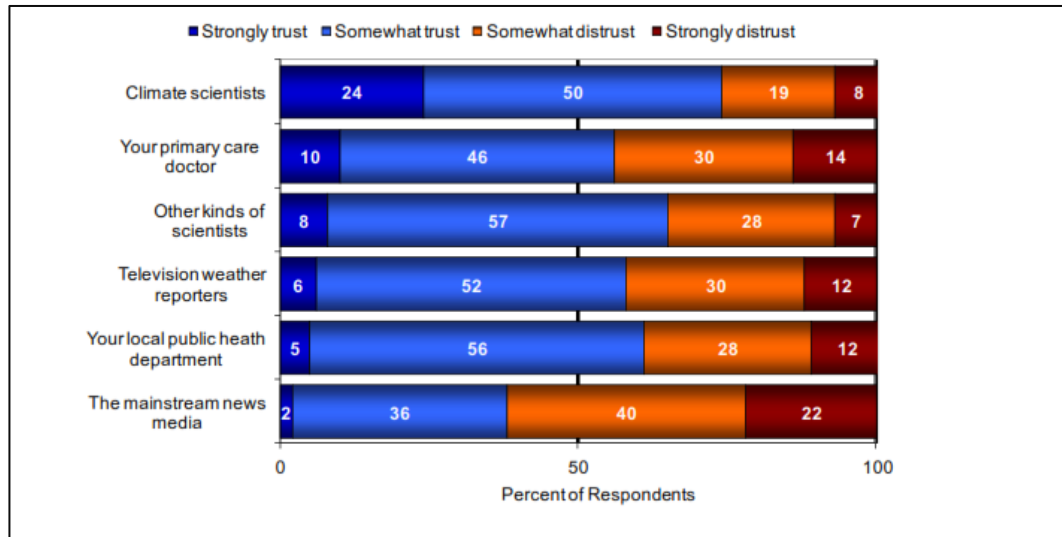
Di tingkat pemerintahan negara, banyak sekali aktor yang berperan dalam proses penyusunan kebijakan luar negeri. Apalagi sebagian besar negara maju yang mewajibkan untuk mengurangi emisinya adalah negara yang menganut

demokrasi liberal. Dimana proses pengambilan keputusan dalam rangka menetapkan kebijakan luar negeri tidak serta merta menjadi prioritas tunggal pemerintah. Parlemen, media massa, LSM, partai politik dan opini publik termasuk dari tokoh masyarakat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah negara demokrasi. Demikian juga di AS sebagai negara demokrasi liberal perlu memperhatikan berbagai faktor dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.

Perubahan iklim global yang disebabkan oleh deforestasi hutan tropis di seluruh dunia sudah memiliki efek yang signifikan dan berbahaya bagi masyarakat. Kenaikan permukaan air laut, kebakaran hutan yang tidak terkendali, gelombang panas yang semakin berbahaya dan berbagai kejadian ekstrem lainnya semakin meningkat akibat dari efek perubahan iklim ini. Mengutip hasil survey *Pew Research Center* sebanyak dua pertiga -63%- warga negara AS percaya bahwa perubahan iklim telah terjadi namun hanya 11% yang menganggap perubahan iklim akan berdampak pada diri mereka sendiri. Tanggapan masyarakat AS terhadap perubahan iklim dipengaruhi oleh pendapat dari kelompok kepentingan seperti media massa, kelompok ilmuwan dan lainnya. Dibawah ini adalah diagram yang menunjukkan hal tersebut.

**Diagram 5.1**

**Pengaruh Opini Kelompok Kepentingan terhadap Penilaian Masyarakat pada isu perubahan Iklim**



Sumber: Yale Project, 2011

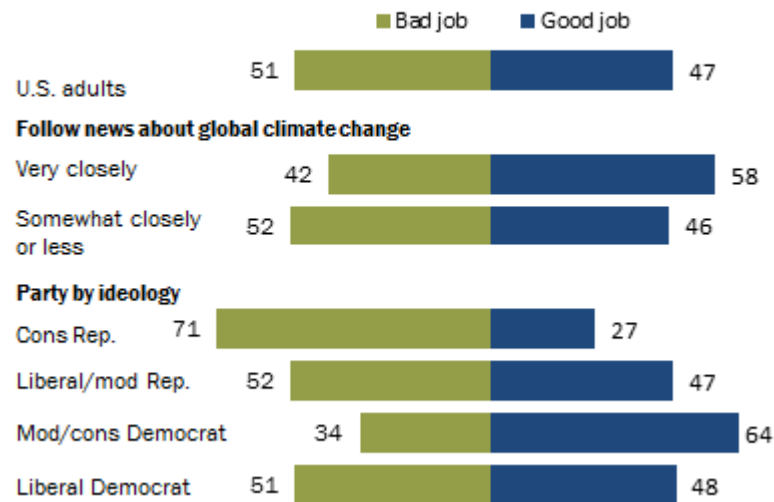
Diagram di atas menggambarkan bahwa opini masyarakat AS dipengaruhi oleh beberapa kelompok kepentingan yang ada di AS. Data menunjukkan bahwa pendapat yang dibangun oleh kelompok ahli lingkungan menempati urutan pertama yang dipercaya masyarakat AS dalam melihat isu perubahan iklim yakni sebesar 24%. Sedangkan media massa mainstream menempati urutan pertama sebagai kelompok yang tidak dipercaya oleh masyarakat AS dalam melihat isu perubahan iklim. Hal ini tentunya menimbulkan pandangan bahwa masyarakat AS sebagian besar lebih percaya kepada pendapat para ahli dibidangnya daripada media massa yang menguasai opini publik. Hal ini didukung juga dengan hasil survey dari *Pew Research Center* yang menemukan bahwa 51% masyarakat AS menganggap media massa melakukan hal yang kurang baik dalam mengcover isu tentang perubahan iklim. Datanya tercantum dalam diagram dibawah ini:



**Diagram 5.2**

**Opini tentang Peran Media dalam Isu Perubahan Iklim**

*% of U.S. adults who say the news media do a \_\_\_\_\_ in covering issues about global climate change*

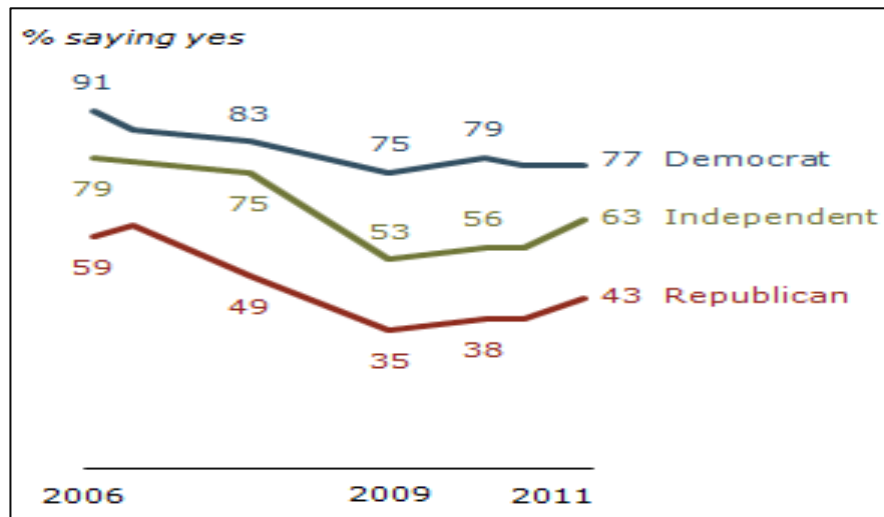


Sumber: Pew Research Center

Melalui diagram 5.2 di atas, masyarakat AS mengatakan media melakukan pekerjaan yang baik dalam isu perubahan iklim global sebanyak 47% sementara 51% mengatakan bahwa media melakukan pekerjaan buruk. Hal ini tentunya terkait dengan bagaimana media tersebut melakukan peliputan berita. Ada yang berpendapat bahwa media terlalu membesar-besarkan ancaman perubahan iklim namun tidak disertai dengan pendapat dari ahli iklim dan lingkungan dan hal ini menyebabkan masyarakat menganggap media tidak serius dalam menanggapi ancaman tersebut sehingga masyarakatpun tidak percaya dengan media.<sup>10</sup> Selain pendapat dari masyarakat secara umum, partai politik yang berkuasa di AS juga mempengaruhi bagaimana pandangan negara terhadap perubahan iklim.

<sup>10</sup>Cary Funk., Brian Kennedy. 2016. The Politics of Climate. Pew Reseach Center. Tersedia online <http://www.pewinternet.org/2016/10/04/the-politics-of-climate/>

**Diagram 5.3**  
**Opini Partai Politik tentang Perubahan Iklim**



Sumber: Pew Research Center

Diagram 5.3 menunjukkan bahwa 77% anggota partai Demokrat mengatakan ada bukti kuat perubahan iklim telah terjadi. Sedangkan responden Partai Republik hanya 43% anggotanya yang mengatakan setuju dengan perubahan iklim. Perbedaan ini dikarenakan kaum demokrat dan kaum republik melihat hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim dengan lensa yang berbeda. Demokrat percaya bahwa perubahan iklim akan membawa dampak bencana lingkungan yang mengancam masyarakat maupun negara dan tindakan dari pemimpin dan juga individu masyarakat menjadi penting untuk mengatasi hal ini. Berbeda dengan kaum republik yang menganggap bahwa perubahan iklim hanya menimbulkan sedikit kerugian bagi mereka dan negara sehingga pendapat kaum republik tentang perubahan iklim berbeda dengan kaum demokrat.

Hasil survey tersebut di atas kemudian dapat kita lihat efeknya terhadap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama pada masa

pemerintahannya. Pada tahun 2011 adalah dimana partai Demokrat yang berkuasa sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden AS Barack Obama mengenai penanganan deforestasi hutan dan penanganan perubahan iklim. Dan berikut ini adalah *action plan* yang dikeluarkan oleh presiden Barack Obama untuk mengatasi perubahan iklim.

*Investing in Clean Energy*, merupakan program energi bersih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit energi dan penggunaan energi dengan mempercepat penyebaran teknologi energi bersih, kebijakan dan implementasinya. AS akan memberikan sebagian besar bantuannya untuk penyebaran energi bersih melalui dana perwalian multilateral yang memanfaatkan peluang pengurangan gas rumah kaca skala besar dan membuat jalur investasi untuk memanfaatkan pembiayaan sektor swasta yang lebih besar. Dalam anggaran fiskal tahun 2011, pembiayaan akan berfokus pada empat bidang yakni reformasi sektor energi yang merupakan syarat untuk pengembangan energi bersih yang berkelanjutan, efisiensi energi, energi rendah karbon dan penggunaan transportasi bersih dari polusi.<sup>11</sup>

*Promoting Sustainable Landscapes*, digunakan pemerintah AS untuk membantu negara-negara yang mengajukan program pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. AS memberikan US\$ 1 miliar selama tahun 2010 – 2012 sebagai bagian dari kontribusi AS terhadap “*fast start financing*” yang tercermin dalam *Copenhagen Accord*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> The White House. *Climate Change and President Obama's Action Plan*.  
<https://obamawhitehouse.archives.gov/node/279886>

<sup>12</sup> Ibid

*Supporting Climate Change Resilience and Adaptation*, yang membantu negara-negara berpenghasilan rendah untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim akan mengurangi konsekuensi sosial, lingkungan dan juga ekonomi. Program adaptasi ini mengintegrasikan solusi iklim ke dalam kegiatan pembangunan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Pada anggaran fiskal tahun 2011, pemerintah AS memfokuskan dana adaptasi untuk memperbaiki penyebaran informasi untuk membantu mengidentifikasi kerentanan terbesar terhadap perubahan iklim, menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan konstituen mereka, dan menerapkan solusi iklim yang secara lokal sesuai dan meningkatkan ketahanan populasi dunia yang paling rentan.<sup>13</sup>

Adanya *climate action plan* pada masa pemerintahan Obama tersebut menjelaskan bahwa isu perubahan iklim akibat deforestasi hutan tropis global menjadi ancaman serius bagi sistem pemerintahan, namun tidak dikatakan bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman langsung bagi AS. Pemerintah AS sadar bahwa apabila perubahan iklim tidak segera ditangani dengan benar akan berdampak buruk bagi seluruh elemen negara. Selain itu juga pendapat dari partai politik, kelompok ilmuwan lingkungan dan juga media massa mempengaruhi pemerintah membuat kebijakan tentang perubahan iklim. Jadi dapat dikatakan bahwa isu deforestasi hutan secara global yang menyebabkan perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan bagi sistem pemerintahan negara AS untuk ikut andil dalam upaya mitigasi tersebut.

---

<sup>13</sup> Ibid

Melalui analisa tiga aspek tersebut diatas penulis tidak menemukan bahwa deforestasi yang terjadi di wilayah Indonesia mengancam secara langsung negara AS baik itu warga negara, teritori maupun sistem pemerintahan. Walaupun isu deforestasi dan dampaknya yang terjadi di Indonesia tidak mempengaruhi secara langsung negara AS, namun tetap saja hal ini menjadi pertimbangan pemerintah AS untuk ikut andil dalam proses mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan politik yang dimiliki AS untuk memiliki akses ke pemerintah Indonesia. Sehingga dapat dikatakan, AS memiliki kepentingan untuk melindungi negaranya dari dampak deforestasi hutan melalui bantuan program TFCA Kalimantan yang diberikan di Indonesia pada tahun 2011.

## **5.2 Economic Interest**

Kepentingan ekonomi bisa menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam program bantuan TFCA yang diberikan kepada Indonesia. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam indikator yang pada akhirnya mengarahkan kepada kepentingan ekonomi nasional yang dimiliki oleh AS. Hal ini didukung oleh penjelasan Lancaster mengenai tujuan bantuan luar negeri (*aid's purpose*) salah satunya adalah tujuan perdagangan (*commercial purpose*).<sup>14</sup> Pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat dari bagaimana perkembangan perdagangan yang dilihat dari peningkatan jumlah ekspor Amerika Serikat ke Indonesia dan investasi yang terjadi diantara kedua negara adalah indikator yang penulis gunakan untuk melihat apakah kepentingan ekonomi nasional merupakan tujuan dari program TFCA Kalimantan.

---

<sup>14</sup> Lancaster, Carol. 2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago: University of Chicago.

Dalam hal ini program perlindungan kawasan hutan dan upaya konservasi lingkungan AS di Indonesia yang terkoordinir dalam program TFCA Kalimantan menciptakan keamanan lingkungan bagi Indonesia dan juga mengkonfirmasi stabilitas ekonomi AS. Sesuai dengan definisi kepentingan ekonomi Nuechterlein bahwa kepentingan ekonomi menjadi tonggak untuk menjamin kesejahteraan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Terkait dengan hal tersebut, ekonomi Indonesia yang bergantung pada sumber daya alam dan diekspor untuk kebutuhan pasar AS menjadi tonggak kesejahteraan masyarakat AS. Jika efek hilangnya hutan dan perubahan iklim mengancam keamanan lingkungan dan ekonomi Indonesia yang memiliki potensi ekonomi signifikan maka hal tersebut akan mengganggu stabilitas perekonomian di pasar AS sendiri.

AS merupakan negara dagang terbesar di dunia. Empat mitra dagang terbesar AS adalah Kanada, Meksiko, Tiongkok dan Jepang.<sup>15</sup> Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Jepang.<sup>16</sup> Namun potensi ekonomi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi perdagangan terbesar ke-26 di dunia belum sepenuhnya terwujud.<sup>17</sup> Dibawah ini adalah tabel data perdagangan antara AS dengan Indonesia :

---

<sup>15</sup> Kemendag.2013. *Market Brief Kayu Lapis*. Chicago: ITPC Chicago.

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> World Trade Organization. 2013. Trade Profiles: Indonesia. tersedia online <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=ID/>

**Tabel 5.2**  
**Data Perdagangan AS dengan Indonesia (US\$)**

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	% Change 2011/2012
<b>DENGAN INDONESIA</b>						
Ekspor	5,644,478,295	5,106,983,972	6,946,120,424	7,413,804,524	8,014,025,632	8.10
-Migas	95,979,948	7,005,113	57,440,627	88,952,046	154,795,995	74.02
-Non Migas	5,548,498,347	5,099,978,859	6,888,679,797	7,324,852,478	7,859,229,637	7.30
Impor	15,799,137,766	12,938,589,076	16,478,313,460	19,110,802,270	17,997,031,529	-5.83
-Migas	859,561,246	630,844,987	1,123,167,483	846,863,500	338,535,472	-60.02
-Non Migas	14,939,576,520	12,307,744,089	15,355,145,977	18,263,938,770	17,658,496,057	-3.31
Total Perdagangan	21,443,616,061	18,045,573,048	23,424,433,884	26,524,606,794	26,011,057,161	-1.94
-Migas	955,541,194	637,850,100	1,180,608,110	935,815,546	493,331,467	-47.28
-Non Migas	20,488,074,867	17,407,722,948	22,243,825,774	25,588,791,248	25,517,725,694	-0.28
Neraca Perdagangan	-10,154,659,471	-7,831,605,104	-9,532,193,036	-11,696,997,746	-9,983,005,897	-14.65
-Migas	-763,581,298	-623,839,874	-1,065,726,856	-757,911,454	-183,739,477	-75.76
-Non Migas	-9,391,078,173	-7,207,765,230	-8,466,466,180	-10,939,086,292	-9,799,266,420	-10.42

Sumber: Global Trade Atlas

Total perdagangan AS dengan Indonesia pada periode 2012 sebesar US\$ 26.01 milyar atau 1.94% lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 sebesar US\$ 26.52 milyar. Untuk Ekspor AS ke Indonesia periode 2012 tercatat sebesar US\$ 8.01 milyar, naik 8.10% dibandingkan dengan periode tahun 2011 sebesar US\$ 7.41 milyar. Sedangkan untuk impor AS dari Indonesia pada periode 2012 tercatat US\$ 17.99 milyar, turun 5.83% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar US\$ 19.11 milyar. Dan dalam periode tahun 2012, AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia sebesar US\$ 9.98 milyar.<sup>18</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa AS merupakan pasar ekspor non-migas yang menguntungkan bagi Indonesia. Ekspor non-migas tersebut adalah

<sup>18</sup> *Global Trade Atlas* dalam Kemendag.2013. *Market Brief Kayu Lapis*. Chicago: ITPC Chicago

komoditas kayu lapis Indonesia. Ekspor bagi Indonesia samadengan impor bagi AS, dibawah ini adalah tabel data tentang impor kayu lapis ke AS dari beberapa negara termasuk Indonesia.

**Tabel 5.3**  
**Impor Kayu Lapis AS (US\$)**

United States Import Statistics							
Commodity: 4412, Plywood, Veneered Panels And Similar Laminated Wood							
Year To Date: January - December							
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012/2011
World	1,545,132,000	1,530,924,840	1,762,512,018	100.00	100.00	100.00	15.13
China	794,113,898	850,281,348	1,021,242,822	51.39	55.54	57.94	20.11
Indonesia	141,762,436	120,781,596	149,040,871	9.17	7.89	8.46	23.40
Canada	159,731,425	119,573,453	148,232,078	10.34	7.81	8.41	23.97
Russia	93,856,396	96,045,725	112,492,227	6.07	6.27	6.38	17.12
Chile	92,240,264	124,291,679	84,392,514	5.97	8.12	4.79	- 32.10
Malaysia	90,452,368	66,435,147	75,830,458	5.85	4.34	4.30	14.14
Ecuador	27,550,347	22,425,071	27,243,322	1.78	1.46	1.55	21.49
Brazil	39,860,632	21,101,503	27,052,976	2.58	1.38	1.53	28.20
Finland	16,878,207	17,320,587	13,055,127	1.09	1.13	0.74	- 24.63
Taiwan	10,706,715	10,984,489	11,391,152	0.69	0.72	0.65	3.70
Vietnam	5,780,529	6,476,309	11,073,685	0.37	0.42	0.63	70.99
Paraguay	7,985,174	9,606,362	10,435,423	0.52	0.63	0.59	8.63
Italy	7,635,388	9,008,539	10,390,659	0.49	0.59	0.59	15.34
Sweden	8,194,898	10,498,296	9,687,180	0.53	0.69	0.55	- 7.73
Spain	3,827,691	5,339,564	8,819,954	0.25	0.35	0.50	65.18

Sumber: Global Trade Atlas

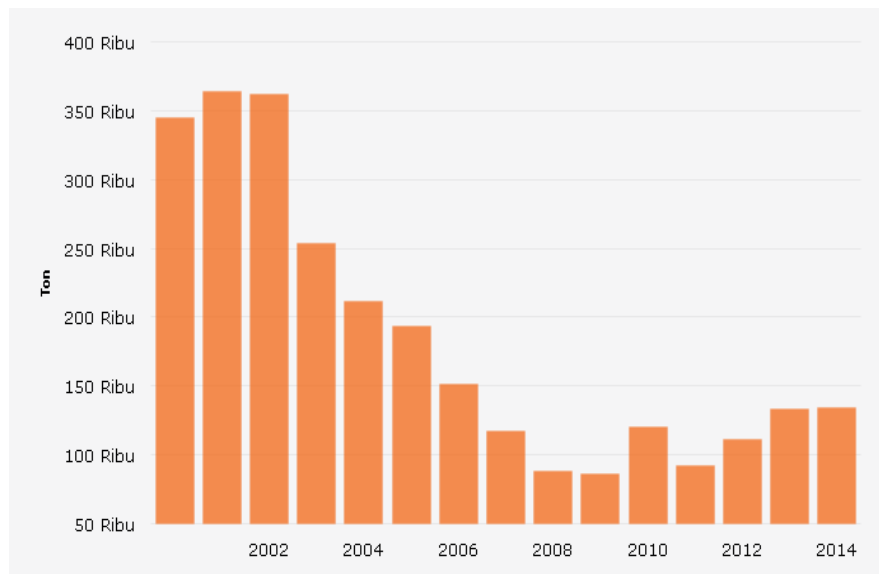
Pada tahun 2012, impor kayu AS dari dunia sebesar US\$ 1.7 milyar dimana terjadi kenaikan sebesar 15.13% dibandingkan tahun sebelumnya. China/Tiongkok menyumbang US\$ 1.02 milyar dengan memiliki pangsa pasar sebesar 5.79% dari total impor kayu lapis AS, diikuti dengan Indonesia sebesar US\$ 149 juta dengan pangsa pasar 8.46% dari total impor, dan Kanada yang menjadi peringkat ketiga dengan nilai US\$ 148 juta dengan pangsa 8.41% dari total impor kayu lapis AS.



Selain mengetahui jumlah satuan dollar yang diekspor, penulis juga menampilkan data volume ekspor kayu lapis Indonesia ke AS dalam satuan ribuan ton untuk lebih memahami bagaimana pertumbuhan ekspor diantara kedua negara.

**Diagram 5.4**

**Volume Ekspor Kayu Lapis Indonesia ke AS (ribu ton)**



Sumber: Kementerian Keuangan – Jenderal Bea dan Cukai.

Melalui diagram di atas kita dapat melihat fluktuasi tajam volume ekspor kayu lapis Indonesia dari tahun 2000 yang mendapat nilai volume tertinggi hingga terus menurun di tahun 2009 yang hanya mendapat nilai volume sebesar 86.6 ribu ton. Kemudian setelah itu, volume ekspor kembali naik pada angka 119.9 ribu ton di tahun 2010. Dan di tahun 2011 kembali berkurang mencapai angka 91.9 ribu ton. Namun setelah tahun 2011, jumlah volume ekspor kayu lapis Indonesia ke AS meningkat. Tahun 2012 volume ekspor sebesar 111.5 ribu ton, tahun 2013 sebesar 133.4 ribu ton dan di tahun 2014 sebesar 134.3 ribu ton. Hal ini mengindikasikan adanya penguasaan sumber daya yang dilakukan AS terhadap hutan Indonesia yang memproduksi kayu lapis.

Penguasaan sumber daya alam tersebut diperkuat dengan informasi kerjasama bilateral, bahwa di tahun 2011 pemerintah AS melakukan kesepakatan penandatanganan TFCA dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah deforestasi hutan yang ada di Kalimantan.<sup>19</sup> Kerjasama TFCA tersebut dikembangkan dengan fokus implementasi di tingkat kabupaten yang ada di Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur.<sup>20</sup> Kerjasama ini mengisyaratkan, bahwa TFCA dengan bantuan ditingkat kabupaten hanyalah satu dari pengupayaan eksploitasi sumber daya alam.

Hal yang menarik dari data diatas adalah besarnya ekspor kayu lapis Indonesia yang mana terjadi peningkatan jumlah ekspor ke AS setelah tahun 2011. Dimana tahun 2011 merupakan tahun kesepakatan kerjasama bantuan AS dalam program TFCA Kalimantan untuk penanganan masalah deforestasi hutan. Dan peningkatan ekspor terjadi satu tahun setelah penandatanganan kesepakatan tersebut berjalan. Hal ini menandakan bahwa kerjasama program bantuan TFCA memberikan dampak bagi perdagangan Indonesia secara umum dan secara khusus pada komoditas kayu lapis.

Selain perdagangan produk dan jasa, AS juga melihat Indonesia sebagai pasar investasi. Kekayaan sumber daya dan kandungan hasil bumi yang melimpah adalah informasi yang telah lama diketahui oleh AS. Sehingga telah lebih ada 600 perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Dan dari jumlah sebanyak itu 50% merupakan perusahaan multi nasional (MNC) besar. Telah ada perusahaan minyak,

---

<sup>19</sup> International Centre for Trade and Sustainable Development. 2011. *US Swaps Debt with Indonesia to Preserve Borneo Forest*. Tersedia online <https://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/us-swaps-debt-with-indonesia-to-preserve-borneo-forests>

<sup>20</sup> Ibid

gas dan chemical seperti Exxon, tambang di Freeport dan Newmont yang telah berinvestasi cukup lama di Indonesia. Dan dari tahun ketahun jumlah perusahaan yang berinvestasi di Indonesia semakin meningkat sekitar 20%.<sup>21</sup> Perkembangan pesat investasi perusahaan tersebut sebagai fasilitas pembangunan dunia dari AS untuk Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia, AS disebut sebagai investor terbesar ke-4 di Indonesia, setelah Jepang, Singapura dan Korea Selatan.<sup>22</sup> FDI AS di Indonesia sepanjang 2004 – 2012 tercatat sebesar US\$ 7 milyar. Angka ini ternyata jauh lebih rendah dari hasil temuan yang diumumkan oleh *American Chamber* (AmCham) dan *US Chamber of Commerce* (kamar dagang AS) sebesar US\$ 65 milyar.<sup>23</sup> Artinya, selama ini AS merupakan investor terbesar di Indonesia.

Kajian tersebut tidak hanya menggunakan data yang ada, namun juga mencakup wawancara mendalam dengan pejabat eksekutif senior dari 35 perusahaan AS yang melakukan investasi langsung di Indonesia, termasuk perusahaan sektor manufaktur, pertambangan, migas dan ritel. Seluruh perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia sendiri sebanyak 600 perusahaan.<sup>24</sup> Berikut ini adalah data diagram investasi langsung AS di Indonesia :

---

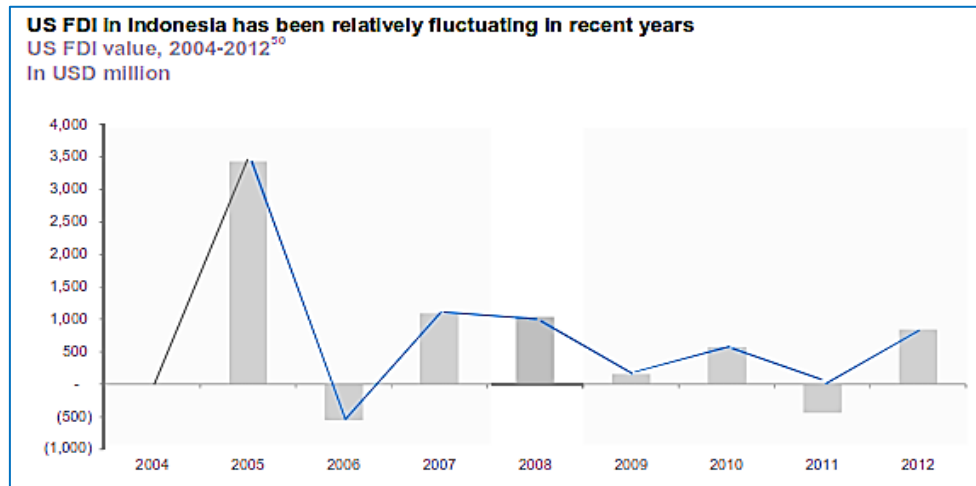
<sup>21</sup> Detik Finance.2013. 50% Perusahaan AS yang Ada di RI berskala Multinasional. Tersedia online <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2284937/50-perusahaan-as-yang-ada-di-ri-berskala-multinasional> diakses 23 Desember 2017

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia

<sup>23</sup> Ernst & Young Indonesia. 2013. *The Impact of US Foreign Direct Investment on the Indonesian Economy*. American Chamber Indonesia: Jakarta.

<sup>24</sup> SWA Trends Business. Intana, Lila.2013. AS Klaim sebagai investor terbesar di Indonesia. Online <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/as-klaim-sebagai-investor-terbesar-di-indonesia>

**Diagram 5.5**  
**Investasi Luar Negeri AS di Indonesia<sup>25</sup>**



Melalui data diagram di atas, sejak tahun 2004 - 2012 nilai FDI AS di Indonesia mencapai nilai US\$ 65 milyar. Pada 2010 realisasi investasi AS mencapai US\$ 930.8 juta, meningkat sebanyak 542.7% dari tahun 2009 yang hanya berjumlah US\$ 171.5 juta.<sup>26</sup> Investasi langsung AS tersebut didominasi oleh sektor industri ekstraktif (minyak dan gas bumi serta pertambangannya) dan sektor industri manufaktur. Tingkat pertumbuhan untuk sektor ekstraktif antara tahun 2004 dan 2012 adalah sebesar 11% sedangkan untuk manufaktur adalah 21%.<sup>27</sup>

Peningkatan investasi memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional.

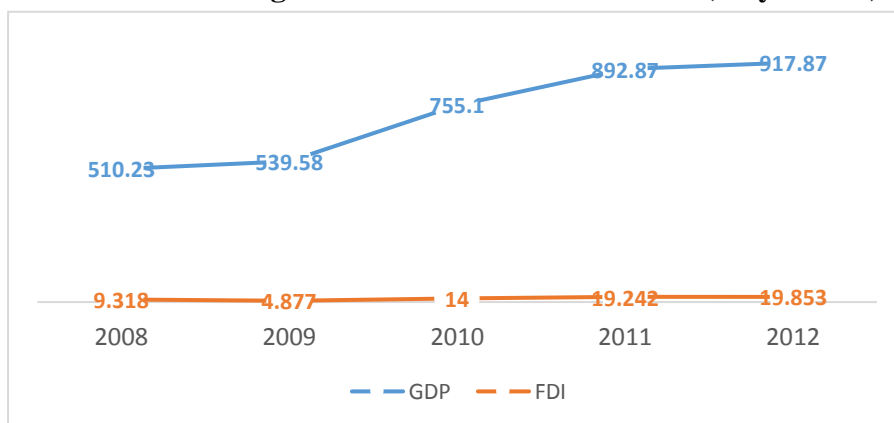
<sup>25</sup> Ernst & Young Indonesia. 2013. *The Impact of US Foreign Direct Investment on the Indonesian Economy*. American Chamber Indonesia: Jakarta.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> U.S. Chamber of Commerce. 2013. *Partners in Prosperity: U.S. investment in Indonesia*. Online <https://www.uschamber.com/report/partners-prosperity-us-investment-indonesia>

*Produk Domestik Bruto (PDB)* atau *Gross Domestic Bruto (GDP)*.<sup>28</sup> Secara sederhana pengaruh investasi terhadap perekonomian negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut, investasi berkorelasi positif dengan GDP. Berikut ini adalah diagram pertumbuhan GDP dan FDI Indonesia menurut Bank Dunia :

**Diagram 5.6**  
**Perbandingan GDP dan FDI di Indonesia (milyar US\$)**



Sumber: hasil olahan penulis dari data Bank Dunia

Dalam data diagram perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan GDP tidak berbanding lurus dengan peningkatan FDI. Investasi langsung asing yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 mengalami penurunan dari US\$ 9.318 milyar turun menjadi US\$ 4.877 milyar yang mana hal ini tidak terjadi dalam pertumbuhan GDP. GDP pada tahun 2008 menuju tahun 2009 justru mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor di dalam negeri Indonesia, seperti tidak stabilnya iklim demokrasi karena pada saat itu di Indonesia sedang dilaksanakan pemilihan umum. Faktor dari luar negeri juga dapat mempengaruhi nilai investasi

<sup>28</sup> Cahyono, Eddy. 2015. Investasi dan Pembangunan EKonomi. Sekretariat Kabinet RI tersedia online <http://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi/>

asing, yakni dikarenakan pada tahun 2008 dunia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan kekacauan pada sistem perekonomian.<sup>29</sup>

Namun apabila kita melihat data pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dimana terjadi peningkatan pada keduanya. FDI pada tahun 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan nilai sebesar 14.4% yang mana hal ini juga berlaku pada peningkatan GDP Indonesia di periode yang sama. Sehingga pada periode tahun 2009 hingga 2012 dapat dikatakan investasi asing di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini berlaku juga bagi investasi AS di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa investasi yang dilakukan AS di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2012 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari pertumbuhan GDP pada periode yang sama.

Jadi melihat dari data-data yang penulis sampaikan sebelumnya untuk mengetahui kepentingan ekonomi AS terhadap Indonesia, dari sektor investasi langsung ditemukan fakta bahwa investasi yang dilakukan AS di Indonesia pada periode sekitar penandatanganan kerjasama bantuan TFCA Kalimantan 2011 yakni pada tahun 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan ekonomi akibat dari adanya program kerjasama tersebut. Rasio investasi asing dengan GDP Indonesia berjalan seimbang. Investasi dalam bidang manufaktur berupa hasil hutan diprediksi akan terus meningkat dengan adanya kerjasama untuk melestarikan hutan tropis yang merupakan sumber daya alam untuk produksi kayu lapis yang merupakan bagian dari manufaktur. Selain berinvestasi, AS juga melakukan perdagangan dengan Indonesia, dalam pembahasan disebutkan komoditas kayu lapis menjadi fokus

---

<sup>29</sup> Ernst & Young Indonesia. 2013. *The Impact of US Foreign Direct Investment on the Indonesian Economy*. American Chamber Indonesia: Jakarta. Hlm, 33

perdagangan diantara keduanya. AS banyak mengimpor kayu lapis dari hasil hutan Indonesia yang kemudian akan diolah menjadi barang jadi –produk furniture yang mana Indonesia merupakan salah satu tujuan pemasarannya.

Walaupun hasil perdagangan kayu lapis diantara kedua negara menguntungkan bagi perekonomian. Ada dampak buruk dari hal tersebut. Peningkatan jumlah ekspor kayu lapis tersebut tentunya mempengaruhi pula bagaimana sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Kayu lapis berasal dari sumber daya kayu pohon yang ada di hutan-hutan di Indonesia. Pada tahun 2012 sendiri, Indonesia memecahkan rekor pembukaan hutan hujan tropis. Sebuah artikel dari *The Nature Conservancy* bahkan menyebutkan bahwa Indonesia telah “membersihkan” lebih dari 6 juta ha sepanjang tahun 2000 – 2012.<sup>30</sup> Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran. Jumlah ekspor yang membantu pertumbuhan perdagangan nyatanya malah membuka jalan bagi penghancuran hutan hujan Indonesia secara massif dan menjadi mimpi buruk bagi keanekaragaman hayati yang selama ini dikenal dengan istilah deforestasi.

Melalui program kerjasama TFCA Kalimantan, Indonesia mendapat bantuan dari AS untuk aksi penyelamatan hutan tropis yang mengalami deforestasi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayatinya. Sedangkan bagi AS mendapat akses untuk melindungi sumber daya alam yang selama ini menjadi fokus ekspor impornya yakni produksi kayu lapis dan furniture. Selain melindungi, AS dengan mudah mendapatkan akses untuk menguasai sumber daya tersebut dengan

---

<sup>30</sup> The Conservation.2014. *How Plywood started the destruction of Indonesias forests*. Tersedia online <https://theconversation.com/how-plywood-started-the-destruction-of-indonesias-forests-33087>

tetap menjaga hubungan dagang dan kerjasama dengan Indonesia. Jadi melalui hal-hal tersebutlah AS memiliki kepentingan ekonomi dengan Indonesia yang ditujukan untuk perdagangan melalui penyelamatan hutan.

### **5.3 World Order Interest**

Menurut Donald E. Nuechterlein, *world order interest* adalah kepentingan nasional negara untuk menjaga stabilitas politik dan sistem ekonomi internasional agar tercipta keamanan dalam dunia global. Dalam menjelaskan bagaimana kepentingan AS menjaga stabilitas politik dan ekonomi global tersebut kita dapat melihat bagaimana strategi keamanan nasional yang diciptakan oleh AS untuk mencapai kepentingannya. Strategi keamanan nasional atau yang dalam istilah AS disingkat NSS (*National Security Strategy*) ini merujuk pada tahun 2010 dibawah masa presiden Barack Obama, sehingga dikenal dengan istilah NSS 2010.<sup>31</sup>

Di dalam penjelasan NSS 2010, *world order interest* AS diartikan sebagai sebuah perintah yang diajukan oleh pemimpin AS yang mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesempatan melalui kerjasama yang lebih kuat untuk memenuhi tantangan global. Tantangan global pada hal ini dimaksudkan pada tantangan baru yang terjadi pada abad ke-21. Dengan alasan bahwa arsitektur internasional yang diwarisi pada masa perang dingin telah runtuh, sehingga terdapat tantangan era baru seperti terorisme, proliferasi nuklir, konflik regional, masalah ekonomi, penyakit endemic, kejahatan internasional hingga perubahan iklim.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Richard L. Kugler.2011. *New Direction in US National Security Strategy, Defense Plans, and Diplomacy*. Washington DC: national defense University Press for the Center for Technology and National Security Policy Institute for National Security Strategies

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 5



Perubahan iklim adalah salah satu ancaman global yang menyentuh semua area dalam hal keamanan, perdamaian dan pembangunan dunia. Dampak perubahan iklim telah berdampak buruk pada masyarakat di negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang, dan saat ini telah meluas kepada masyarakat dan pemerintahan. Perubahan iklim juga dapat disebut sebagai “*threat multiplier*” yaitu dampaknya dapat menimbulkan dampak yang lain dan menjadi bisa menjadi sebuah konflik, seperti konflik sosial, ketidaksetaraan ekonomi, migrasi skala besar, hingga persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Inilah mengapa sejak tahun 2007, isu perubahan iklim global memainkan peran penting dalam agenda politik internasional dan dapat mempengaruhi tatanan dunia (*word order*). Hal ini didukung juga oleh data jejak pendapat yang dilakukan *pew research center* pada negara-negara dunia mengenai apa yang menjadi ancaman terbesar mereka. Dikatakan dalam hasil jejak pendapat bahwa ancaman perubahan iklim global menempati posisi yang menjadi konsen negara-negara di dunia mengenai ancaman global.

**Tabel 5. 4**  
**Ancaman Utama bagi Regional Wilayah di Dunia**

*Regional medians saying \_\_\_ is a major threat to our country*

	Europe	Asia-Pacific	Middle East	Africa	Latin America
	%	%	%	%	%
ISIS	<b>74</b>	<b>62</b>	*	54	40
Global climate change	<u>64</u>	<u>61</u>	44	<b>58</b>	<b>74</b>
Cyberattacks from other countries	54	52	40	53	54
The condition of the global economy	37	46	<b>59</b>	51	<u>61</u>
A large number of refugees leaving countries such as Iraq and Syria	41	35	48	<u>55</u>	31
The United States' power and influence	31	35	<u>50</u>	37	47
Russia's power and influence	41	29	35	31	23
China's power and influence	30	47	20	32	25

Sumber: Pew Research Center

Dipicu oleh Protokol Kyoto yang dihasilkan dalam CoP-3 tahun 1997, dinamika politik internasional mulai hangat dengan pertarungan kelompok negara maju dan negara berkembang dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. AS sempat mengadopsi Protokol Kyoto mengenai isu lingkungan hidup global setelah Presiden Bush Senior menandatangani Protokol Kyoto pada tanggal 12 November 1998. Namun kongres yang dikuasi partai Republik tidak pernah meratifikasinya.<sup>33</sup> Setelah Presiden Clinton menjabat sempat muncul harapan bahwa AS sebagai negara penghasil emisi terbesar akan mau untuk meratifikasi Protokol Kyoto. Namun tetap saja Kongres menolak hal itu. Ketika pemerintahan Demokrat berganti kepada Presiden George W. Bush dari partai Republik, harapan dunia internasional agar AS mau untuk meratifikasi Protokol Kyoto lenyap. Sebab keputusan penting yang diambil George Bush saat itu adalah menolak Protokol Kyoto.

Alasan AS tidak meratifikasi Protokol Kyoto didasari oleh Resolusi *Byrd-Hagel* tahun 1997, dimana Senat AS memandang bahwa terjadi disparitas emisi yang harus direduksi oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang dapat merugikan perekonomian AS, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan, gangguan terhadap perdagangan, peningkatan energi dan biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen di AS, serta kombinasi dari hal-hal tersebut.<sup>34</sup> Pandangan negatif AS terhadap Protokol Kyoto ditunjukkan dalam pernyataan

---

<sup>33</sup> UNFCCC. Status of Ratification of The Kyoto Protocol. Tersedia online [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/status\\_of\\_ratification/items/2613.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php) diakses pada 23 September 2017

<sup>34</sup> National Center for Public Policy Research. 1997. Byrd-Hagel Resolution. Tersedia online <http://www.nationalcenter.org/KyotoSenate.html> diakses pada 23 September 2017

Menteri Luar Negeri AS pada masa Presiden Bush, Condoleeza Rice, yang menuliskan bahwa,

*“The Kyoto treaty is a case in point: Whatever the facts on global warming, a treaty that does not include China and exempsts ‘developing’ country from tough standards while penalizing American industry cannot possibly be in Americas national interest.” – Rice, 2000<sup>35</sup>.*

Hal ini menegaskan sikap AS dalam Protokol Kyoto, dimana AS tidak akan berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan alasan bahwa China dan negara berkembang tidak memiliki kewajiban yang sama dalam standar pengurangan emisi. AS tidak setuju dengan tingkat pengurangan CO<sub>2</sub> dan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi tingkat CO<sub>2</sub>. Bagi AS, pengurangan tingkat CO<sub>2</sub> adalah pengurangan dan perubahan gaya hidup yang sangat serius.<sup>36</sup> Secara sepihak pemerintahan Bush menarik diri dan menyatakan tidak terlibat dalam Protokol Kyoto tanpa melakukan konfirmasi ke negara lain.

Negara-negara di dunia berharap agar AS mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya Eropa yang mendesak AS mengubah kebijakan lingkungan mereka sebagai negara emitter karbon terbesar hasil industri. Aktivis dunia pun turut mendesak AS mengatasi masalah perubahan iklim seperti, *Greenpeace* yang mendesak pemerintah AS untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk bagi lingkungan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rice, C.2000. Promoting the National Interest. Foreign Affairs, 79(1):47

<sup>36</sup> Davenport, D.S. 2006. Global Environmental Negotiations and U.S. Interest. New York: Palgrave Macmillan.

<sup>37</sup> Greenpeace. 2010. Greenpeace Mendesak AS untuk menurunkan Emisi mereka dan meningkatkan dukungan finansial. Tersedia online  
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/news/obama-cut-emissions-not-forest/> diakses 10 November 2017

Permasalahan lingkungan menjadi domain *foreign policy maker* serta merupakan tanggung jawab komunitas internasional untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan karakter lingkungan sebagaimana yang ditulis Neil Carter dalam *the Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*, masalah lingkungan hidup ini bersifat lintas batas (*transboundary problems*) karena masalah ini tidak dapat ditanggulangi oleh hanya satu negara, namun harus melibatkan negara lain<sup>38</sup>. Atas dasar itulah kemudian diperlukan kerjasama internasional dalam membuat kesepakatan dan aturan agar masing-masing pihak dapat mengusahakan perbaikan lingkungan untuk kepentingan bersama. Disinilah posisi AS dalam sistem internasional tentang isu perubahan iklim global memainkan peran penting karena peranan AS di tingkat internasional dapat menciptakan citra positif akan kepedulian pemerintah AS dalam keselamatan lingkungan hidup dan kemanusiaan.

Isitilah *word order* selama ini mengacu pada struktur hierarki tunggal dalam sebuah institusi multilateral seperti salah satunya PBB, namun pada pengertian dalam NSS 2010, *world order* diartikan sebagai sebuah kelompok fleksibel yang berfungsi pada negara-negara yang sama yang memilih untuk bertindak bersama dalam mengejar kepentingan bersama mereka. Fitur utamanya adalah bahwa tatanan internasional ini harus diciptakan melalui kerjasama oleh negara-negara anggotanya, secepat dan seadil mungkin, dan menyediakan sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk tindakan kolektif. Hal ini merujuk pada program lingkungan dan perubahan iklim AS yang tercantum dalam *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) dimana AS menyediakan sebuah program kerja untuk

---

<sup>38</sup> Carter, Neil.2001. *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge. Hlm,163

negara-negara yang memenuhi syarat dalam melakukan konservasi hutan tropis dengan cara pengalihan utang luar negeri yang dimiliki terhadap AS.

Pada masa pemerintahannya sebagai Presiden AS, Obama berkampanye untuk menstimulasi ekonomi dapat dilakukan dengan menciptakan “*green jobs*”<sup>39</sup> dan mendorong efisiensi energi yang akan menghemat uang sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. AS menegaskan upaya mengurangi emisi sebesar 26 – 28 persen hingga tahun 2025.<sup>40</sup> Selain itu juga Presiden Obama mengajak semua negara untuk bisa menghasilkan kesepakatan bersama. Obama yakin semua negara dapat membuat perjanjian bersama untuk menangani dampak perubahan iklim. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada waktu lagi untuk menunda dalam membuat keputusan penanganan dampak perubahan iklim. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan negara penghasil gas rumah kaca terbesar kedua, AS menanggung tanggung jawab bersama untuk menghadapi perubahan iklim.<sup>41</sup> Obama mengatakan AS sedang berusaha untuk mengubah cara memproduksi dan menggunakan energi yang ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab.

Sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengingat ancaman perubahan iklim yang merugikan, AS berpartisipasi aktif dalam mendorong pencegahan perubahan iklim dengan memberikan bantuan biaya untuk mengatasi dampak tersebut ke negara berkembang, dan yang paling rentan terdampak perubahan iklim.

---

<sup>39</sup> Green jobs adalah istilah yang digunakan Barack Obama mengenai bidang-bidang pekerjaan yang ramah lingkungan yang erat kaitannya dengan kebijakan mengenai iklim dan energi.

<sup>40</sup> Sigit, Ridzki.2015. *Posisi China dan Amerika Serikat dalam Rezim Perubahan Iklim* tersedia online <http://www.mongabay.co.id/2015/12/12/opini-posisi-china-dan-amerika-serikat-dalam-rezim-perubahan-iklim/>

<sup>41</sup> Republika.2009. Obama Ajak Semua Negara Hasilkan Kesepakatan di Kopenhagen. Online <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/12/19/96804-obama-ajak-semua-negara-hasilkan-kesepakatan-di-kopenhagen>

Salah satunya adalah bantuan kerjasama penanganan deforestasi yang tercantum dalam program TFCA yang diberikan AS kepada Indonesia pada tahun 2011. Kerjasama TFCA Kalimantan termasuk dalam rangkaian program yang menjadi fokus AS dalam upaya mitigasi lingkungan di Indonesia. Tahun 2011 menjadi tahun yang dipilih oleh AS dan Indonesia untuk menandatangani kesepakatan penanganan deforestasi hutan tropis yang ada di wilayah Kalimantan secara khusus. Dana hibah sebesar US\$ 28.5 juta digelontorkan pemerintah AS untuk program yang direncanakan akan dilaksanakan hingga tahun 2019 tersebut.<sup>42</sup>

TFCA Kalimantan adalah sebagian kecil bentuk keikutsertaan dan kepedulian AS terhadap perubahan iklim yang telah terjadi dan melalui program ini juga AS berusaha untuk mendapatkan kembali penguasaan tatanan dunia mengenai isu lingkungan walaupun tidak melalui penguasaan cara umum melalui multilateral namun melalui TFCA ini AS sudah mendapatkan penguasaan tatanan dunia karena TFCA tidak hanya dilakukan di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Obama melalui *National Security Strategy* tahun 2010 nya, AS banyak melakukan diplomasi-diplomasi cerdas yang telah mengikat AS ke dalam jaringan kesepakatan lingkungan di luar negeri. Sehingga telah ada beberapa negara lain yang mendapatkan bantuan program TFCA. Jadi melalui hal tersebut, AS dapat mencapai kepentingannya dalam *world order* dalam isu lingkungan global yang akan menguntungkan tidak hanya dalam kepentingan politik tapi juga merambah dalam kepentingan ekonomi dan keamanan lingkungan.

---

<sup>42</sup> Shiddieqy, M. Ikhsan.2011. Utang RI ke AS 28,5 juta dolar dialihkan ke Hutan. Jakarta: Republika.co.id tersedia online <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/11/9/29/ls9vik-utang-ri-k>

#### 5.4 Ideological Interest

Donald E. Nuechterlein dalam konsep kepentingan nasionalnya menjelaskan bahwa *ideological interest* adalah kepentingan negara untuk melindungi nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat disuatu negara dan nilai-nilai tersebut dipercayai baik secara universal.<sup>43</sup> Sedangkan di dalam *National Security Strategy* (NSS) tahun 2010 untuk kepentingan terhadap perlindungan nilai-nilai ditegaskan bahwa karena AS menyakini beberapa nilai bersifat universal, termasuk demokrasi dan hak asasi manusia, AS harus bekerja untuk mempromosikan nilai tersebut di seluruh dunia. Mempromosikan hal tersebut harus dengan cara yang efektif dan masuk akal, tidak hanya untuk alasan idealis, tetapi juga karena penyebaran nilai-nilai ini mendorong perdamaian, kerjasama internasional, dan sikap ramah terhadap AS.<sup>44</sup>

Penyebaran nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dimaksudkan AS dalam NSS 2010 tercantum juga dalam syarat yang diberikan kepada negara penerima bantuan dalam program TFCA. Syarat tersebut adalah salah satunya bahwa negara penerima bantuan harus berasaskan demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan negara tersebut harus menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia.<sup>45</sup> AS dan Indonesia merupakan dua negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Selain samanya sistem pemerintahan kedua negara, AS juga melihat bagaimana Indonesia menjaga hak

---

<sup>43</sup> Nuechterlein.*Op.cit.* hlm. 248

<sup>44</sup> Richard L. Kugler.2011. *New Direction in US National Security Strategy, Defense Plans, and Diplomacy*. Washington DC: national defense University Press for the Center for Technology and National Security Policy Institute for National Security Strategies . hlm. 4

<sup>45</sup> USAID. Eligibility Requirements for TFCA Agreements. Tersedia Online <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/eligibility-requirements>

asasi manusia di dalam negaranya. Karena hak asasi merupakan salah satu ciri sistem demokrasi.

Perlindungan HAM telah menjadi *concern* AS di Indonesia terutama semenjak pada peristiwa pelanggaran hak asasi yang terjadi di Timor Leste, Aceh dan Papua hingga peristiwa tahun 1998 yang menjadi titik balik pemerintahan demokrasi Indonesia.<sup>46</sup> Kerjasama perlindungan HAM dan demokrasi menjadi salah satu fokus kerjasama bilateral AS – Indonesia dalam *Comprehensive Partnership*. Karena AS sadar bahwa di dunia yang semakin multipolar ini, kerjasama dengan negara-negara yang menguntungkannya seperti Indonesia menjadi hal penting untuk menjawab tantangan global dan regional. Perlindungan HAM ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan HAM itu sendiri yakni pada Undang-undang nomer 39 tahun 1999.<sup>47</sup>

Membendung pengaruh ideologi komunis dijadikan tujuan kepentingan AS dalam memberikan bantuan perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia pada saat masa setelah perang dunia kedua dan masa perang dingin. Setelah pengaruh komunis berhasil dibendung dan Indonesia menjadi negara demokrasi, AS tetap melanjutkan kerjasamanya dengan tujuan untuk mendukung Indonesia menciptakan *good governance* melalui berbagai bantuan program-program yang fokus pada perbaikan sistem pemerintahan. Karena demokrasi dan *good*

---

<sup>46</sup> Abraham M. Denmark, Rizal Sukma, and Christine Parthermore.2010. Crafting a Strategic Vision: A New Era of U.S.- Indonesia Relations. Washington, DC: Center for a New American Security. Online [https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS\\_Crafting-a-Strategic-Vision\\_Denmark.pdf?mtime=20160906081233](https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS_Crafting-a-Strategic-Vision_Denmark.pdf?mtime=20160906081233)

<sup>47</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *UU Nomer 39 Tahun 1999*. Online <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/3/uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia.html>



*governance* merupakan salah satu penunjang terciptanya sistem desentralisasi dan liberalisasi pasar yang mana nantinya hal tersebut membuka akses pengelolaan sumber daya yang ada di daerah dan membuka jalur birokrasi perekonomian yang semakin mudah bagi asing untuk melindungi kepentingannya di daerah.<sup>48</sup>

Pada tahun 2011, AS memberikan bantuannya untuk mengatasi permasalahan deforestasi hutan tropis di Kalimantan dan dampaknya yang terjadi di sekitar daerah deforestasi tersebut. Bantuan ini diberikan AS melalui mekanisme pengalihan utang luar negeri Indonesia terhadap AS yang mana pembayaran utang tersebut dialihkan untuk biaya penanganan deforestasi dan dampaknya. TFCA tidak hanya menanam kembali hutan yang hilang tapi juga membantu pemerintah daerah sekitar wilayah yang terdeforestasi untuk membangun kembali sistem yang tidak merusak keanekaragaman hayati hutan tropis. TFCA Kalimantan mendukung program-program yang ada di empat kabupaten di Kalimantan.<sup>49</sup> Empat kabupaten tersebut diantaranya adalah kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten Kutai Barat, kabupaten Berau, dan kabupaten Mahakam Ulu yang ketiganya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Empat kabupaten tersebut adalah kabupaten target yang merupakan fokus dari program *Heart of Borneo* (HOB) dan *Berau Forest Conservation Programme* (BFCP) yang memang merupakan dua program yang didukung oleh dana dari TFCA Kalimantan seperti yang telah penulis jelaskan pada bab pembahasan gambaran umum sebelumnya.

---

<sup>48</sup> Dobbin, Murray.1998. *The Myth of The Good Corporate Citizen: Democracy Under the rule of big Business*. Stoddart.

<sup>49</sup> TFCA Kalimantan. *Rencana Implementasi 2013 – 2017*. Hlm. 9

Bantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten tidak hanya mengenai masalah pentingnya pelestarian lingkungan dan hutan namun juga diberikan pendampingan secara berkala terhadap pemerintah setempat dan juga masyarakatnya. Pemberian pelatihan mengenai administrasi hingga pelatihan-pelatihan yang berhubungan langsung dengan pelestarian lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem hutan serta pemberian pelatihan kerja bagi masyarakat kabupaten target untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan alternatif lapangan kerja yang lainnya sehingga tidak selamanya bergantung kepada hasil hutan yang ada di sekitar mereka.

Pemerintah kabupaten di Kalimantan memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dan daerah-daerah di luar kawasan hutan. Oleh karena itu perbaikan sistem kerja di tingkat kabupaten akan memiliki dampak langsung dan signifikan pada upaya perlindungan hutan dan sumber daya. Sistem desentralisasi memperjelas peran pelaku pemerintah daerah.

Melalui penjelasan di atas telah jelas diketahui bahwa Indonesia telah mempunyai kriteria syarat politik yang diberikan oleh AS kepada negara penerima bantuan TFCA yakni sebagai negara demokrasi dan negara yang menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Selain itu juga, pemberian bantuan dalam program TFCA dijadikan ajang bagi AS untuk menciptakan perdamaian dalam hal lingkungan global yang dimulai dari wilayah Indonesia. Selain itu juga melalui TFCA Kalimantan ini AS dapat meningkatkan kerjasama internasional dengan Indonesia tidak hanya pada bidang lingkungan tapi juga pada bidang lain salah satunya adalah ekonomi seperti yang penulis jelaskan pada sub bab *economic*

*interest*. Sesuai dengan strategi keamanan nasional AS di tahun 2010 juga, yang dijelaskan bahwa penyebaran nilai demokrasi dan perlindungan nilai yang diyakini secara universal ini dapat berpengaruh terhadap keamanan global yang lebih baik dan juga akan mempengaruhi bagaimana ekonomi dapat berkembang dan menguntungkan negara terutama bagi AS itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa kepentingan melindungi nilai-nilai yang diyakini secara global menjadi salah satu kepentingan nasional AS dalam program kerjasama TFCA yang dilakukan dengan Indonesia pada tahun 2011.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bantuan program kerjasama yang diberikan AS terhadap Indonesia dalam TFCA Kalimantan di tahun 2011 menjadi alat untuk mencapai kepentingan nasional AS dalam program penyelamatan lingkungan dan perubahan iklim. Menggunakan dasar kepentingan nasional milik Donald E. Nuechterlein, yang membagi kepentingan nasional dalam kepentingan pertahanan (*defense*), kepentingan ekonomi (*economic*), kepentingan tatanan dunia (*world order*), dan juga kepentingan penyebaran ideologi (*ideology*).

Dalam analisa kepentingan yang pertama yakni *defence interest* dimana penulis menemukan bahwa isu perubahan iklim global yang terjadi mendapatkan perhatian dari masyarakat AS namun hanya sedikit yang percaya bahwa dampaknya mengancam pribadi masing-masing. Sedangkan bagi sistem pemerintahan, opini masyarakat, partai politik, kelompok ilmuwan lingkungan dan media massa terhadap isu perubahan iklim mempengaruhi bagaimana mereka bertindak dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Walaupun isu deforestasi dan dampaknya yang terjadi di Indonesia tidak mempengaruhi secara langsung negara AS, namun tetap saja hal ini menjadi pertimbangan pemerintah AS untuk ikut andil dalam proses mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan politik yang dimiliki AS untuk memiliki akses ke pemerintah Indonesia.

Kepentingan yang kedua adalah kepentingan ekonomi, dimana menurut analisa penulis terdapat tujuan komersil dalam bantuan program TFCA Kalimantan ini. Tujuan komersil yang dimiliki AS tercermin dalam perdagangan ekspor impor yang dilakukan dengan Indonesia. Komoditas kayu lapis dari hasil hutan Indonesia menjadi komoditas perdagangan AS dengan Indonesia. Dengan ini, secara tidak langsung AS berusaha untuk melindungi sumber daya bahan mentah di Indonesia dengan menciptakan hubungan erat melalui kerjasama TFCA Kalimantan dan untuk memastikan akses berkelanjutan oleh AS terhadap sumber daya bahan baku kayu lapis tersebut. Jadi melalui hal-hal tersebutlah AS memiliki kepentingan ekonomi dengan Indonesia yang ditujukan untuk perdagangan melalui penyelamatan hutan.

*World order interest* menjadi kepentingan nasional AS dalam program TFCA Kalimantan karena dengan memberikan bantuan konservasi hutan tropis membantu AS memperbaiki citra negatif yang selama ini tersemat di AS karena tindakannya yang dianggap tidak mendukung program pengurangan emisi karbon dunia. Melalui TFCA Kalimantan, AS membuktikan pada dunia internasional bahwa dirinya membantu pemulihan hutan tropis yang terdegradasi dan dengan begitu membantu menyerap karbon yang mereka lepaskan di udara. Hal ini juga untuk menjaga sistem politik dunia mengenai isu perubahan iklim.

*Ideological interest* menjadi kepentingan nasional AS dalam program TFCA Kalimantan. Kesamaan sistem politik Indonesia dengan AS dan kepedulian Indonesia terhadap hak asasi manusia menjadi pertimbangan AS memberikan bantuan TFCA Kalimantan di Indonesia karena hal ini sesuai dengan karakteristik syarat yang diberikan AS untuk negara penerima bantuan TFCA. Penyebaran nilai-

nilai demokrasi juga dilakukan AS di Indonesia melalui implementasi program TFCA Kalimantan yang menyasar pada pemerintah kabupaten untuk membantu menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang baik di tingkat kabupaten untuk kemudian dapat menciptakan kebijakan yang tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kabupaten. Jadi kemudian hal ini memudahkan AS untuk menanamkan pengaruhnya dan mencapai kepentingan melindungi ideologi demokrasi AS.

## **6.2 Saran**

Penelitian yang penulis lakukan mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat dalam kerjasama penanganan deforestasi hutan tropis di Indonesia melalui program TFCA Kalimantan tahun 2011 ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada beberapa hal yang tidak mencakup penelitian yang penulis lakukan terkait program TFCA Kalimantan yang dilakukan oleh AS bekerjasama dengan Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti aspek-aspek lain dalam kerjasama TFCA ini. Dikarenakan program ini masih berjalan dan penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui hasil dari program TFCA Kalimantan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ardhian, David; Paul Mario Ginting; Arief Tajalli.2014. *Panduan Pendekatan Program Konservasi berbasis Pendekatan Ekosistem*. Penabulu Alliance.

Carter, Neil.2001. *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.

Davenport, D.S. 2006. *Global Environmental Negotiations and U.S. Interest*. New York: Palgrave Macmillan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 2015. *Deforestasi Indonesia tahun 2013 – 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Dobbin, Murray.1998. *The Myth of The Good Corporate Citizen: Democracy Under the rule of big Business*. Stoddart.

Ernst & Young Indonesia. 2013. *The Impact of US Foreign Direct Investment on the Indonesian Economy*. American Chamber Indonesia: Jakarta.

Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch.2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.

Lancaster, Carol.2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago: Univeristy of Chicago

Mas'oed, Mochtar.1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

McMullen, C.P., Jabbour, J. 2009. *Climate Change Science Compendium*.UNEP. Nairobi: Earthprint.

Newsom, D. D., & Gunadi, T. 1998. *Dimensi publik politik luar negeri*. Bandung : Angkasa

Penabullu Alliance.2014. *Panduan Pengelolaan Program Konservasi berbasis Pendekatan Ekosistem*. Online pdf <http://penabulualliance.org/wp-content/uploads/Panduan-Pengelolaan-Program-Konservasi-Berbasis-Pendekatan-Ekosistem.pdf>

P. Anthonius Sitepu.2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 163

Richard L. Kugler.2011. *New Direction in US National Security Strategy, Defense Plans, and Diplomacy*. Washington DC: national defense University Press for the Center for Technology and National Security Policy Institute for National Security Strategies

**Jurnal :**

Achard Federic, Hugh D. Eva, dll.2002.*Determination of Deforestation rates of the World's Humid Tropical Forest*. Science mag: Vol. 297. Hlm.999.



Tersedia

online

[https://www.researchgate.net/profile/Achard\\_Frederic/publication/236237182\\_De\\_termination\\_of\\_deforestation\\_rates\\_of\\_the\\_world's\\_humid\\_tropical\\_forests/links/54aa91770cf2bce6aa1d4c01.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Achard_Frederic/publication/236237182_De_termination_of_deforestation_rates_of_the_world's_humid_tropical_forests/links/54aa91770cf2bce6aa1d4c01.pdf)

Anderson, Maria.2009. *Motives Behind the Allocation of Aid: A case study Regarding Swedish Motives for Aid Allocation.*

Angelsen, A., Brown, S., Loisel, C., Peskett, L., Streck, L., Zarin, D., 2009. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): an options assessment report.* Prepared for the Government of Norway. Tersedia dalam [http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR\\_en.pdf](http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR_en.pdf).

Angelsen, Arild, Richard Culas.1996. *Debt and Deforestation: A Tenuous Link.* Working Paper WP 1996:10. Bergen: CHR. Michelsen Institute. Tersedia PDF online [http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/325/1/WP%201996\\_10%20Arild%20A%2c%20Richard%20C-07112007\\_1.pdf](http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/325/1/WP%201996_10%20Arild%20A%2c%20Richard%20C-07112007_1.pdf)

Bedarff, H., Holznagel, B., & Jakobeit, C. (1989). *Debt-for-Nature Swaps: Environmental Colonialism or a Way Out from the Debt Crisis that Makes Sense? Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, 22(4), 445-459. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/43109906>

Buckley, Ross., Amberlee Small. 2007. *Leveraging Australia's Debt Relief to The Philippines Through Debt-for-Investment Projects*. Macquarie Law Journal vol.7.hal. 107-135.

Cal Jillson.2008.*American Government Political Change and Institutional Development*. Routledge.

Carrol, Joseph Patrick.2004. *Joint Theatre missile defense in Taiwan: protecting Unites States Interest and Friend*. Thesis. Fort Leamwork Kansas: Faculty of the US Army Command and General Staff College. Tersedia pdf [http://library.uoregon.edu/ec/e-asia/reada/protect\\_taiwan.pdf](http://library.uoregon.edu/ec/e-asia/reada/protect_taiwan.pdf)

Cary Funk., Brian Kennedy. 2016. *The Politics of Climate*. Pew Research Center. Tersedia online <http://www.pewinternet.org/2016/10/04/the-politics-of-climate/> diakses 3 Januari 2018

Cassimon,Danny.,Martin Prowse.,Dennis Essers.2009. *The Pitfalls And Potential Of Debt -For-Nature Swaps A US -Indonesian Case Study*. Institute Of Development Policy And Management -University of Antwerp. Working Paper.

Charles, Anukwonke C.2015. *Debt for nature swap as an option to forest conservation: a case of Nigeria*. Case Report.Basic Research Journal of Soil and Environmental Science Vol. 3(3). Tersedia online <http://basicresearchjournals.org/soil%20and%20environmental%20science/pdf/Anukwonke.pdf>

Climate Advisers.2015.*Understanding the Climate Impacts of Tropical Forest Conservation Act*.Forest & Lands, Transformative Analysis. Tersedia online <http://www.climateadvisers.com/tfca-climate-impact/>

Contreras, Arnoldo, Hermosilla.2007.*The Underlying Causes of Forest Decline*.Bogor: CIFOR. Hlm 1. Tersedia online [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-030.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-030.pdf)

Development Finance International.2009.*Debt relief to combat climate change*. Paper prepared for the Joint Ministerial Forum on Debt Sustainability. London: Commonwealth Secretariat.

Dollery, B., Schulze, D., & West, L. (1995). Swapping Debt for Nature. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 2(3), 361-365. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/43198752>

FAO.1990.*Situation and Outlook for the Forestry Sector in Indonesia*. Volume 1: issues, finding an opportunities.Ministry of Forestry Government of Indonesia. Food and Agriculture Organization of the UN; Jakarta.

Forest Watch Indonesia.2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia: Periode Tahun 2000-2009*. Dalam [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2012/03/phki\\_2000-2009\\_fwi\\_lowres.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2012/03/phki_2000-2009_fwi_lowres.pdf) diakses 10 Januari 2017

Fuller, K.S.1989. Debt-for-nature swaps. *Environmental Science & Technology*.23(12) dalam Catherine Kilbane, Leslie C. Gray. 2011. *Debt-for-nature swaps in action: two case studies in Peru*. *Ecology and society* 16(3); 13.

Gaveau DLA, Sloan S, Molidena E, Yaen H, Sheil D, Abram NK, et al. 2014. *Four Decades of Forest Persistence, Clearance and Logging on Borneo*. PLoS ONE 9(7): e101654. Tersedia online <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0101654>

Hiebert, Murray., Ted Osius., Gregory B. Poling. 2013. *A U.S. – Indonesia Partnership for 2020*. Washington DC: CSIS. Online [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/publication/130917\\_Hiebert\\_USIndonesiaPartnership\\_WEB.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130917_Hiebert_USIndonesiaPartnership_WEB.pdf)

Houghton, Richard A. 1993. *The Role of the World's Forest in Global Warming*. dalam Angelsen, Arild & Richard Culas. 1996. *Debt and Deforestation: A Tenuous Link*. Working Paper WP 1996:10. Bergen: CHR. Michelsen Institute. Tersedia PDF online [http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/325/1/WP%201996\\_10%20Arild%20A%2c%20Richard%20C-07112007\\_1.pdf](http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/325/1/WP%201996_10%20Arild%20A%2c%20Richard%20C-07112007_1.pdf)

Jha, R., Schatan, C. 2001. *Debt for nature: a swap whose time has gone?* Working paper. Santiago de Chile: ECLAC.

Kemendag. 2013. *Market Brief Kayu Lapis*. Chicago: ITPC Chicago.

Kilbane, Catherine., Leslie C. Gray. 2011. *Debt-for-nature swaps in action: two case studies in Peru*. Ecology and society 16(3); 13. Tersedia online <http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss3/art13/2011>

Pearce, D. 2007. *Do we really care about biodiversity?* .Environmental and Resource Economics 37 dalam Catherine Kilbane, Leslie C. Gray. 2011. *Debt-for-nature swaps in action: two case studies in Peru*. Ecology and society 16(3); 13.

PERSAUD, A. (2011). Debt Swap: A Solution for Greece's Problems. *Economic and Political Weekly*, 46(26/27), 17-18. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23018633>

Nuechterlein, Donald.E. 1976. *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. Cambridge University Press, Vol. 2, No. 3.

Occhiolini, M.1990. *Debt-for-nature swaps*.PRE working Paper. Washington DC: World Bank.

Moye, M.2003. Bilateral debt-for-environment swaps by creditor. WWF Center for Conservation Finance. Tersedia di <http://www.cbd.int/doc/external/wwf/wwf-bilateral-swaps-en.pdf>

Porrura, M.E., Corbera, E. Brown, K. 2007.*Reducing Greenhouse Gas Emmission from Deforestation in Developing Countries: Revisiting the assumptions*.Working Paper no. 115. Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research.

Post, M. (1990). The Debt-for-Nature Swap: A Long-Term Investment for the Economic Stability of Less Developed Countries. *The International Lawyer*, 24(4), 1071-1098. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/40706479>

Rudel, T.K., 2001. *Sequestering Carbon in Tropical Forest: Experiments, Policy implications, and climate change*. Society and Natural Resources 14 (6)

Sheikh, P.A. 2008. Debt-for-nature initiatives and The Tropical Forest Conservation Act: Status and Implementation. CRS Report for Congress. Tersedia di <https://fas.org/sgp/crs/misc/RL31286.pdf>

US Department of State. 2011. US – Indonesia Trade and Investment Relationship. Washington DC. Tersedia online <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/177383.htm>

WCED.1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press. Dalam Angelsen, Arild & Richard Culas.1996.*Debt and Deforestation: A Tenuous Link*. Working Paper WP 1996:10. Bergen: CHR. Michelsen Institute. Tersedia PDF online [http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/325/1/WP%201996\\_10%20Arild%20A%2c%20Richard%20C-07112007\\_1.pdf](http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/325/1/WP%201996_10%20Arild%20A%2c%20Richard%20C-07112007_1.pdf)

World Economic Forum. "World Economic Forum Annual Meeting 2014. The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business". Geneva: World Economic Forum, 2014

#### **Artikel Online :**

Abraham M. Denmark, Rizal Sukma, and Christine Parthermore.2010. Crafting a Strategic Vision: A New Era of U.S.- Indonesia Relations. Washington, DC: Center for a New American Security. Online

[https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS\\_Crafting-a-Strategic-Vision\\_Denmark.pdf?mtime=20160906081233](https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS_Crafting-a-Strategic-Vision_Denmark.pdf?mtime=20160906081233) diakses 3 Januari 2018

Adam O'Brien.2005.*Backgrounder: The U.S.- Indonesian Military Relationship*.Council on Foreign Relations. Online <http://www.cfr.org/indonesia/us-indonesian-military-relationship/p8964> diakses 3 Januari 2018

Amcham. 2013. *The Impact of US Foreign Direct Investment on the Indonesian Economy*. Tersedia online <http://www.amcham.or.id/investment-initiative>

Barrack Obama: "Fact Sheet: President Obama's Development Policy and The Global Climate Change Initiative." 2010. Tersedia online [https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/Climate\\_Fact\\_Sheet.pdf](https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/Climate_Fact_Sheet.pdf)

Bettwy, Mike. 2005. *Tropical Deforestation Affects Rainfall in the U.S. and Around the Globe*. NASA.gov: Goddard Space Flight Center. Tersedia online [https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/deforest\\_rainfall.html](https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/deforest_rainfall.html) diakses 23 Desember 2017

Black, Ben. *United States under Pressure to Protect Tropical Forest*. World Watch Institute. Artikel Online <http://www.worldwatch.org/node/6289> diakses 3 juni 2017

Butler, Rhett.2013.*Temuan Pola Hutan Google: Laju Deforestasi Meningkat di Indonesia*. Mongabay Indonesia tersedia online

<http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/>

Cahyono, Eddy.2015. *Investasi dan Pembangunan Ekonomi*. Sekretariat Kabinet RI tersedia online <http://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi/>

CIA. The World Factbook: Indonesia. Tersedia online <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html> diakses 8 Januari 2018

Cuthbertson, Bruce.2001.*The Tropical Forest Conservation Act Accomplishes Many Things*.Washington: Pattriberi House. Artikel online <https://tiberi.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=32376>

Detik Finance.2013. 50% Perusahaan AS yang Ada di RI berskala Multinasional. Tersedia online <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2284937/50-perusahaan-as-yang-ada-di-ri-berskala-multinasional> diakses 23 Desember 2017

Eco-Business.2011. *US to provide US\$450 million for environmental cooperation*. Tersedia online <http://www.eco-business.com/news/us-to-provide-us450-million-for-environmental-cooperation-with-indonesia/> diakses pada 28 Desember 2017

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT).2004. *Bank Dunia Jangan Abaikan Lingkungan*. EC-Indonesia FLEGT Support Project. Dalam <http://www.eu-indonesia-flegt.org>



Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*.  
<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=78814>

Greenpeace. 2010. Greenpeace Mendesak AS untuk menurunkan Emisi mereka dan meningkatkan dukungan finansial. Tersedia online  
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/news/obama-cut-emissions-not-forest/>  
diakses 10 November 2017

Grid Arendal.2007. *Extent of deforestation in Borneo 1950-2005, and projection towards 2020*. Tersedia online <http://www.grida.no/resources/8324>  
diakses 20 Juli 2017

Heart of Borneo Initiative. 2013. *Penyaluran Hibah TFCA untuk Konservasi Hutan di Kalimantan*. Artikel online tersedia  
<http://heartofborneo.or.id/id/news/detail/128/penyaluran-hibah-tfca-untuk-konservasi-hutan-di-kalimantan> diakses 20 Juli 2017

Indonesia Investment. *Ikhtisar Struktur Politik Indonesia*. Tersedia online  
<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?> Diakses 1 Januari 2018

International Centre for Trade and Sustainable Development.2011. *US Swaps Debt with Indonesia to Preserve Borneo Forest*. Tersedia online  
<https://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/us-swaps-debt-with-indonesia-to-preserve-borneo-forests> diakses 1 Janurai 2018

James, O'Hare.2017. *The Little-Known History of US Foreign Aid*. *Global Citizen*. Tersedia online <https://www.globalcitizen.org/en/content/united-states-foreign-aid-history-trump/> diakses 31 Desember 2017

John Norris.2014. Kennedy, Johnson and the early years. USAID: A History of US Foreign Aid, Devex. Online <https://www.devex.com/news/kennedy-johnson-and-the-early-years-83339> diakses 31 Desember 2017

KEHATI.2012. *TFCA Kalimantan - Rencana Implementasi 2013 – 2017*. Tersedia online <http://www.tfcakalimantan.org/>

Kemenperin RI. *Perusahaan Amerika Jadi Penarik Investasi ke Indonesia*. Artikel online <http://www.kemenperin.go.id/artikel/13606/Perusahaan-Amerika-Jadi-Penarik-Investasi-ke-Indonesia>

Kementerian Kehutanan RI. 2014. Statistik Kehutanan Indonesia 2012. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *UU Nomer 39 Tahun 1999*. Online <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/3/uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia.html>

Leiserowitz, A., Maibach, E., Roser-Renouf, C., & Smith, N.2011. *Climate Change in the American Mind: American's Global Warming Beliefs and Attitudes in May 2011*. Yale University and George Mason University. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication. <http://environment.yale.edu/climate/files/ClimateBeliefsMay2011.pdf>

Matt Hansen et al. 2013. *High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change*. SCIENCE VOL 342. Tersedia online <https://news.mongabay.com/2013/11/powered-by-google-high-resolution-forest-map-reveals-massive-deforestation-worldwide/>

National Center for Public Policy Research. 1997. Byrd-Hagel Resolution. Tersedia online <http://www.nationalcenter.org/KyotoSenate.html> diakses pada 23 September 2017

National Climate Assessment. 2014. *Climate Trends Highlight*. U.S. Global Change Research Program. Tersedia online <https://nca2014.globalchange.gov/highlights/overview/climate-trends> diakses 30 Desember 2017

National Geography. 2017. *Deforestation*. Artikel online <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/> diakses 25 Mei 2017

Nature Climate Change. 2017. *The World without Rainforest*. Online <https://www.nature.com/nclimate/> diakses 18 November 2017

Pew Research Center. 2011. *Modest Rise in Number Saying There Is 'Solid Evidence' of Global Warming*. Pew Research Center U.S. Politics & Policy. Tersedia online <http://www.people-press.org/2011/12/01/modest-rise-in-number-saying-there-is-solid-evidence-of-global-warming/> diakses 30 Desember 2017

Profauna .2017.*Tentang Hutan Kalimantan*. Protecting of Forest and Fauna. Tersedia online <https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/hutan-kalimantan/tentang-hutan-kalimantan#.WYkxERWGNH0> diakses 20 Juli 2017

Protecting of Forest and Fauna. *Tentang Hutan Kalimantan*. Tersedia online <https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/hutan-kalimantan/tentang-hutan-kalimantan#.WYkxERWGNH0> diakses 20 Juli 2017

Republika.2009. Obama Ajak Semua Negara Hasilkan Kesepakatan di Kopenhagen. Online <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/12/19/96804-obama-ajak-semua-negara-hasilkan-kesepakatan-di-kopenhagen>

Samantha, Gloria.2014. Rp. 40 miliar hibah untuk hutan. National Geographic Indonesia. Artikel online <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/05/rp40-miliar-hibah-untuk-hutan>

Santi, Natalia. Tempo.co – Lingkungan. 2016. Amerika bantu LSM Indonesia Melindungi Hutan Kalimantan. Jakarta. Dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/14/206827916/amerika-bantu-lsm-indonesia-melindungi-hutan-kalimantan> pada 12 Januari 2017

Seal of the President of the United States. 2010. *National Security Strategy*. PDF dalam <http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf>

Siaran Pers Kedubes AS.2009. *Kesepakatan Pengalihan Utang untuk Konservasi Alam antara AS-Indonesia untuk Selamatkan Hutan di Sumatera*. Jakarta: Public Affair section kedubes AS.

Sigit, Ridzki.2015. *Posisi China dan Amerika Serikat dalam Rezim Perubahan Iklim* tersedia online <http://www.mongabay.co.id/2015/12/12/opini-posisi-china-dan-amerika-serikat-dalam-rezim-perubahan-iklim/>

Stephan Wulffraat. 2012. *Environmental Status of Heart of Borneo 2012*. Jakarta: WWF's HoB Initiative

SWA Trends Business. Intana, Lila.2013. AS Klaim sebagai investor terbesar di Indonesia. Online <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/as-klaim-sebagai-investor-terbesar-di-indonesia>

The Conservation.2014. *How Plywood started the destruction of Indonesias forests*. Tersedia online <https://theconversation.com/how-plywood-started-the-destruction-of-indonesias-forests-33087>

The White House. *Climate Change and President Obama's Action Plan*. Tersedia online <https://obamawhitehouse.archives.gov/node/279886> diakses 28 Desember 2017

The White House.2010.*The U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership*. Office of the Press Secretary <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/us-indonesia-comprehensive-partnership> diakses 28 Desember 2017

Titiyoga, Gabriel W.2015.Indonesia Peringkat 6 Penyumbang Karbon Dunia. Jakarta: Tempo.co artikel online <https://tekno.tempo.co/read/news/2015/03/05/061647425/indonesia-peringkat-6-penyumbang-karbon-dunia> diakses 30 Mei 2017

U.S. Census Bureau. *Foreign Trade with Indonesia*. Tersedia online <http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5600.html>.

U.S. Chamber of Commerce. 2013. *Partners in Prosperity: U.S. investment in Indonesia*. Online <https://www.uschamber.com/report/partners-prosperity-us-investment-indonesia>

U.S. Energy Information Administration. 2017. *Americans use many types of energy*. Tersedia online [http://www.eia.gov/energyexplained/?page=us\\_energy\\_home](http://www.eia.gov/energyexplained/?page=us_energy_home)

UNFCCC. *Status of Ratification of The Kyoto Protocol*. Tersedia online [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/status\\_of\\_ratification/items/2613.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php) diakses pada 23 September 2017

USAID. 2014. *Countries with TFCA Programs*. Dalam <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/programs-by-country>. Diakses pada 23 Maret 2017

USAID. *TFCA Eligibility Requirements*. Tersedia online <https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA/eligibility-requirements> diakses pada 25 Mei 2017

USAID. 2010. *A Partnership for Prosperity USAID Strategy Indonesia 2009-2014*. Online <https://www.ircwash.org/sites/default/files/USAID-2010-Partnership.pdf>

USINDO. 2012. *Meeting Environment and Climate Change Challenges in Indonesia: U.S. – Indonesia Cooperation under the Comprehensive Partnership*. Tersedia online pdf [http://www.usindo.org/wp-content/uploads/2013/04/Open\\_Forum\\_Brief\\_Environment\\_Climate-Change\\_7.27.12.pdf](http://www.usindo.org/wp-content/uploads/2013/04/Open_Forum_Brief_Environment_Climate-Change_7.27.12.pdf)

Vision: A New Era of U.S.- Indonesia Relations. Washington, DC: Center for a New American Security. Online [https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS\\_Crafting-a-Strategic-Vision\\_Denmark.pdf?mtime=20160906081233](https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS_Crafting-a-Strategic-Vision_Denmark.pdf?mtime=20160906081233)

VOA.2017.*Melestarikan Hutan Tropis di Indonesia*. Artikel online <https://www.voaindonesia.com/a/melestarikan-hutan-tropis-di-indonesia/3668445.html>

WWF Indoonesia. 2011. *Pemerintah Indonesia dan Amerika umumkan Debt Swap untuk Konservasi hutan di Indonesia*. Jakarta. Dalam [www.wwf.or.id/en/about\\_wwf/whatwedo/forest\\_species/where we work/kayamentarang/resources/index.cfm?unewsid=23260&ulangid=67](http://www.wwf.or.id/en/about_wwf/whatwedo/forest_species/where_we_work/kayamentarang/resources/index.cfm?unewsid=23260&ulangid=67) pada 12 Januari 2017

WWF Indonesia.2014. Penyaluran Hibah TFCA untuk Konservasi Hutan di Kalimantan. Jakarta, dalam [www.wwf.or.id/?33142/Penyaluran-Hibah-TFCA-untuk-Konservasi-Hutan-](http://www.wwf.or.id/?33142/Penyaluran-Hibah-TFCA-untuk-Konservasi-Hutan-)









































**FINANCE**

**Debt-for-Nature Swap**

**Agreement Between the  
UNITED STATES OF AMERICA  
and INDONESIA**

Signed at Jakarta September 29, 2014

*with*

Schedules



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966  
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“...the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

## **INDONESIA**

### **Finance: Debt-for-Nature Swap**

*Agreement signed at Jakarta September 29, 2014;  
Entered into force September 29, 2014.  
With schedules.*



































Public Law 105–214  
105th Congress

An Act

To amend the Foreign Assistance Act of 1961 to facilitate protection of tropical forests through debt reduction with developing countries with tropical forests.

July 29, 1998  
[H.R. 2870]

*Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,*

**SECTION 1. DEBT REDUCTION FOR DEVELOPING COUNTRIES WITH TROPICAL FORESTS.**

The Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2151 et seq.) is amended by adding at the end the following:

**“PART V—DEBT REDUCTION FOR DEVELOPING COUNTRIES WITH TROPICAL FORESTS**

Tropical Forest  
Conservation Act  
of 1998.

**“SEC. 801. SHORT TITLE.**

“This part may be cited as the ‘Tropical Forest Conservation Act of 1998’.

22 USC 2151  
note.

**“SEC. 802. FINDINGS AND PURPOSES.**

22 USC 2431.

“(a) FINDINGS.—The Congress finds the following:

“(1) It is the established policy of the United States to support and seek protection of tropical forests around the world.

“(2) Tropical forests provide a wide range of benefits to humankind by—

“(A) harboring a major share of the Earth’s biological and terrestrial resources, which are the basis for developing pharmaceutical products and revitalizing agricultural crops;

“(B) playing a critical role as carbon sinks in reducing greenhouse gases in the atmosphere, thus moderating potential global climate change; and

“(C) regulating hydrological cycles on which far-flung agricultural and coastal resources depend.

“(3) International negotiations and assistance programs to conserve forest resources have proliferated over the past decade, but the rapid rate of tropical deforestation continues unabated.

“(4) Developing countries with urgent needs for investment and capital for development have allocated a significant amount of their forests to logging concessions.

“(5) Poverty and economic pressures on the populations of developing countries have, over time, resulted in clearing of vast areas of forest for conversion to agriculture, which is often unsustainable in the poor soils underlying tropical forests.

“(6) Debt reduction can reduce economic pressures on developing countries and result in increased protection for tropical forests.

“(7) Finding economic benefits to local communities from sustainable uses of tropical forests is critical to the protection of tropical forests.

“(b) PURPOSES.—The purposes of this part are—

“(1) to recognize the values received by United States citizens from protection of tropical forests;

“(2) to facilitate greater protection of tropical forests (and to give priority to protecting tropical forests with the highest levels of biodiversity and under the most severe threat) by providing for the alleviation of debt in countries where tropical forests are located, thus allowing the use of additional resources to protect these critical resources and reduce economic pressures that have led to deforestation;

“(3) to ensure that resources freed from debt in such countries are targeted to protection of tropical forests and their associated values; and

“(4) to rechannel existing resources to facilitate the protection of tropical forests.

22 USC 2431a.

**“SEC. 803. DEFINITIONS.**

“As used in this part:

“(1) ADMINISTERING BODY.—The term ‘administering body’ means the entity provided for in section 809(c).

“(2) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES.—The term ‘appropriate congressional committees’ means—

“(A) the Committee on International Relations and the Committee on Appropriations of the House of Representatives; and

“(B) the Committee on Foreign Relations and the Committee on Appropriations of the Senate.

“(3) BENEFICIARY COUNTRY.—The term ‘beneficiary country’ means an eligible country with respect to which the authority of section 806(a)(1), section 807(a)(1), or paragraph (1) or (2) of section 808(a) is exercised.

“(4) BOARD.—The term ‘Board’ means the board referred to in section 811.

“(5) DEVELOPING COUNTRY WITH A TROPICAL FOREST.—The term ‘developing country with a tropical forest’ means—

“(A)(i) a country that has a per capita income of \$725 or less in 1994 United States dollars (commonly referred to as ‘low-income country’), as determined and adjusted on an annual basis by the International Bank for Reconstruction and Development in its World Development Report; or

“(ii) a country that has a per capita income of more than \$725 but less than \$8,956 in 1994 United States dollars (commonly referred to as ‘middle-income country’), as determined and adjusted on an annual basis by the International Bank for Reconstruction and Development in its World Development Report; and

“(B) a country that contains at least one tropical forest that is globally outstanding in terms of its biological diversity or represents one of the larger intact blocks of tropical forests left, on a regional, continental, or global scale.

“(6) ELIGIBLE COUNTRY.—The term ‘eligible country’ means a country designated by the President in accordance with section 805.

“(7) TROPICAL FOREST AGREEMENT.—The term ‘Tropical Forest Agreement’ or ‘Agreement’ means a Tropical Forest Agreement provided for in section 809.

“(8) TROPICAL FOREST FACILITY.—The term ‘Tropical Forest Facility’ or ‘Facility’ means the Tropical Forest Facility established in the Department of the Treasury by section 804.

“(9) TROPICAL FOREST FUND.—The term ‘Tropical Forest Fund’ or ‘Fund’ means a Tropical Forest Fund provided for in section 810.

**“SEC. 804. ESTABLISHMENT OF THE FACILITY.**

22 USC 2431b.

“There is established in the Department of the Treasury an entity to be known as the ‘Tropical Forest Facility’ for the purpose of providing for the administration of debt reduction in accordance with this part.

**“SEC. 805. ELIGIBILITY FOR BENEFITS.**

22 USC 2431c.

“(a) IN GENERAL.—To be eligible for benefits from the Facility under this part, a country shall be a developing country with a tropical forest—

“(1) whose government meets the requirements applicable to Latin American or Caribbean countries under paragraphs (1) through (5) and (7) of section 703(a) of this Act; and

“(2) that has put in place major investment reforms, as evidenced by the conclusion of a bilateral investment treaty with the United States, implementation of an investment sector loan with the Inter-American Development Bank, World Bank-supported investment reforms, or other measures, as appropriate.

“(b) ELIGIBILITY DETERMINATIONS.—

President.

“(1) IN GENERAL.—Consistent with subsection (a), the President shall determine whether a country is eligible to receive benefits under this part.

“(2) CONGRESSIONAL NOTIFICATION.—The President shall notify the appropriate congressional committees of his intention to designate a country as an eligible country at least 15 days in advance of any formal determination.

**“SEC. 806. REDUCTION OF DEBT OWED TO THE UNITED STATES AS A RESULT OF CONCESSIONAL LOANS UNDER THE FOREIGN ASSISTANCE ACT OF 1961.**

22 USC 2431d.

“(a) AUTHORITY TO REDUCE DEBT.—

“(1) AUTHORITY.—The President may reduce the amount owed to the United States (or any agency of the United States) that is outstanding as of January 1, 1998, as a result of concessional loans made to an eligible country by the United States under part I of this Act, chapter 4 of part II of this Act, or predecessor foreign economic assistance legislation.

“(2) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.—For the cost (as defined in section 502(5) of the Federal Credit Reform Act of 1990) for the reduction of any debt pursuant to this section, there are authorized to be appropriated to the President—

“(A) \$25,000,000 for fiscal year 1999;

“(B) \$75,000,000 for fiscal year 2000; and

“(C) \$100,000,000 for fiscal year 2001.

“(3) CERTAIN PROHIBITIONS INAPPLICABLE.—

“(A) IN GENERAL.—A reduction of debt pursuant to this section shall not be considered assistance for purposes of any provision of law limiting assistance to a country.

“(B) ADDITIONAL REQUIREMENT.—The authority of this section may be exercised notwithstanding section 620(r) of this Act or section 321 of the International Development and Food Assistance Act of 1975.

“(b) IMPLEMENTATION OF DEBT REDUCTION.—

“(1) IN GENERAL.—Any debt reduction pursuant to subsection (a) shall be accomplished at the direction of the Facility by the exchange of a new obligation for obligations of the type referred to in subsection (a) outstanding as of the date specified in subsection (a)(1).

“(2) EXCHANGE OF OBLIGATIONS.—

Notification.

“(A) IN GENERAL.—The Facility shall notify the agency primarily responsible for administering part I of this Act of an agreement entered into under paragraph (1) with an eligible country to exchange a new obligation for outstanding obligations.

“(B) ADDITIONAL REQUIREMENT.—At the direction of the Facility, the old obligations that are the subject of the agreement shall be canceled and a new debt obligation for the country shall be established relating to the agreement, and the agency primarily responsible for administering part I of this Act shall make an adjustment in its accounts to reflect the debt reduction.

Applicability.

“(c) ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS.—The following additional terms and conditions shall apply to the reduction of debt under subsection (a)(1) in the same manner as such terms and conditions apply to the reduction of debt under section 704(a)(1) of this Act:

“(1) The provisions relating to repayment of principal under section 705 of this Act.

“(2) The provisions relating to interest on new obligations under section 706 of this Act.

22 USC 2431e.

**“SEC. 807. REDUCTION OF DEBT OWED TO THE UNITED STATES AS A RESULT OF CREDITS EXTENDED UNDER TITLE I OF THE AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT AND ASSISTANCE ACT OF 1954.**

“(a) AUTHORITY TO REDUCE DEBT.—

“(1) AUTHORITY.—Notwithstanding any other provision of law, the President may reduce the amount owed to the United States (or any agency of the United States) that is outstanding as of January 1, 1998, as a result of any credits extended under title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 (7 U.S.C. 1701 et seq.) to a country eligible for benefits from the Facility.

“(2) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.—

“(A) IN GENERAL.—For the cost (as defined in section 502(5) of the Federal Credit Reform Act of 1990) for the reduction of any debt pursuant to this section, there are authorized to be appropriated to the President—

“(i) \$25,000,000 for fiscal year 1999;

“(ii) \$50,000,000 for fiscal year 2000; and

“(iii) \$50,000,000 for fiscal year 2001.

“(B) LIMITATION.—The authority provided by this section shall be available only to the extent that appropriations for the cost (as defined in section 502(5) of the Federal Credit Reform Act of 1990) of the modification of any debt pursuant to this section are made in advance.

“(b) IMPLEMENTATION OF DEBT REDUCTION.—

“(1) IN GENERAL.—Any debt reduction pursuant to subsection (a) shall be accomplished at the direction of the Facility by the exchange of a new obligation for obligations of the type referred to in subsection (a) outstanding as of the date specified in subsection (a)(1).

“(2) EXCHANGE OF OBLIGATIONS.—

Notification.

“(A) IN GENERAL.—The Facility shall notify the Commodity Credit Corporation of an agreement entered into under paragraph (1) with an eligible country to exchange a new obligation for outstanding obligations.

“(B) ADDITIONAL REQUIREMENT.—At the direction of the Facility, the old obligations that are the subject of the agreement shall be canceled and a new debt obligation shall be established for the country relating to the agreement, and the Commodity Credit Corporation shall make an adjustment in its accounts to reflect the debt reduction.

“(c) ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS.—The following additional terms and conditions shall apply to the reduction of debt under subsection (a)(1) in the same manner as such terms and conditions apply to the reduction of debt under section 604(a)(1) of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 (7 U.S.C. 1738c):

Applicability.

“(1) The provisions relating to repayment of principal under section 605 of such Act.

“(2) The provisions relating to interest on new obligations under section 606 of such Act.

**“SEC. 808. AUTHORITY TO ENGAGE IN DEBT-FOR-NATURE SWAPS AND DEBT BUYBACKS.**

22 USC 2431f.

“(a) LOANS AND CREDITS ELIGIBLE FOR SALE, REDUCTION, OR CANCELLATION.—

“(1) DEBT-FOR-NATURE SWAPS.—

“(A) IN GENERAL.—Notwithstanding any other provision of law, the President may, in accordance with this section, sell to any eligible purchaser described in subparagraph (B) any concessional loans described in section 806(a)(1) or any credits described in section 807(a)(1), or on receipt of payment from an eligible purchaser described in subparagraph (B), reduce or cancel such loans (or credits) or portion thereof, only for the purpose of facilitating a debt-for-nature swap to support eligible activities described in section 809(d).

“(B) ELIGIBLE PURCHASER DESCRIBED.—A loan or credit may be sold, reduced, or canceled under subparagraph (A) only to a purchaser who presents plans satisfactory to the President for using the loan or credit for the purpose of engaging in debt-for-nature swaps to support eligible activities described in section 809(d).

“(C) CONSULTATION REQUIREMENT.—Before the sale under subparagraph (A) to any eligible purchaser described in subparagraph (B), or any reduction or cancellation under

President.

such subparagraph (A), of any loan or credit made to an eligible country, the President shall consult with the country concerning the amount of loans or credits to be sold, reduced, or canceled and their uses for debt-for-nature swaps to support eligible activities described in section 809(d).

“(D) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.—For the cost (as defined in section 502(5) of the Federal Credit Reform Act of 1990) for the reduction of any debt pursuant to subparagraph (A), amounts authorized to appropriated under sections 806(a)(2) and 807(a)(2) shall be made available for such reduction of debt pursuant to subparagraph (A).

“(2) DEBT BUYBACKS.—Notwithstanding any other provision of law, the President may, in accordance with this section, sell to any eligible country any concessional loans described in section 806(a)(1) or any credits described in section 807(a)(1), or on receipt of payment from an eligible country, reduce or cancel such loans (or credits) or portion thereof, only for the purpose of facilitating a debt buyback by an eligible country of its own qualified debt, only if the eligible country uses an additional amount of the local currency of the eligible country, equal to not less than the lessor of 40 percent of the price paid for such debt by such eligible country, or the difference between the price paid for such debt and the face value of such debt, to support eligible activities described in section 809(d).

“(3) LIMITATION.—The authority provided by paragraphs (1) and (2) shall be available only to the extent that appropriations for the cost (as defined in section 502(5) of the Federal Credit Reform Act of 1990) of the modification of any debt pursuant to such paragraphs are made in advance.

President.

“(4) TERMS AND CONDITIONS.—Notwithstanding any other provision of law, the President shall, in accordance with this section, establish the terms and conditions under which loans and credits may be sold, reduced, or canceled pursuant to this section.

Notification.

“(5) ADMINISTRATION.—

“(A) IN GENERAL.—The Facility shall notify the administrator of the agency primarily responsible for administering part I of this Act or the Commodity Credit Corporation, as the case may be, of eligible purchasers described in paragraph (1)(B) that the President has determined to be eligible under paragraph (1), and shall direct such agency or Corporation, as the case may be, to carry out the sale, reduction, or cancellation of a loan pursuant to such paragraph.

“(B) ADDITIONAL REQUIREMENT.—Such agency or Corporation, as the case may be, shall make an adjustment in its accounts to reflect the sale, reduction, or cancellation.

“(b) DEPOSIT OF PROCEEDS.—The proceeds from the sale, reduction, or cancellation of any loan sold, reduced, or canceled pursuant to this section shall be deposited in the United States Government account or accounts established for the repayment of such loan.

22 USC 2431g.

“SEC. 809. TROPICAL FOREST AGREEMENT.

“(a) AUTHORITY.—



“(1) IN GENERAL.—The Secretary of State is authorized, in consultation with other appropriate officials of the Federal Government, to enter into a Tropical Forest Agreement with any eligible country concerning the operation and use of the Fund for that country.

“(2) CONSULTATION.—In the negotiation of such an Agreement, the Secretary shall consult with the Board in accordance with section 811.

“(b) CONTENTS OF AGREEMENT.—The requirements contained in section 708(b) of this Act (relating to contents of an agreement) shall apply to an Agreement in the same manner as such requirements apply to an Americas Framework Agreement.

“(c) ADMINISTERING BODY.—

“(1) IN GENERAL.—Amounts disbursed from the Fund in each beneficiary country shall be administered by a body constituted under the laws of that country.

“(2) COMPOSITION.—

“(A) IN GENERAL.—The administering body shall consist of—

“(i) one or more individuals appointed by the United States Government;

“(ii) one or more individuals appointed by the government of the beneficiary country; and

“(iii) individuals who represent a broad range of—  
“(I) environmental nongovernmental organizations of, or active in, the beneficiary country;

“(II) local community development nongovernmental organizations of the beneficiary country; and

“(III) scientific, academic, or forestry organizations of the beneficiary country.

“(B) ADDITIONAL REQUIREMENT.—A majority of the members of the administering body shall be individuals described in subparagraph (A)(iii).

“(3) RESPONSIBILITIES.—The requirements contained in section 708(c)(3) of this Act (relating to responsibilities of the administering body) shall apply to an administering body described in paragraph (1) in the same manner as such requirements apply to an administering body described in section 708(c)(1) of this Act.

“(d) ELIGIBLE ACTIVITIES.—Amounts deposited in a Fund shall be used only to provide grants to conserve, maintain, and restore the tropical forests in the beneficiary country, through one or more of the following activities:

“(1) Establishment, restoration, protection, and maintenance of parks, protected areas, and reserves.

“(2) Development and implementation of scientifically sound systems of natural resource management, including land and ecosystem management practices.

“(3) Training programs to increase the scientific, technical, and managerial capacities of individuals and organizations involved in conservation efforts.

“(4) Restoration, protection, or sustainable use of diverse animal and plant species.

“(5) Research and identification of medicinal uses of tropical forest plant life to treat human diseases, illnesses, and health related concerns.

“(6) Development and support of the livelihoods of individuals living in or near a tropical forest in a manner consistent with protecting such tropical forest.

“(e) GRANT RECIPIENTS.—

“(1) IN GENERAL.—Grants made from a Fund shall be made to—

“(A) nongovernmental environmental, forestry, conservation, and indigenous peoples organizations of, or active in, the beneficiary country;

“(B) other appropriate local or regional entities of, or active in, the beneficiary country; or

“(C) in exceptional circumstances, the government of the beneficiary country.

“(2) PRIORITY.—In providing grants under paragraph (1), priority shall be given to projects that are run by nongovernmental organizations and other private entities and that involve local communities in their planning and execution.

“(f) REVIEW OF LARGER GRANTS.—Any grant of more than \$100,000 from a Fund shall be subject to veto by the Government of the United States or the government of the beneficiary country.

“(g) ELIGIBILITY CRITERIA.—In the event that a country ceases to meet the eligibility requirements set forth in section 805(a), as determined by the President pursuant to section 805(b), then grants from the Fund for that country may only be made to nongovernmental organizations until such time as the President determines that such country meets the eligibility requirements set forth in section 805(a).

22 USC 2431h.

**“SEC. 810. TROPICAL FOREST FUND.**

“(a) ESTABLISHMENT.—Each beneficiary country that enters into a Tropical Forest Agreement under section 809 shall be required to establish a Tropical Forest Fund to receive payments of interest on new obligations undertaken by the beneficiary country under this part.

“(b) REQUIREMENTS RELATING TO OPERATION OF FUND.—The following terms and conditions shall apply to the Fund in the same manner as such terms as conditions apply to an Enterprise for the Americas Fund under section 707 of this Act:

“(1) The provision relating to deposits under subsection (b) of such section.

“(2) The provision relating to investments under subsection (c) of such section.

“(3) The provision relating to disbursements under subsection (d) of such section.

22 USC 2431i.

**“SEC. 811. BOARD.**

“(a) ENTERPRISE FOR THE AMERICAS BOARD.—The Enterprise for the Americas Board established under section 610(a) of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 (7 U.S.C. 1738i(a)) shall, in addition to carrying out the responsibilities of the Board under section 610(c) of such Act, carry out the duties described in subsection (c) of this section for the purposes of this part.

President.

“(b) ADDITIONAL MEMBERSHIP.—

“(1) IN GENERAL.—The Enterprise for the Americas Board shall be composed of an additional four members appointed by the President as follows:

“(A) Two representatives from the United States Government, including a representative of the International Forestry Division of the United States Forest Service.

“(B) Two representatives from private nongovernmental environmental, scientific, forestry, or academic organizations with experience and expertise in preservation, maintenance, sustainable uses, and restoration of tropical forests.

“(2) CHAIRPERSON.—Notwithstanding section 610(b)(2) of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 (7 U.S.C. 1738i(b)(2)), the Enterprise for the Americas Board shall be headed by a chairperson who shall be appointed by the President from among the representatives appointed under section 610(b)(1)(A) of such Act or paragraph (1)(A) of this subsection.

“(c) DUTIES.—The duties described in this subsection are as follows:

“(1) Advise the Secretary of State on the negotiations of Tropical Forest Agreements.

“(2) Ensure, in consultation with—

“(A) the government of the beneficiary country;

“(B) nongovernmental organizations of the beneficiary country;

“(C) nongovernmental organizations of the region (if appropriate);

“(D) environmental, scientific, forestry, and academic leaders of the beneficiary country; and

“(E) environmental, scientific, forestry, and academic leaders of the region (as appropriate),

that a suitable administering body is identified for each Fund.

“(3) Review the programs, operations, and fiscal audits of each administering body.

**“SEC. 812. CONSULTATIONS WITH THE CONGRESS.**

President.  
22 USC 2431j.

“The President shall consult with the appropriate congressional committees on a periodic basis to review the operation of the Facility under this part and the eligibility of countries for benefits from the Facility under this part.

**“SEC. 813. ANNUAL REPORTS TO THE CONGRESS.**

22 USC 2431k.

“(a) IN GENERAL.—Not later than December 31 of each year, the President shall prepare and transmit to the Congress an annual report concerning the operation of the Facility for the prior fiscal year. Such report shall include—

Deadline.  
President.

“(1) a description of the activities undertaken by the Facility during the previous fiscal year;

“(2) a description of any Agreement entered into under this part;

“(3) a report on any Funds that have been established under this part and on the operations of such Funds; and

“(4) a description of any grants that have been provided by administering bodies pursuant to Agreements under this part.

Deadline.

“(b) SUPPLEMENTAL VIEWS IN ANNUAL REPORT.—Not later than December 15 of each year, each member of the Board shall be entitled to receive a copy of the report required under subsection (a). Each member of the Board may prepare and submit supplemental views to the President on the implementation of this part by December 31 for inclusion in the annual report when it is transmitted to Congress pursuant to this section.”.

Approved July 29, 1998.

---

LEGISLATIVE HISTORY—H.R. 2870 (S. 1758):

HOUSE REPORTS: No. 105-443 (Comm. on International Relations).

SENATE REPORTS: No. 105-219 accompanying S. 1758 (Comm. on Foreign Relations).

CONGRESSIONAL RECORD, Vol. 144 (1998):

Mar. 19, considered and passed House.

July 14, considered and passed Senate, amended.

July 15, House concurred in Senate amendment.

